



ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA
PERKEBUNAN
SULAWESI TENGAH
HASIL SENSUS PERTANIAN 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<http://sulteng.bps.go.id>



ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA
PERKEBUNAN
SULAWESI TENGAH
HASIL SENSUS PERTANIAN 2013

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN SULAWESI TENGAH

Hasil Sensus Pertanian 2013

ISBN	: 978-602-1385-35-7
No. Publikasi	: 17550.1545
Katalog BPS	: 5201007.72
Diproduksi	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Penulis	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Desain cover	: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

©Badan Pusat Provinsi Statistik Sulawesi Tengah, 2015
vi + 113 halaman; 18 x 25 cm

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

Kata Pengantar



Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta mengacu pada beberapa rekomendasi *FAO* yang telah menetapkan *"The World Programme for the 2010 Around Agricultural Censuses Covering Periode 2006-2015"*, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013).

Tahapan pertama dari ST2013 adalah Pencacahan Lengkap Usaha Pertanian yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2013. BPS Provinsi Sulawesi Tengah kemudian mempublikasikan Analisis Hasil Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013, selanjutnya Analisis kedua yaitu Analisis Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian, Sensus Pertanian 2013.

Tahapan terakhir adalah dengan menerbitkan buku ketiga yaitu Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan Sulawesi Tengah: Hasil Sensus Pertanian 2013. Diharapkan dengan adanya publikasi hasil survei subsektor ini akan memperkaya referensi publikasi sebelumnya dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan implementasi kebijakan-kebijakan peningkatan produksi pertanian perkebunan di Sulawesi Tengah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap penggunanya.

Palu, Desember 2015
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah


Johannes De Britto Priyono

Daftar Isi



Kata Pengantar iii



BAB 4

Akses Sumberdaya Produktif Usaha Perkebunan Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi

BAB 5

Analisis Tingkat Efisiensi dan Determinasi Usaha Perkebunan

BAB 6

Kesimpulan

1.

Potensi Dan Peran Subsektor Perkebunan Dalam Perekonomian Sulawesi Tengah

BAB 1

11.

Karakteristik Rumah Tangga Usaha Perkebunan Sulawesi Tengah

BAB 2

25.

Gambaran Usaha Perkebunan Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah

BAB 3

.47



.65

.93

99.

Daftar Pustaka

112.

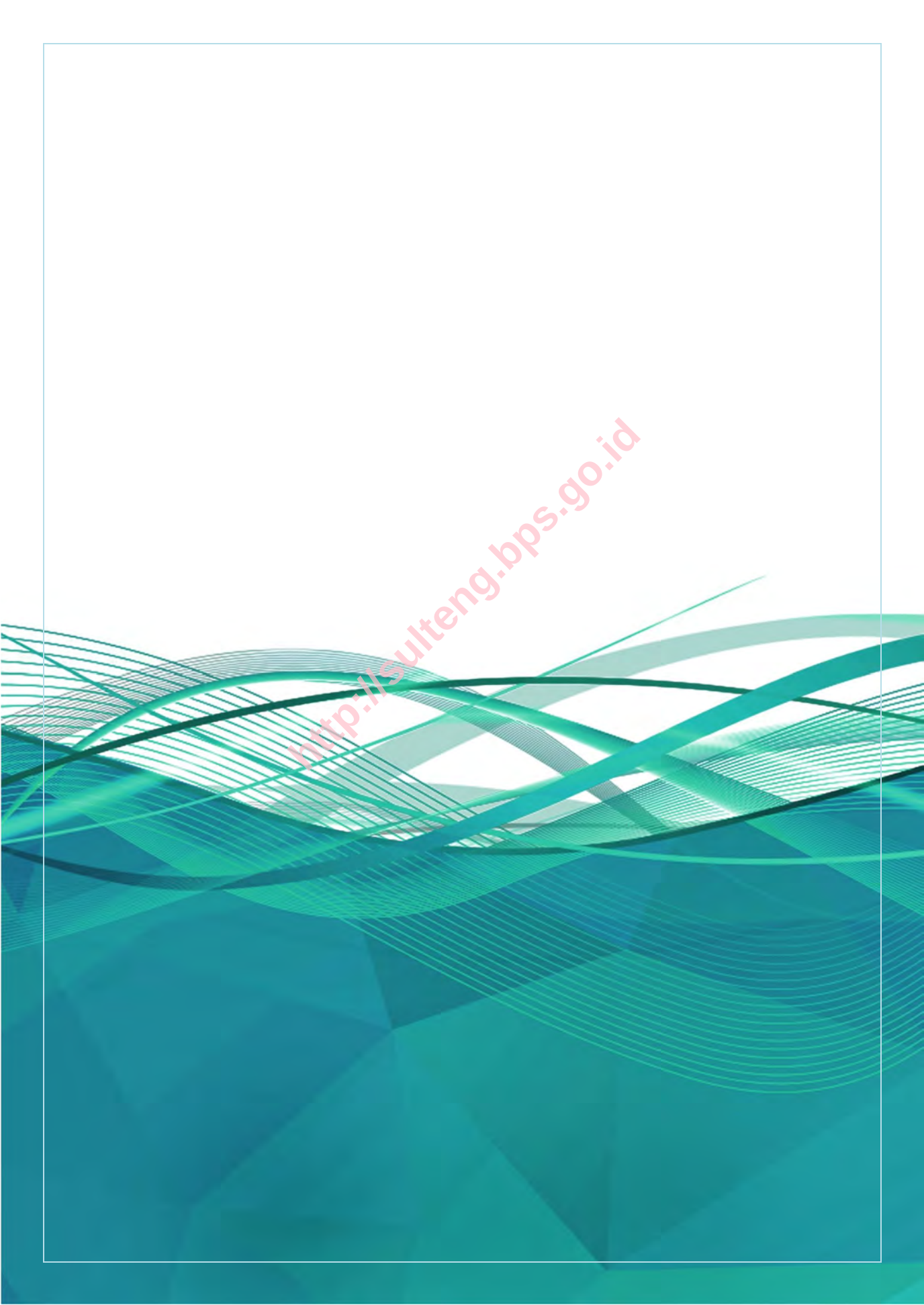
Lampiran
Kuesioner Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan



**POTENSI DAN PERAN
SUBSEKTOR PERKEBUNAN
DALAM PEREKONOMIAN SULAWESI TENGAH**

<http://sulteng.bps.go.id>

1



BAB. 1

POTENSI DAN PERAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN DALAM PEREKONOMIAN SULAWESI TENGAH

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah Sensus Pertanian keenam yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1963, dengan tema “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik.” Untuk mendukung hasil ST2013, BPS juga telah melaksanakan beberapa survei pertanian lanjutan yaitu Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 (ST2013-SPP) dan Survei ST2013-Subsektor.

Dari hasil pendataan lengkap ST2013, BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah mempublikasikan tabel-tabel pokok pendataan ST2013. Analisis pendukung juga telah diterbitkan dalam publikasi berjudul **“Analisis Hasil Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013 Sulawesi Tengah”**. Sementara itu, dari hasil Survei Pendapatan

Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013, telah diterbitkan publikasi **“Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian Sulawesi Tengah.”**

Publikasi kali ini, yang berjudul **“Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan Sulawesi Tengah”**, merupakan analisis dari data hasil ST2013



Subsektor, yang merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan ST2013. ST2013 Subsektor merupakan kegiatan pendataan secara sampel terhadap rumah tangga pertanian hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data mengenai struktur ongkos usaha rumah tangga subsektor antara lain biaya penggunaan benih, pupuk, pestisida, pekerja, jasa pertanian dan biaya atau pengeluaran lain yang dibutuhkan dalam usaha perkebunan. Selain itu juga dikumpulkan data pendukung, seperti kendala dan prospek usaha, kondisi bangunan, fasilitas tempat tinggal dan ketahanan pangan rumah tangga usaha subsektor.

Survei ST2013-Subsektor, yang dilaksanakan pada tahun 2014, mencakup 9 jenis usaha pertanian, yaitu: tanaman padi, tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya tanaman kehutanan, kehutanan, budidaya ikan dan penangkapan ikan. Analisis pada publikasi ini disusun berdasarkan Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan tahun 2014, yang merupakan bagian dari Survei ST2013-Subsektor.

Melengkapi hasil publikasi-publikasi sebelumnya, analisis sub sektor perkebunan ini akan menggambarkan karakteristik usaha sub sektor perkebunan secara khusus, termasuk penggunaan faktor produksi, struktur ongkos, dan kajian mendalam tentang tingkat efisiensi teknis usaha perkebunan. Analisis tingkat efisiensi teknis diperoleh dari rasio efisiensi, yang juga akan menjabarkan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi tersebut. Dengan melihat tingkat efisiensi akan diperoleh informasi mengenai fenomena usaha perkebunan.

Hasil ST2013 sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan arah kebijakan meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan. Keberadaan data hasil ST2013 dan survei - survei pendukungnya

akan menyediakan kebutuhan data untuk pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah.

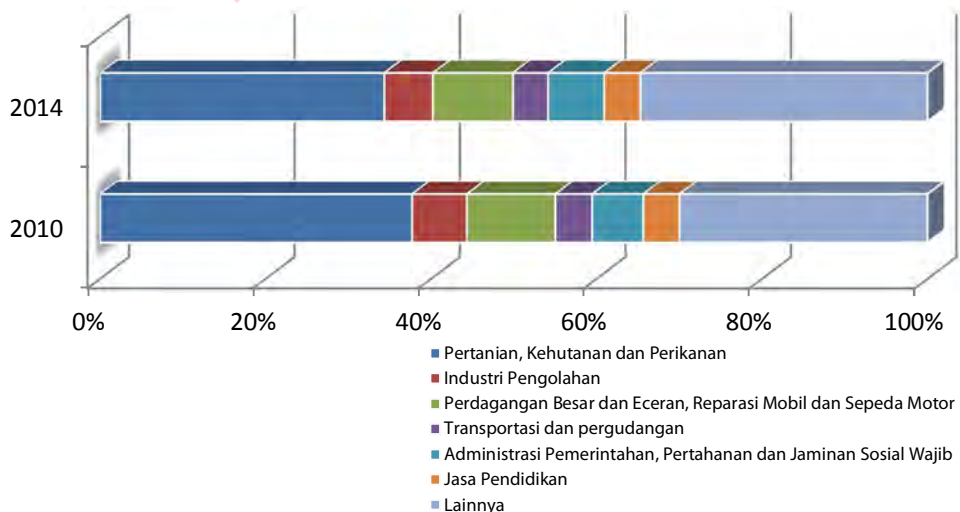
A. Kebun sebagai sumber mata pencarian

Perekonomian Provinsi Sulawesi

Tengah didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.



Gambar 1.1. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat dominan. Kedudukan kategori ini sebagai lapangan usaha yang paling dominan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah masih sulit digeser oleh lapangan usaha lainnya. Terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini dalam PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan lapangan usaha lainnya yang mencapai lebih dari sepertiga bagian. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. PDRB dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2014 mencapai 31,03 triliun rupiah, peranannya dalam PDRB Provinsi

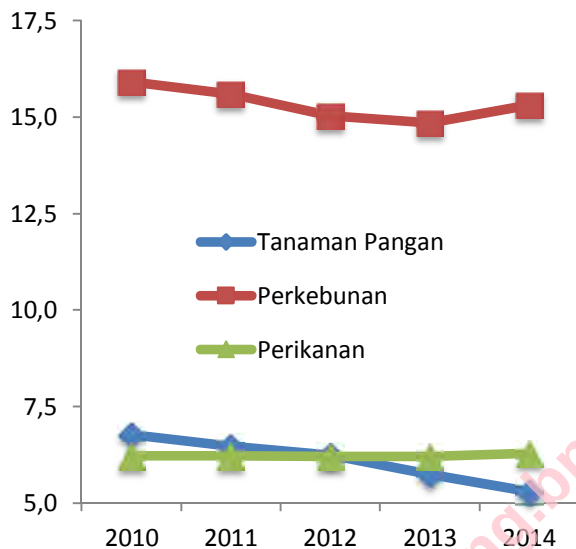


Sulawesi Tengah sebesar 34,38 persen.

Ironisnya, walaupun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulawesi Tengah, namun peranannya cenderung menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah karena separuh dari tenaga kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah berusaha pada lapangan usaha pertanian. Hal ini menandakan lapangan usaha pertanian menguasai hajat hidup orang banyak. Peningkatan produktivitas lapangan usaha pertanian akan meningkatkan kesejahteraan pekerjaannya, yaitu para petani. Yang pada gilirannya akan membantu mengentaskan kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk perdesaan.



Gambar 1.2. Peranan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan terhadap PDRB (persen), 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, beberapa sub kategori memiliki peranan yang besar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini, peranannya terhadap PDRB Sulawesi Tengah menunjukkan kecenderungan yang terus menurun.

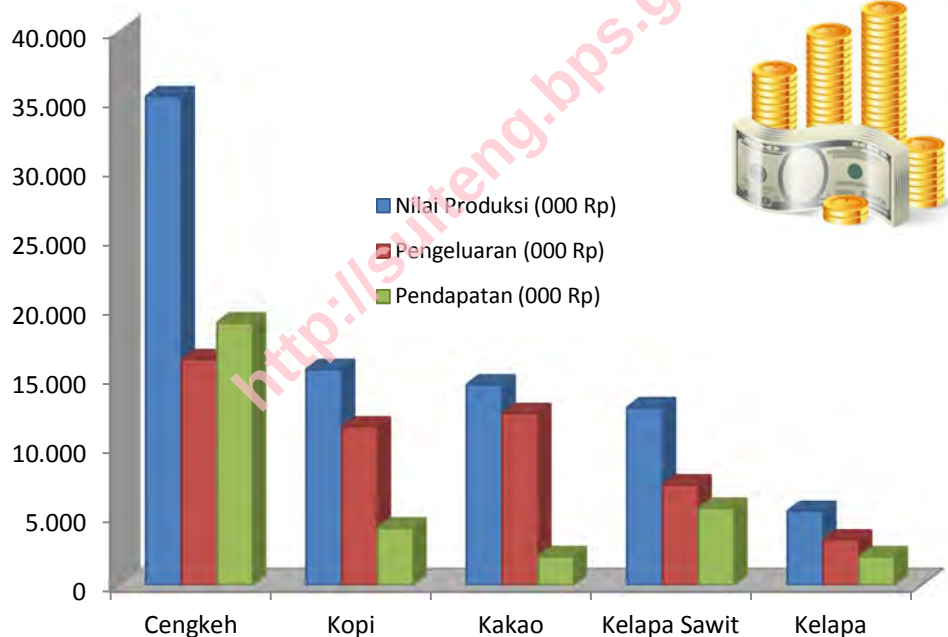
Tanaman perkebunan merupakan salah satu subsektor yang memerlukan

perhatian serius untuk kemajuan pada masa mendatang. Terutama karena keterkaitannya dengan lapangan usaha Industri Pengolahan khususnya industri pengolahan berbasis pertanian seperti industri pengolahan CPO, Kopra, dan sebagainya. Peningkatan produktivitas Subsektor Perkebunan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan.

Komoditas perkebunan yang dominan diusahakan oleh rumah tangga usaha perkebunan (RTUP) di Sulawesi Tengah, terutama dari sisi luas tanamnya, diantaranya adalah Cengkeh, Kopi, Kakao, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Diantara lima komoditas ini, rata-rata pendapatan per hektar dari usaha perkebunan tahunan terbesar adalah dari Cengkeh dan yang terkecil berasal dari komoditas Kelapa. Namun jika melihat keseimbangan antara nilai produksi, pengeluaran dan pendapatan yang diterima, terlihat bahwa komoditas Kopi merupakan yang paling berimbang.

Meskipun demikian, nilai produksi Kopi jika dibandingkan komoditas lain terlihat cukup rendah. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan pada budidaya komoditas ini. Perbaikan teknologi, teknik budidaya, proses pasca panen dan akses pasar diharapkan akan dapat meningkatkan produksi Kopi. Hal-hal diatas, merupakan beberapa faktor yang mendasari difokuskannya analisis pada publikasi ini pada sub sektor perkebunan komoditas Tanaman Kopi.

Gambar 1.3. Rata-rata Pendapatan per Hektar dari Usaha Perkebunan Tahunan



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

B. Perkebunan sebagai Penghasil Devisa

Minyak Bumi, Nikel, CPO, Kayu Olahan dan Biji Kakao merupakan beberapa komoditas ekspor utama dari Sulawesi Tengah. Pada tahun 2014 tercatat ekspor Minyak Bumi mencapai sekitar 51 persen dari keseluruhan ekspor Sulawesi Tengah. Sementara ekspor CPO dan Kayu Olahan mencapai 12 persen dan 5 persen, dan ekspor Biji Kakao mencapai sekitar 2 persen dari total ekspor. CPO dan Biji Kakao adalah beberapa komoditas ekspor yang merupakan produk turunan dari komoditas perkebunan. Hal ini menunjukkan cukup berperannya komoditas perkebunan sebagai sumber penghasil devisa.



Subsektor perkebunan cukup berpotensi dalam optimalisasi ekspor dari Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah dan kondisi lahan yang ada sangat mendukung perluasan lahan perkebunan dan peningkatan produktifitas. Daerah dataran rendah sangat cocok untuk Kelapa, Kelapa Sawit dan Kakao, daerah dataran tinggi sangat cocok untuk Kopi, serta daerah lereng sangat cocok untuk Cengkeh. Kedua dataran ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain CPO, yang merupakan produk turunan dari Kelapa Sawit, Biji Kakao jika diolah dengan baik juga berpotensi untuk menjadi sumber devisa. Sulawesi Tengah termasuk produsen terbesar kakao se-Indonesia (2014). Tak heran jika

Sulawesi Tengah bersama Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan dikenal sebagai provinsi dengan produksi kakao terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, nilai ekspor Kakao Sulawesi Tengah masih sangat rendah. Berdasarkan data ekspor, pada tahun 2014, ekspor kakao hanya mencapai sekitar 1,6 juta USD.

Gambar 1.4. Produksi dan Produktifitas Rata-rata Tanaman Kakao, 2010-2014

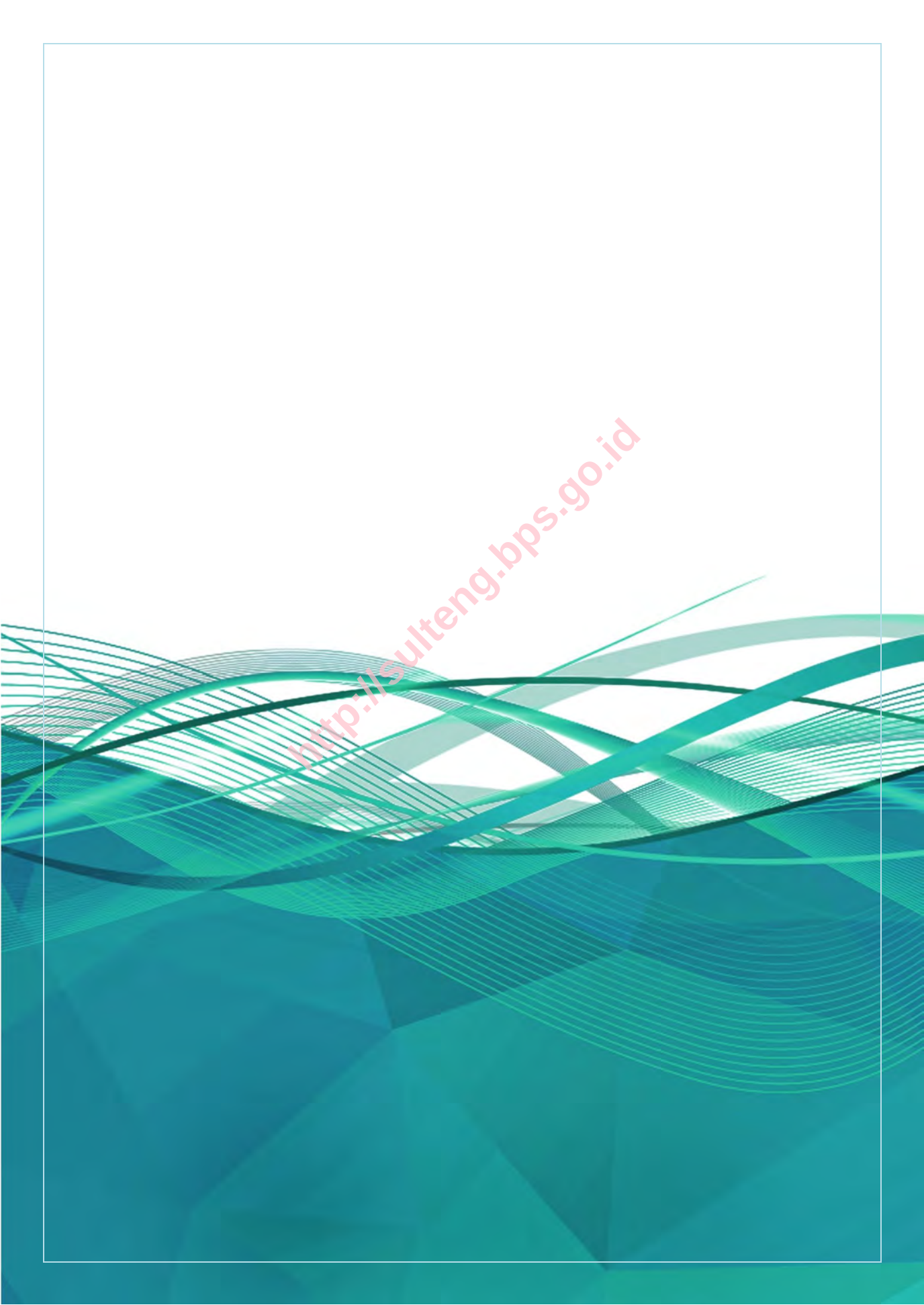


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN SULAWESI TENGAH

<http://sulteng.bps.go.id>

2



<http://sulteng.bps.go.id>

BAB. 2

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN SULAWESI TENGAH

A. Karakteristik Umum Rumah Tangga Usaha Perkebunan Sulawesi Tengah

Perkebunan merupakan salah satu lapangan usaha yang banyak diusahakan oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah. Data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha perkebunan (RTUP) di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai



322.130 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan total rumah tangga pada tahun 2013 yang tercatat sebanyak 652.951 rumah tangga, terlihat bahwa hampir setengah rumah tangga yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumah tangga usaha perkebunan.

Diantara subsektor pertanian lainnya, perkebunan juga merupakan usaha pertanian yang paling banyak diminati di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga usaha perkebunan yang mencatatkan jumlah rumah tangga usaha terbanyak diantara subsektor-subsektor pertanian lainnya. Jika dibandingkan dengan rumah tangga pertanian secara umum, jumlah rumah tangga usaha perkebunan mencapai 80,15 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, rumah tangga pertanian di Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah tangga usaha perkebunan bertambah sebesar 6,70 persen jika dibandingkan dengan data hasil Sensus Pertanian tahun 2003.

Tabel 2.1 Karakteristik Umum Rumah Tangga Usaha Perkebunan di Sulawesi Tengah

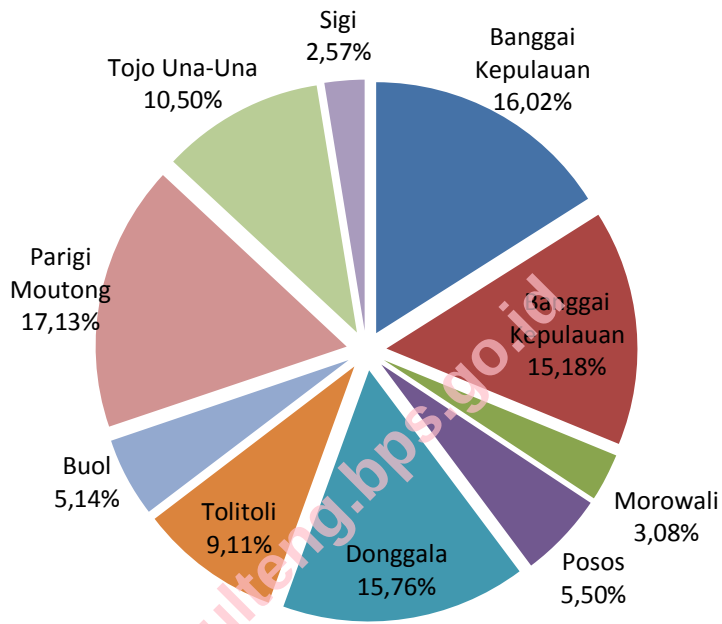
No	Subsektor	Satuan	2003	2013	Ket
1	Jumlah RT Usaha Perkebunan	RT	301 911	322 130	ST2013-L
2	Persentase RT Usaha Perkebunan terhadap jumlah RT Pertanian Sulawesi Tengah	%	76,12	80,15	ST2013-L
3	Jumlah anggota RT yang mengelola usaha perkebunan				ST2013-L
	▪ Laki-laki	%	na	90,95	
	▪ Perempuan	%	na	9,05	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil Sensus Pertanian 2013 juga mengungkapkan bahwa usaha perkebunan ini lebih banyak dikelola oleh laki-laki daripada perempuan. Tercatat bahwa 90,95 persen anggota rumah tangga yang mengelola usaha perkebunan adalah laki-laki.

Rumah tangga usaha perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di setiap kabupaten dan bahkan di wilayah Kota Palu. Meskipun demikian, terlihat bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Donggala dan Banggai merupakan daerah dengan rumah tangga usaha perkebunan dengan konsentrasi terbanyak. Jumlah rumah tangga usaha perkebunan di keempat wilayah ini mencapai 64 persen dari total keseluruhan rumah tangga perkebunan se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.1 Rumah Tangga Perkebunan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rumah tangga perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kakao, Kelapa, dan Cengkeh merupakan tiga komoditas tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha perkebunan di Sulawesi Tengah. Tercatat sebanyak 205.240 rumah tangga perkebunan di Sulawesi Tengah mengusahakan tanaman Kakao, sementara sebanyak 158.617 rumah tangga mengusahakan tanaman Kelapa dan sebanyak 109.120 rumah tangga mengusahakan tanaman Cengkeh.

Kakao juga merupakan usaha perkebunan yang memiliki luas tanaman/luas tanam terluas diantara jenis tanaman perkebunan lainnya, dengan luas mencapai 208,7 ribu hektar. Jenis tanaman perkebunan lain yang luas tanaman/luas tanamnya lebih dari seratus ribu hektar yaitu tanaman

Kelapa. Sementara Kakao merupakan usaha perkebunan dengan luas tanaman/luas tanam terbesar keempat di Sulawesi Tengah, meskipun luas tanaman/luas tanamnya jauh dibawah luas tanaman/luas tanam Kopi, Karet dan Kelapa Sawit.

Sementara itu, secara umum juga dapat dilihat bahwa rata-rata luas tanaman/luas tanam per rumah tangga masih berada dibawah dua hektar, kecuali Kelapa Sawit. Hal ini menandakan bahwa secara rata-rata luas lahan yang diusahakan per rumah tangga belum begitu besar. Data hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa Kelapa Sawit merupakan jenis tanaman dengan rata-rata luas tanaman/luas tanam per rumah tangga terbesar, diikuti oleh tanaman Kakao dan Kelapa.

Tabel 2.2. Jenis Tanaman, Jumlah RTUP, Luas Tanam/Luas Tanaman dan Rata-rata Luas Tanaman/Luas Tanam per Rumah Tangga pada Usaha Perkebunan Terpilih, 2013

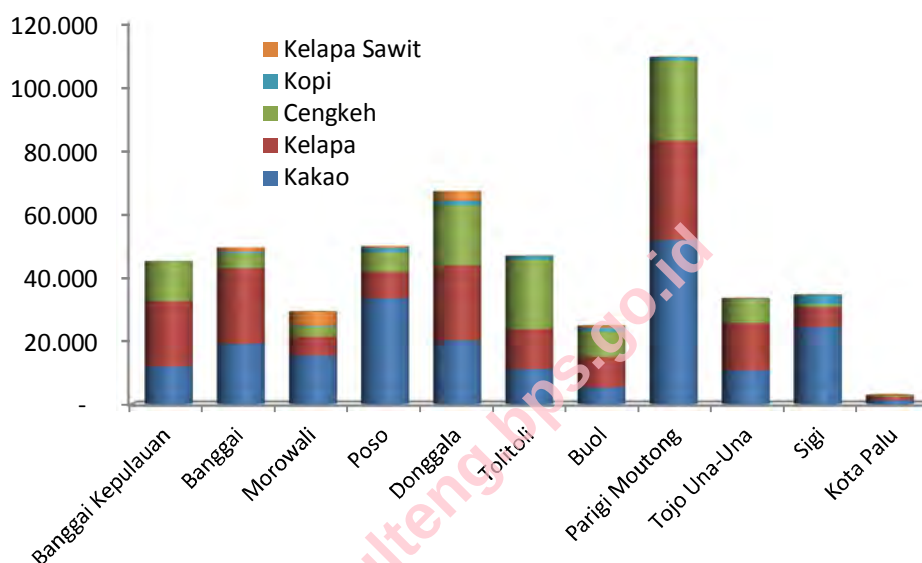
No	Jenis Tanaman	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanaman/ Luas Tanam (Ha)	Rata-rata Luas Tanaman/Luas Tanam per Rumah Tangga (Ha)
1	Kakao	205 240	208 703	1,02
2	Kelapa	158 617	140 596	0,89
3	Cengkeh	109 120	73 806	0,68
4	Kopi	10 805	4 725	0,44
5	Kelapa Sawit	10 218	22 136	2,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dilihat dari persebarannya, Kabupaten Morowali dan Donggala merupakan daerah dengan jumlah rumah tangga perkebunan Kelapa Sawit yang paling dominan. Sementara Kopi paling banyak diusahakan oleh rumah tangga di Kabupaten Sigi. Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah

dengan jumlah rumah tangga usaha perkebunan Kakao, Cengkeh dan Kelapa terbanyak diantara wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.2. Jumlah RT usaha Perkebunan menurut Kabupaten/Kota untuk beberapa Komoditas Terpilih, 2013



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Luas tanaman perkebunan menurut wilayah juga dapat memberikan gambaran mengenai persebaran potensi tanaman perkebunan. Sejalan dengan pola persebaran rumah tangga usaha perkebunannya, data hasil ST2013 juga menunjukkan bahwa Parigi Moutong, Banggai, Poso dan Donggala merupakan daerah konsentrasi perkebunan yang tinggi jika dilihat dari luas tanamnya.

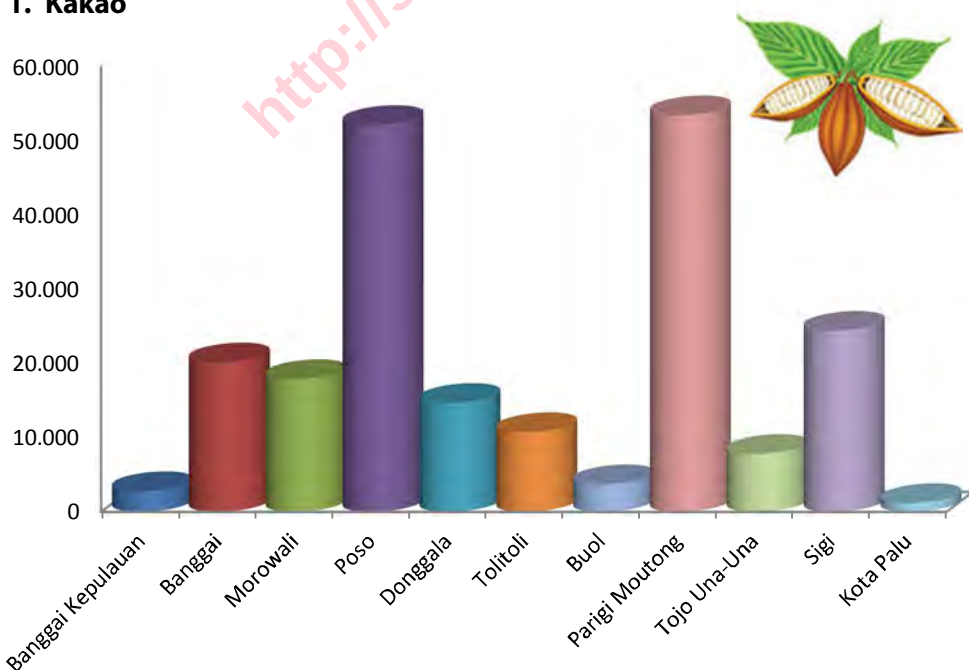
Morowali merupakan daerah dengan luas tanam Kelapa Sawit yang diusahakan oleh RTUP terluas di Provinsi Sulawesi Tengah. Luas tanaman Kelapa Sawit pada daerah ini mencapai 10,62 ribu hektar, atau hampir setengah luas tanam Kelapa Sawit yang diusahakan RTUP di Sulawesi Tengah berada didaerah ini. Luas tanaman Cengkeh yang diusahakan oleh RTUP pada daerah Tolitoli mencapai 20,7 ribu hektar, atau lebih dari seperempat dari total luas tanaman Cengkeh di Sulawesi Tengah berada di kabupaten ini.

Sementara itu, daerah Parigi Moutong dan Poso merupakan dua kabupaten yang merupakan sentra perkebunan Kakao yang diusahakan oleh rumah tangga. Dilihat dari luas tanamnya, dua kabupaten memiliki luas tanam masing-masing seluas 53,39 ribu hektar dan 52,08 ribu hektar. Luas tanaman/luas tanam Kakao yang diusahakan RTUP pada kedua daerah ini mencapai lebih dari setengah dari total luas tanaman Kakao yang diusahakan oleh RTUP di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

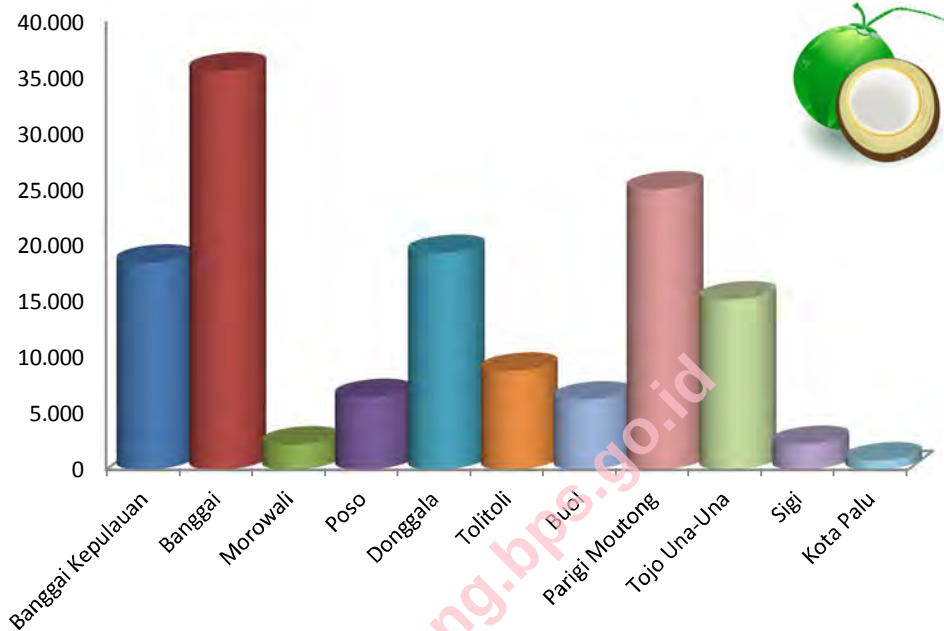
Sedangkan sentra perkebunan Kopi yang diusahakan oleh rumah tangga terluas berada di Kabupaten Sigi. Luas tanaman Kopi di daerah ini tercatat seluas 1,45 ribu hektar atau hampir sepertiga dari total luas tanaman Kopi di seluruh Sulawesi Tengah. Sementara itu, dilihat dari luas tanamnya, tanaman Kelapa yang diusahakan oleh RTUP paling banyak ditanam di daerah Banggai. Luas tanaman Kelapa di daerah ini tercatat seluas 35,65 ribu hektar.

Gambar 2.3 Luas tanam tanaman perkebunan tahunan (Ha) yang diusahakan RTUP menurut kabupaten/kota dan jenis tanaman, ST2013

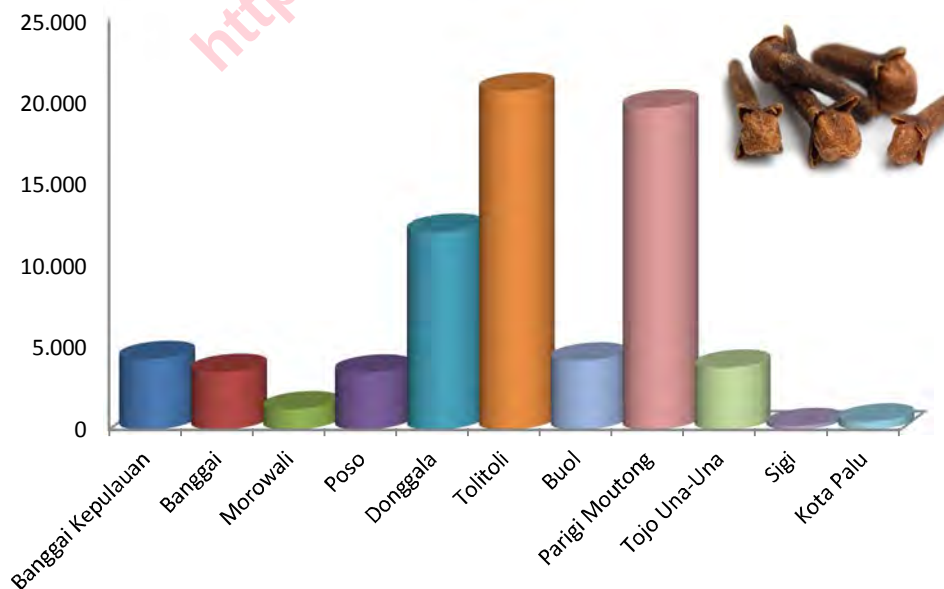
1. Kakao



2. Kelapa



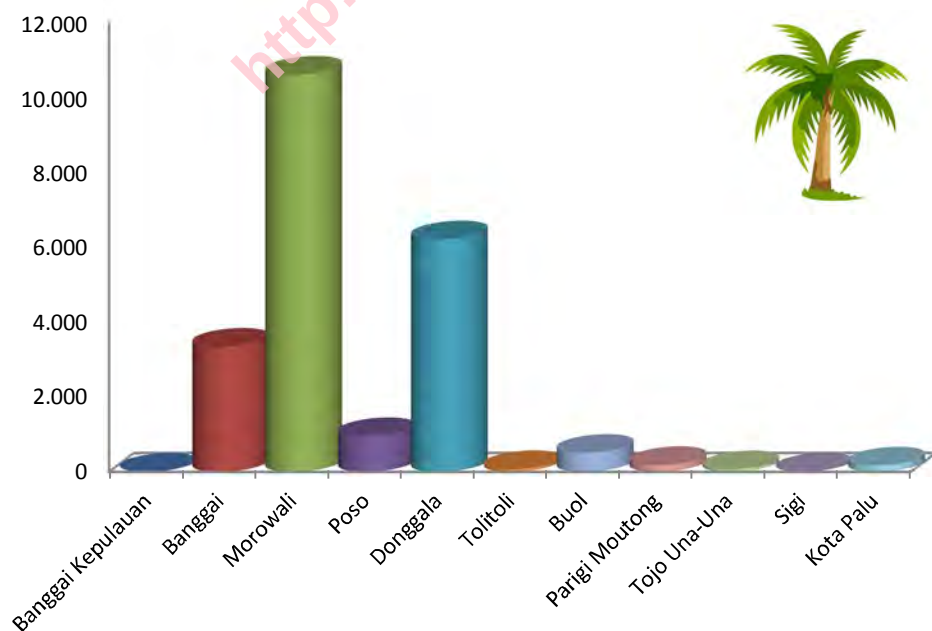
3. Cengkeh



4. Kopi



5. Kelapa Sawit

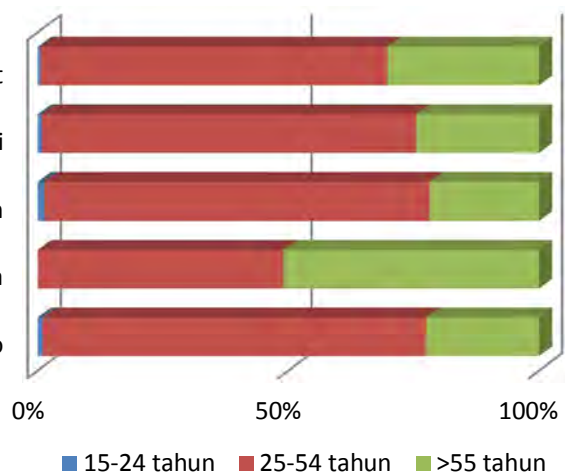


B. Karakteristik Umum Pekebun Usaha Perkebunan Kakao Kelapa, Cengkeh, Kopi dan Kelapa Sawit

Kakao, Kelapa, Cengkeh, Kopi dan Kelapa Sawit merupakan lima tanaman perkebunan yang jika dilihat dari segi luas tanaman/luas tanamnya mendominasi usaha perkebunan di Sulawesi Tengah dan semuanya juga merupakan komoditas unggulan nasional. Komoditas yang dicakup dalam Subsektor ST2013 merupakan komoditas pertanian strategis yang ditentukan oleh kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan) dan Badan Pusat Statistik. Dari komoditas strategis yang telah ditetapkan, rumah tangga usaha pertanian yang dicakup dalam ST2013 subsektor ditentukan dengan Batas Minimal Usaha (BMU).

Gambar 2.4.

Persentase Pekebun dengan Nilai Produksi Terbesar pada Suatu RTUP menurut Usaha Perkebunan Terpilih dan Kelompok Umur, di Sulawesi Tengah 2014



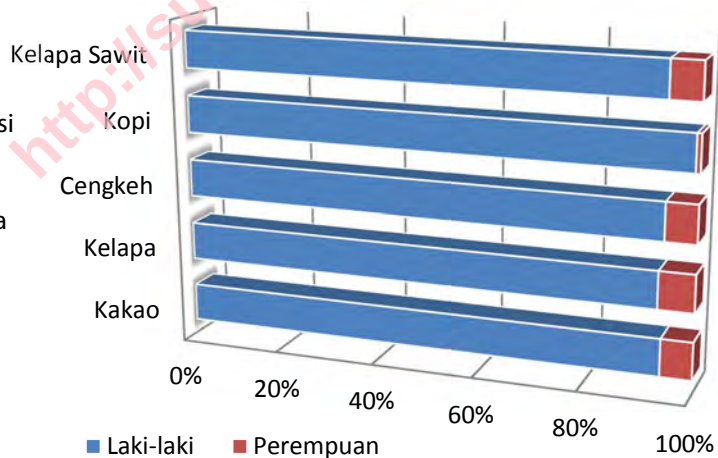
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dilihat dari karakteristik demografi dari pekebun utama atau pekebun dengan nilai produksi terbesar dalam suatu RTUP, usaha perkebunan kelima tanaman perkebunan ini lebih didominasi oleh pekebun yang berumur 25 hingga 54 tahun. Sementara itu juga terlihat bahwa pekebun utama dari

rumah tangga usaha perkebunan yang berusia diatas 55 tahun keatas juga cukup signifikan jumlahnya. Secara rata-rata terdapat sekitar 1 dari 5 orang pekebun berusia diatas 55 tahun.

Mayoritas pekebun utama dengan nilai produksi terbesar pada suatu RTUP adalah laki-laki. Sementara jumlah perempuan yang merupakan pekebun utama dengan nilai produksi terbesar pada suatu RTUP sangat sedikit. Usaha perkebunan Kelapa merupakan usaha perkebunan dengan jumlah pekebun utama perempuan terbanyak diantara kelima usaha perkebunan lainnya. Meskipun demikian, persentase jumlahnya hanya sekitar 7 persen jika dibandingkan dengan pekebun utama laki-laki. Kopi merupakan usaha perkebunan yang mayoritas pekebun utamanya adalah laki-laki. Tercatat hanya sebanyak 0,85 persen pekebun utama pada komoditi ini yang merupakan perempuan.

Gambar 2.5.
Persentase Pekebun
dengan Nilai Produksi
Terbesar pada suatu
RTUP menurut Usaha
Perkebunan Terpilih
dan Jenis Kelamin,
di Sulawesi Tengah
2014

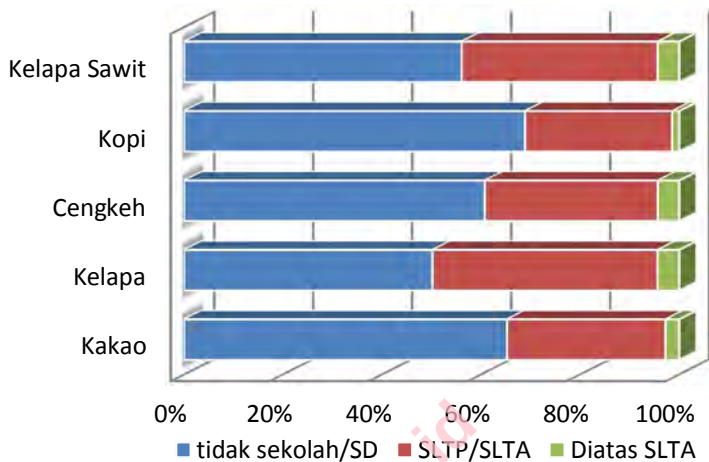


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Rendahnya tingkat pendidikan pekebun masih menjadi suatu fenomena yang membayangi usaha perkebunan di Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari pendidikan pekebun utama pada kelima usaha perkebunan ini yang masih tergolong rendah.

Gambar 2.6.

Persentase Pekebun
dengan Nilai
Produksi Terbesar
pada suatu RTUP
menurut Usaha
Perkebunan Terpilih
dan Pendidikan,
di Sulawesi Tengah
2014

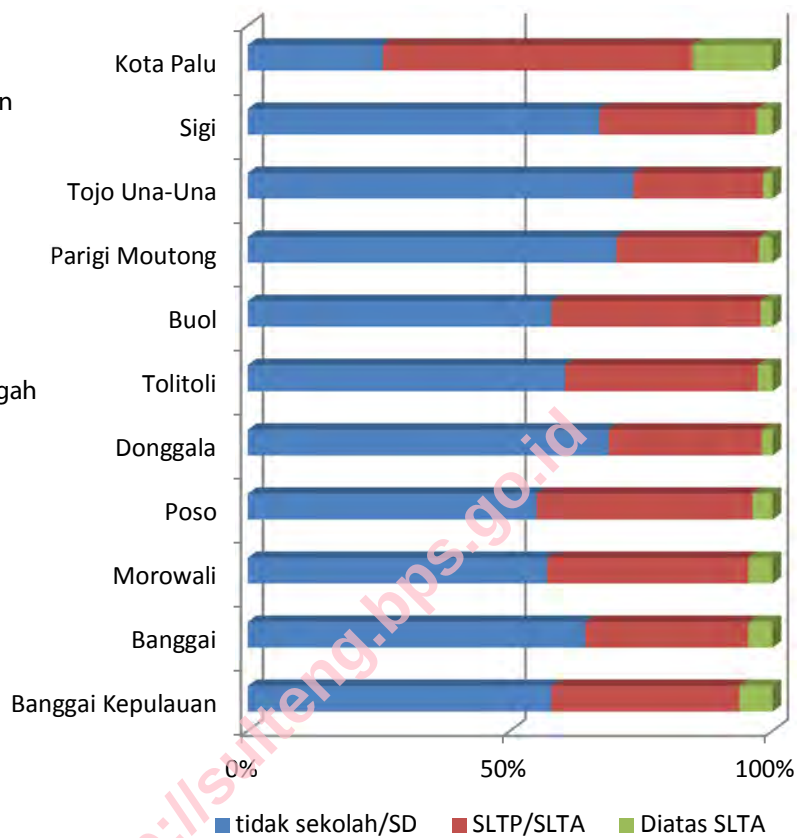


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lebih dari setengah pekebun utama pada usaha Kakao, Kelapa, Cengkeh, Kopi dan Kelapa Sawit hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Sementara persentase pekebun utama yang memiliki pendidikan diatas SLTA hanya mencapai 3,32 persen. Khusus pada usaha perkebunan Kelapa, tercatat jumlah pekebun utama yang tidak bersekolah atau bersekolah hingga jenjang SD dan pekebun utama yang berpendidikan diatas SD hampir berimbang. Sedangkan pekebun utama yang mengenyam pendidikan diatas SLTA mencapai 4,34 persen.

Sementara itu, jika dilihat lebih rinci dari wilayahnya, pekebun dengan nilai produksi terbesar pada suatu RTUP yang memiliki pendidikan hanya sebatas sekolah dasar paling banyak berada di Kabupaten Tojo Una-Una dan Parigi Moutong. Sementara pekebun utama dengan pendidikan yang cukup tinggi (didas SLTA) paling banyak berada di Kota Palu.

Gambar 2.7.
 Persentase
 Pekebun dengan
 Nilai Produksi
 Terbesar pada
 suatu RTUP
 menurut
 Pendidikan,
 di Sulawesi Tengah
 2014

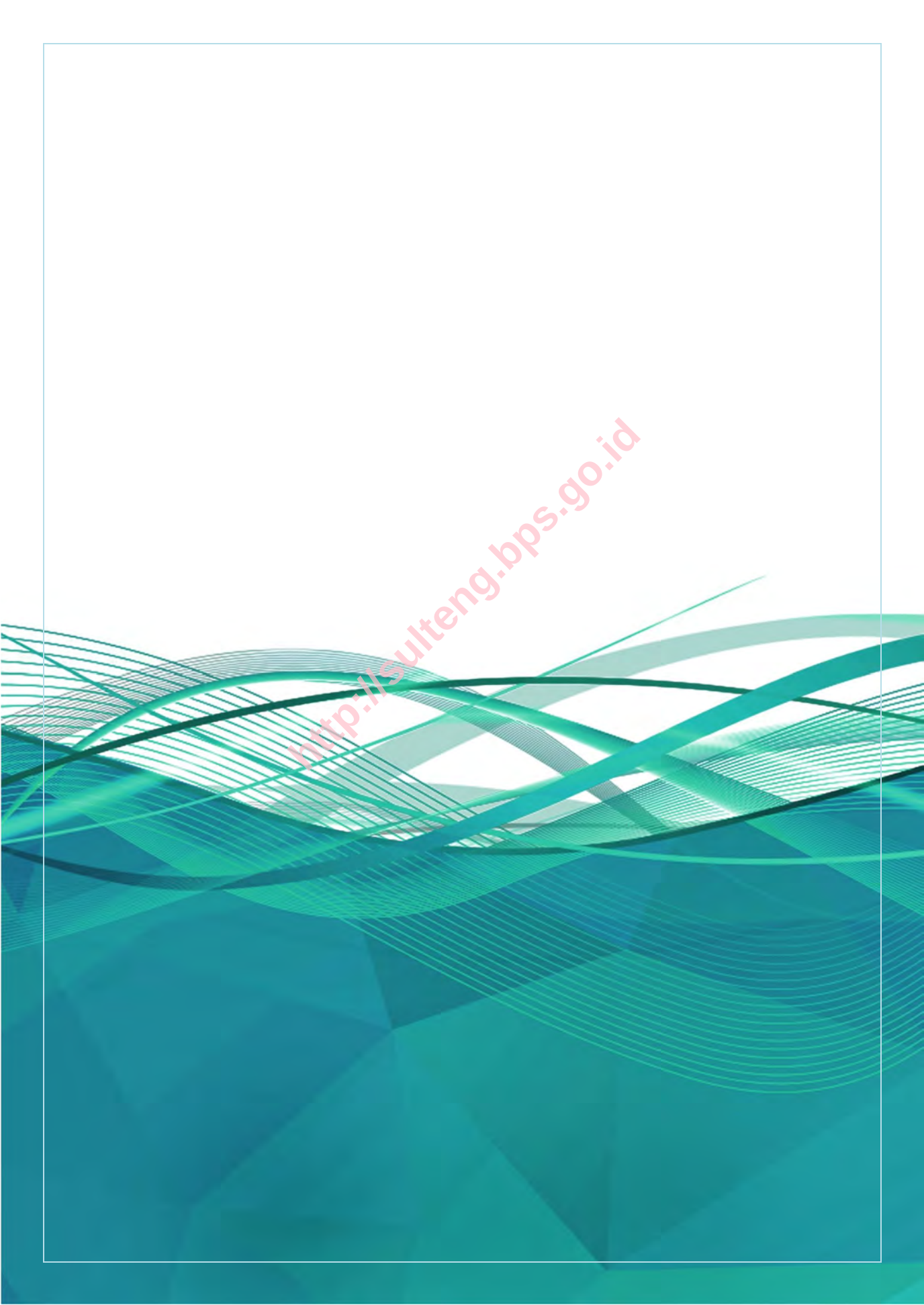


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

**GAMBARAN USAHA PERKEBUNAN
CENGKEH, KAKAO, KELAPA, KELAPA SAWIT,
DAN KOPI DI SULAWESI TENGAH**

<http://sulteng.bps.go.id>

3



BAB. 3

GAMBARAN USAHA PERKEBUNAN CENGKEH, KAKAO, KELAPA, KELAPA SAWIT, DAN KOPI DI SULAWESI TENGAH



Gambar 3.1. Buah Kopi yang siap dipanen (kiri) dan Perkebunan Kelapa Sawit (kanan)

Produk perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat potensial karena didukung oleh topografi, curah hujan serta suhu udara, baik di wilayah kabupaten/kota yang memiliki dataran yang tinggi maupun di dataran rendah. Komoditas perkebunan yang dominan diusahakan di Sulawesi Tengah diantaranya adalah Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi.

Kakao dan Kelapa merupakan dua komoditas perkebunan tahunan yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha perkebunan (RTUP) di Sulawesi Tengah. Sementara itu, dilihat dari luas tanamnya, Kakao, Kelapa, Cengkeh, Kelapa Sawit, dan Kopi merupakan lima komoditas perkebunan yang memiliki luas tanam relatif tinggi di Sulawesi Tengah.

Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan tahun 2014 menghasilkan beberapa data seperti metode pembukaan lahan, pengolahan lahan, pola tanam, penggunaan bibit dan struktur ongkos masing-masing komoditi perkebunan. Beberapa karakteristik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai beberapa komoditas perkebunan di Sulawesi Tengah. Komoditas perkebunan yang akan dibahas, dititikberatkan pada lima tanaman perkebunan yang merupakan komoditas perkebunan dengan luas tanam terbesar di Sulawesi Tengah, yaitu Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi.



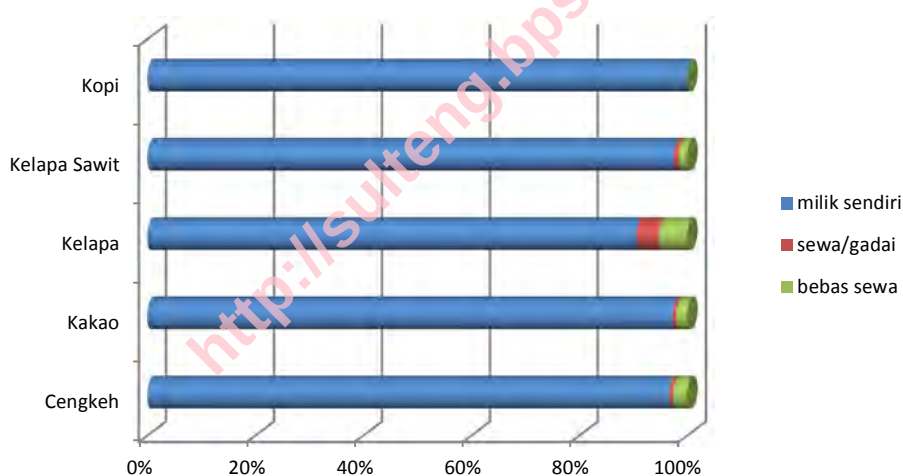
Gambar 3.2. Tanaman kakao yang sedang berbuah

A. Gambaran Usaha Perkebunan Cengkeh, Kakao , Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah

Lahan merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Dalam hal ini, status penguasaan lahan juga bisa memiliki keterkaitan erat dengan besaran pendapatan yang diterima oleh RTUP. Penggunaan lahan perkebunan yang berstatus sewa misalnya, tentunya akan menambah ongkos/pengeluaran usaha perkebunan tersebut, karena adanya besaran biaya sewa lahan yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan tahun 2014, diketahui bahwa sebagian besar RTUP komoditas Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah memiliki sendiri lahan yang diusahakannya. Pada kelima komoditas ini, lebih dari 90 persen status lahan yang digunakan merupakan milik sendiri. Meskipun status lahan pada RTUP Kelapa lebih didominasi oleh lahan milik sendiri, namun persentase status lahan yang berupa lahan sewa/gadai masih diatas empat persen, atau merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan komoditas lain.

Gambar 3.3. Persentase banyaknya RTUP terpilih menurut status lahan yang digunakan, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Good Agricultural Practices (GAP) atau prinsip-prinsip pengelolaan pertanian yang baik dan benar mulai diregulasikan dan diterapkan di Indonesia. Kementerian Pertanian sendiri telah merilis beberapa pedoman budidaya (GAP) untuk pengelolaan tanaman perkebunan seperti kopi dan kakao. Penerapan GAP ini terutama ditujukan, tidak hanya agar dapat memaksimalkan produktivitas lahan tapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak pekerja pertanian.

Termasuk dalam standar pengelolaan lahan yang baik adalah metode pembukaan lahan atau *land clearing*. Salah satu isu hangat pada masalah pembukaan lahan adalah metode pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan. Pembakaran lahan merupakan metode pembukaan lahan



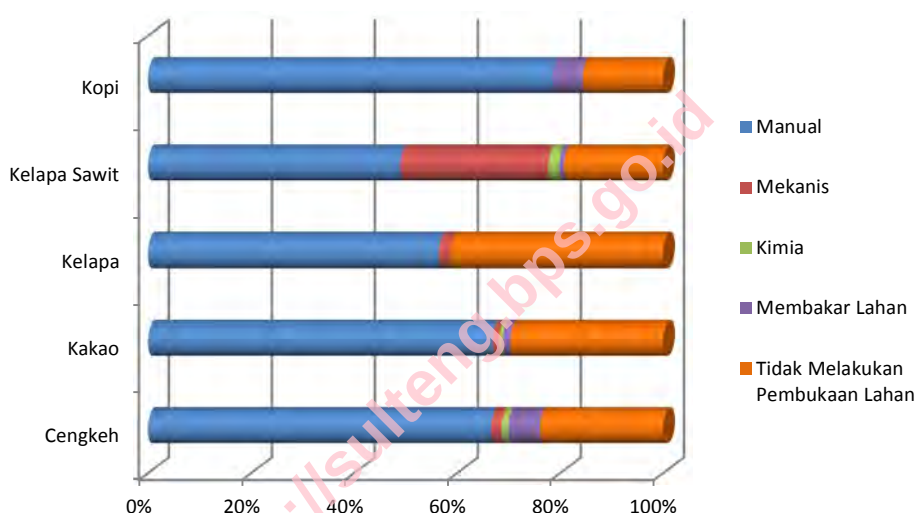
yang mudah dan murah tetapi memiliki banyak mengandung resiko. Secara umum pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan ini tidak dianjurkan karena memiliki berbagai resiko seperti kebakaran lahan yang dapat meluas. Meskipun demikian, didalam penjelasan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, pembukaan lahan dengan cara dibakar ternyata masih dimungkinkan di Indonesia. Namun demikian, pembukaan lahan dengan cara ini harus memenuhi beberapa persyaratan misalnya hanya ditujukan untuk lahan yang akan ditanami varietas lokal dan lahan yang dibuka tidak lebih dari dua hektar serta dikelilingi oleh sekat bakar agar tidak terjadi penjarangan api diluar area tersebut.

Hasil Survei RTUP 2014 menunjukkan bahwa cara pembukaan lahan oleh RTUP perkebunan Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah pada umumnya dilakukan dengan cara manual yakni menggunakan tenaga manusia dan peralatan potong sederhana. Tercatat RTUP Cengkeh, Kopi dan Kakao terbanyak membuka lahan dengan cara manual masing-masing diatas 60 persen.

Namun demikian ternyata masih ditemukan RTUP yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Terlihat bahwa lebih dari 6 persen RTUP Cengkeh yang masih membakar lahan. Sementara itu pada perkebunan Kakao dan Kopi masing-masing 1,53 persen dan 5,79 persen RTUP

yang masih membuka lahan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan secara mekanis di Sulawesi Tengah terbesar dilakukan oleh RTUP Kelapa sawit dengan persentase 28,79 persen, selebihnya masing-masing komoditi kurang dari 3 persen. Hal ini mengindikasikan masih dominannnya pemakaian tenaga kerja dalam pengolahan lahan dibanding pemakaian mesin pertanian.

Gambar 3.4. Persentase banyaknya RTUP menurut cara pembukaan lahan, 2014



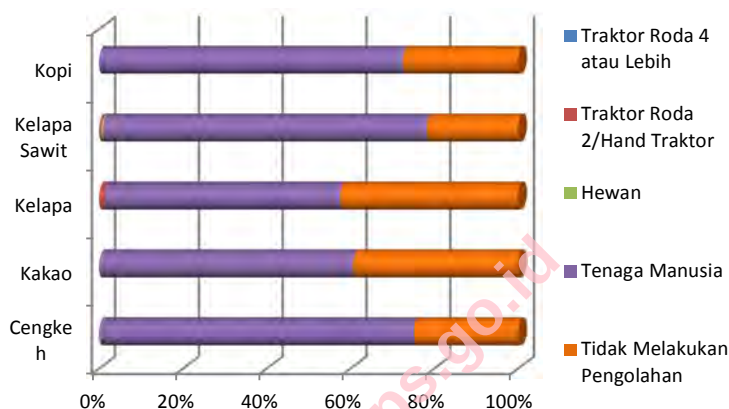
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingginya pemakaian tenaga kerja pada usaha perkebunan di Sulawesi Tengah juga terlihat dari masih dominannya penggunaan tenaga manusia dalam pengolahan lahan pertaniannya. Tercatat lebih dari 66 persen RTUP Cengkeh, Kakao, dan Kopi yang melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan tenaga manusia. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi pada tanaman Kelapa, dimana 41 persen RTUP tidak melakukan pengolahan lahan pada lahan perkebunan miliknya.

Karakteristik lain yang terdapat pada usaha perkebunan rumah tangga di Sulawesi Tengah adalah masih dominannya pemakaian benih tidak bersertifikat. Terdapat lebih dari 90 persen RTUP Kopi dan Karet yang belum menggunakan benih bersertifikat sebagai benih utama pada usaha

perkebunan mereka. sementara itu penggunaan benih bersertifikat sebagai benih utama oleh RTUP Kakao dan Kelapa sawit hanya mencapai sekitar 22 dan 35 persen.

Gambar 3.5.
Persentase
banyaknya
RTUP menurut
alat/sarana
pengolahan
lahan, 2014



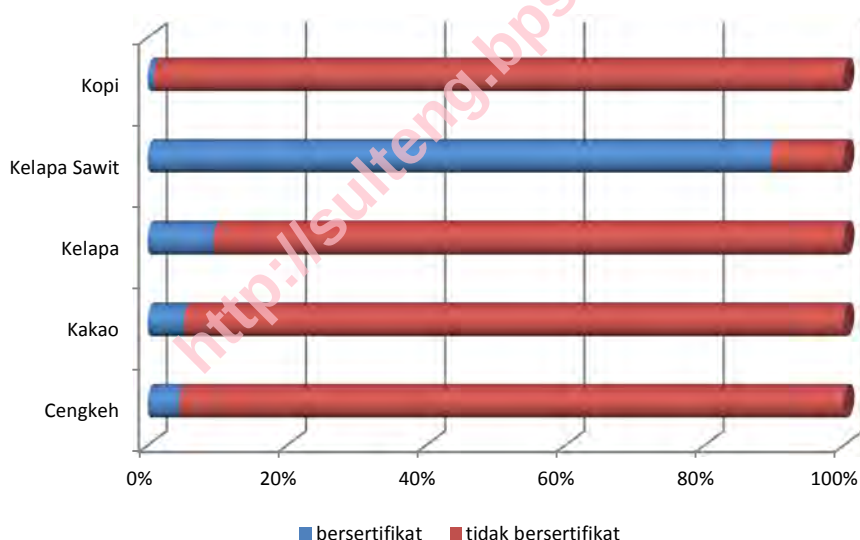
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Benih bersertifikat merupakan benih tanaman yang memiliki keunggulan dan telah memenuhi standar mutu benih berdasarkan ketentuan yang berlaku (Imron, 2014). Penggunaan benih bersertifikat diharapkan dapat menjamin kualitas tanaman sehingga dapat memberikan produktivitas yang tinggi dan bermutu. Pada tanaman perkebunan tahunan, penggunaan benih yang berkualitas merupakan salah satu hal yang sangat penting, mengingat umur tanaman dan waktu tunggu hingga tanaman berproduksi yang cukup panjang (ibid).

Selain itu, penggunaan benih bersertifikasi juga merupakan salah satu persyaratan beberapa skema sertifikasi untuk pemasaran produk hasil perkebunan, seperti skema sertifikasi minyak sawit RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan juga ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), sehingga produk yang tidak memakai benih tersertifikasi dapat mengalami kendala

pemasaran produk¹, terutama di perusahaan-perusahaan yang hanya menerima produk hasil pertanian yang memiliki sertifikasi tersebut. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah, terutama strategi terbaik untuk menggalakan pemakaian benih bersertifikat. Brandi et al. (2013) mengungkapkan beberapa kendala dalam pemakaian benih bersertifikat pada perkebunan sawit rakyat di Indonesia diantaranya adalah sulitnya akses dan kurangnya informasi mengenai bagaimana cara mengakses benih bersertifikasi serta mahalnya biaya awal pada pemakaian benih bersertifikasi.

Gambar 3.6. Persentase banyaknya RTUP menurut varietas benih utama yang digunakan, 2014



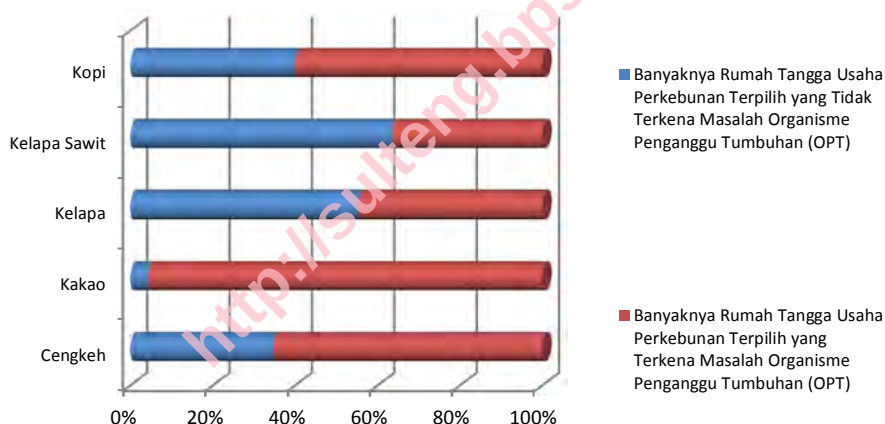
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil Survei RTUP 2014 juga mengungkapkan suatu fakta menarik dari kondisi usaha tanaman perkebunan rumah tangga di Sulawesi Tengah. Dari lima komoditas terpilih, Kelapa Sawit dan Kelapa merupakan tanaman perkebunan yang relatif jarang mengalami serangan organisme pengganggu

¹ Meskipun demikian, terdapat perlakuan tertentu bagi perkebunan rakyat pada aplikasi sertifikasi ini. RSPO misalnya, memberikan *grace period* atau waktu tunggu pemakaian benih bersertifikasi hingga waktu tertentu (Brandi et al., 2013)

tumbuhan (OPT). OPT merupakan semua organisme baik berupa tanaman/gulma maupun hewan/hama yang dapat mengakibatkan gangguan ataupun kerugian ekonomi pada tanaman perkebunan yang diusahakan (BPS, 2014). Tercatat lebih dari 55 persen RTUP Kelapa dan Kelapa Sawit yang mengungkapkan bahwa selama setahun yang lalu, usaha perkebunan mereka tidak terkena masalah OPT, sedangkan RTUP Kakao yang menyatakan bahwa selama setahun yang lalu mengalami serangan OPT pada usaha perkebunan mereka mencapai lebih dari 95 persen.

Gambar 3.7. Persentase banyaknya RTUP menurut ada atau tidaknya serangan OPT , 2014



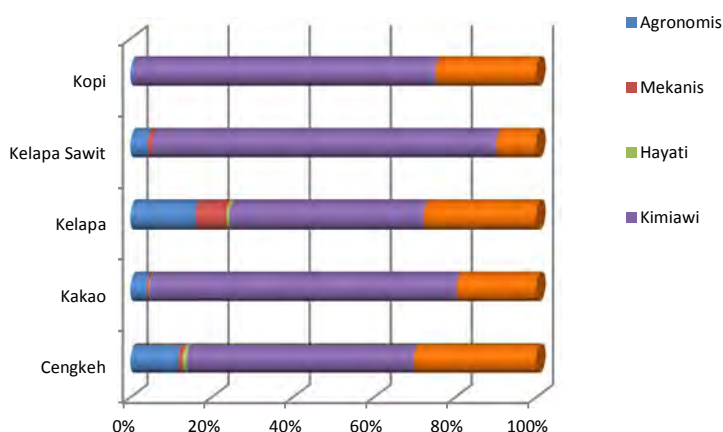
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Terdapat beberapa cara pengendalian OPT yang lazim dilakukan oleh RTUP perkebunan di Sulawesi Tengah. Metode kimiawi, seperti penggunaan pestisida merupakan cara pengendalian OPT yang lazim dilakukan oleh RTUP pada semua komoditas perkebunan terutama Kelapa Sawit (84 persen). Namun demikian, terlihat bahwa pada usaha perkebunan Kelapa, pengendalian OPT dengan metode yang lebih ramah lingkungan, yaitu

dengan metode agronomis, mekanis dan hayati, memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu diatas 24 persen.

Pengendalian OPT dengan metode agronomis mencakup tindakan budidaya yang dapat mengatasi atau mencegah perkembangan atau serangan OPT, termasuk diantara pengendalian agronomis yaitu penanaman varietas yang tahan OPT maupun pengaturan pola tanam dan pengolahan tanah (BPS, 2014). Sedangkan pengendalian OPT dengan cara mekanis mencakup metode pengendalian OPT dengan pemanfaatan sarana dan peralatan mekanis, seperti penggunaan perangkat tikus pada pengendalian hama tikus (ibid). Metode pengendalian OPT lain yang saat ini banyak dianjurkan, yaitu pengendalian hayati. Metode ini menggunakan predator alami OPT untuk mengendalikan serangan OPT, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem, salah satu contohnya adalah penggunaan burung pemangsa tikus untuk mengendalikan hama tikus (ibid). Diantara pengendalian OPT non kimiawi lainnya, pengendalian hayati masih jarang dilakukan oleh RTUP pada perkebunan terpilih di Sulawesi Tengah.

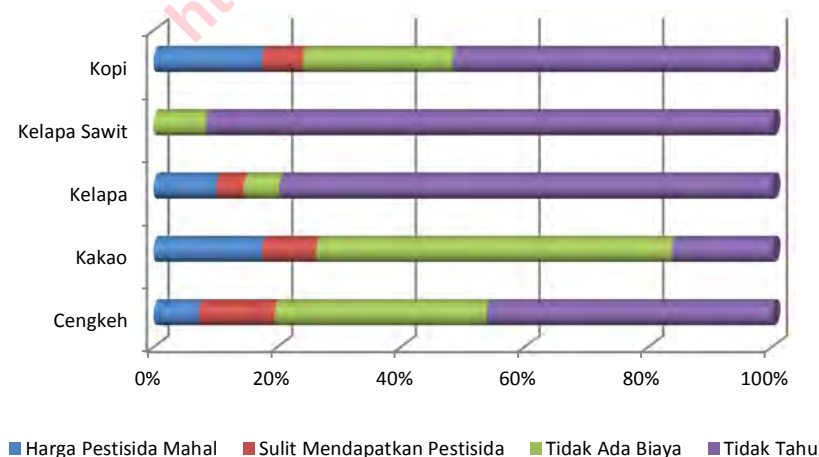
Gambar 3.8. Persentase banyaknya RTUP menurut cara pengendalian utama terhadap serangan OPT , 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenaah

Dari gambar 3.8 juga terlihat bahwa pada tahun 2014, cukup banyak RTUP yang tidak melakukan pengendalian OPT meskipun terjadi serangan. Persentase RTUP yang tidak melakukan pengendalian ketika terjadi serangan OPT pada usaha perkebunan kelapa mencapai 28 persen, sedangkan pada usaha perkebunan Cengkeh mencapai lebih dari 30 persen. Alasan yang dominan diungkapkan oleh RTUP yang tidak melakukan pengendalian OPT adalah ketidaktahuan petani terhadap metode pengendalian OPT. Dari 9,79 persen petani kelapa sawit yang tidak melakukan pengendalian terhadap serangan OPT, lebih dari 91 persen diantaranya beralasan karena tidak memiliki pengetahuan. Selain itu cukup banyak juga RTUP yang tidak memiliki cukup biaya untuk mengendalikan serangan OPT pada usaha perkebunanya tersebut. Pada usaha perkebunan kakao, 58 persen petani yang tidak melakukan pengendalian serangan OPT beralasan karena tidak adanya biaya.

Gambar 3.9. Persentase banyaknya RTUP menurut alasan utama tidak melakukan pengendalian terhadap serangan OPT, 2014

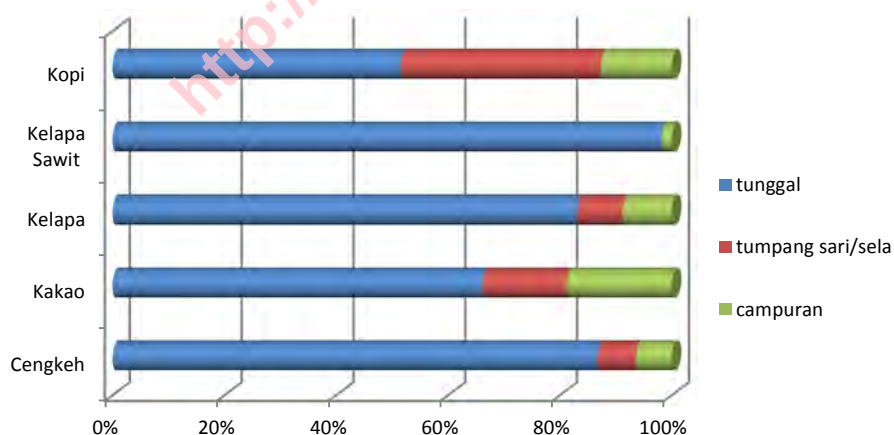


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sistem penanaman tunggal merupakan sistem penanaman yang umum dilakukan oleh RTUP perkebunan Cengkeh, Kakao, kelapa, Kelapa, dan Kopi di Sulawesi Tengah. Kelapa Sawit merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditanam dengan sistem penanaman tunggal. Sistem penanaman tunggal merupakan pola tanam yang hanya menanam satu jenis tanaman pada satu bidang lahan dalam satu periode tanam tertentu (BPS, 2014).

Selain ditanam dengan sistem penanaman tunggal, sistem penanaman tumpang sari/sela dan campuran juga dilakukan untuk tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah kecuali pada tanaman Kelapa Sawit. Dari kelima komoditas perkebunan tersebut, Kopi merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditanam dengan sistem tanam tumpang sari dan campuran. Tercatat terdapat lebih dari 35 persen RTUP Kopi melakukan penanaman secara tumpang sari, dan 13 persen RTUP lainnya melakukan penanaman campuran pada perkebunan Kopi yang mereka usahakan.

Gambar 3.10. Persentase banyaknya RTUP menurut sistem penanaman , 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pola penanaman tumpang sari merupakan pola tanam pada suatu lahan yang ditanami lebih dari satu jenis tanaman pada satu periode yang sama dengan jarak tanam dan larikan yang teratur (ibid). Sedangkan pola tanam

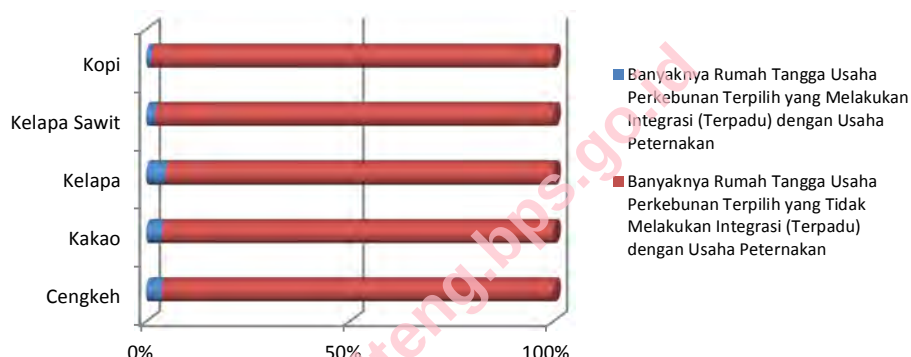
campuran adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada satu bidang lahan akan tetapi tanpa jarak atau larikan yang teratur (ibid). Pola tanam tumpang sari digunakan untuk dapat mengoptimalkan potensi penggunaan lahan. Diharapkan penanaman tumpang sari ini juga dapat meningkatkan pendapatan petani dari hasil beberapa tanaman yang ditanam bersamaan baik berupa tanaman yang umur panennya bersamaan maupun pada tumpang sari yang umur panennya berbeda (tanaman sela). Meskipun cara tumpang sari banyak dilakukan oleh petani, namun masih menghadapi cukup banyak kendala, meskipun cara ini merupakan suatu upaya yang diharapkan dapat menjadi jaring pengaman pendapatan bagi petani ketika harga produk hasil tanaman tahunan lainnya sedang mengalami keterpurukan (Maulana, 2013).

Pengintegrasian usaha perkebunan dengan usaha peternakan merupakan salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah untuk dapat memperkuat usaha perkebunan rakyat (DITJENBUN Kementrian Pertanian, 2013). Selain itu program ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya kebijakan swasembada daging nasional (ibid). Pengintegrasian usaha ternak dengan tanaman perkebunan tahunan seperti Kelapa Sawit, ditengarai sebagai suatu pola integrasi yang saling menguntungkan dan merupakan salah satu bentuk usaha efisiensi perkebunan. Integrasi ternak dengan tanaman perkebunan tahunan kelapa sawit misalnya, dapat mengefisiensikan penggunaan sumber daya yang tersedia, dimana hasil sampingan kelapa sawit maupun limbah dari kelapa sawit dapat digunakan sebagai pakan ternak, sementara kotoran dari ternak tersebut dapat dipergunakan sebagai pupuk bagi tanaman kelapa sawit (Wijono, Lukman, & Ainur, 2003).

Di Sulawesi Tengah sendiri, integrasi usaha perkebunan dan peternakan pada beberapa komoditas dominan masih sangat jarang. Tercatat hanya sekitar 4 persen RTUP Kelapa, Cengkeh, dan Kakao yang melakukan integrasi

usaha dengan peternakan, dan hanya ada sekitar 1 persen RTUP Kopi yang melakukan integrasi usaha perkebunannya dengan usaha peternakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi pengintegrasian usaha perkebunan dan peternakan rumah tangga di Sulawesi Tengah masih belum termanfaatkan dengan baik.

Gambar 3.11. Persentase banyaknya RTUP yang dalam mengusahakan usaha perkebunannya melakukan integrasi (terpadu) usaha dengan usaha peternakan , 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

B. Struktur ongkos Komoditas Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah

Peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga usaha pertanian merupakan salah hal yang menjadi tujuan dari pembangunan di sektor pertanian. Data mengenai struktur ongkos usaha perkebunan merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi usaha perkebunan tersebut dalam kaitannya dengan potensi pendapatan yang diterima petani. Ongkos merupakan biaya produksi yang harus dikeluarkan dalam memproduksi atau menjalankan suatu usaha. Ongkos usaha pertanian yang terlalu tinggi, dapat berpotensi mengurangi pendapatan akhir yang benar-benar dapat dinikmati petani. Dengan melihat struktur ongkos usaha, dapat dilihat pula komponen apa saja yang paling

banyak memakan biaya ataupun komponen mana yang bisa lebih dipergunakan dengan lebih optimal. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengelolaan struktur biaya yang lebih baik, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih maksimal.

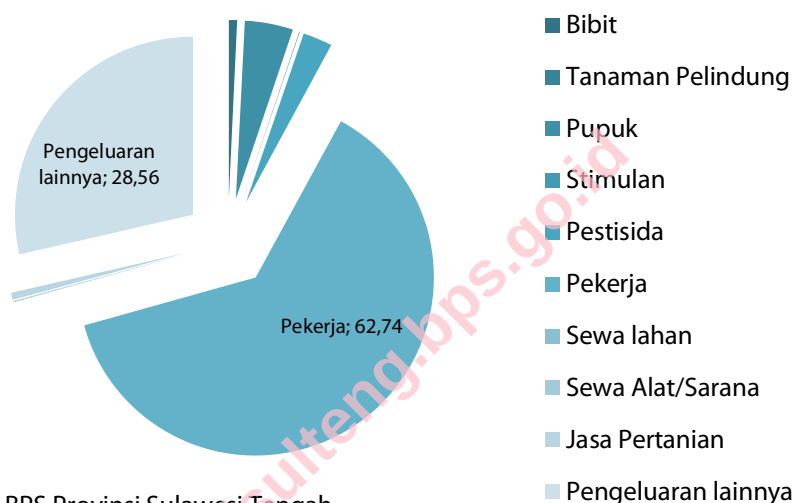
Pada usaha perkebunan cengkeh yang dikelola oleh rumah tangga di Sulawesi Tengah, komponen yang paling banyak menyedot biaya adalah komponen pekerja dengan besaran mencapai 62,74 persen dari keseluruhan biaya/ongkos yang dikeluarkan per hektarnya. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja untuk kegiatan pemanenan merupakan komponen upah tenaga kerja yang paling dominan (mencapai 42,03 persen) dari keseluruhan biaya. Selain itu upah pekerja yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tanaman (7,68 persen) dan pekerja pada proses pengeringan/penjemuran (7,51 persen) juga menjadi beberapa komponen yang mendominasi komponen pengeluaran pada usaha perkebunan ini.

Pada sisi lain, pengeluaran untuk pupuk, bibit dan pestisida memiliki persentase yang relatif kecil dari keseluruhan biaya produksi. Proporsi biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan pupuk sebesar 4,40 persen, sementara biaya yang dikeluarkan untuk bibit dan pestisida masing-masing hanya sekitar 0,74 persen dan 2,69 persen dari keseluruhan biaya produksi. Komponen biaya transportasi atau pengangkutan hasil yang dikeluarkan pada usaha perkebunan rumah tangga Cengkeh pada tahun 2014 adalah sekitar 0,88 persen dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

Sementara itu pada komoditas Kakao menunjukkan bahwa biaya yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya untuk tenaga kerja atau pekerja. Komponen biaya ini mencapai 55,74 persen dari keseluruhan biaya produksi per hektarnya. Dari keseluruhan biaya untuk tenaga kerja, upah pekerja pemanenan merupakan komponen biaya yang paling dominan yakni sekitar 23 persen. Sementara itu persentase upah pekerja pemeliharaan (seperti

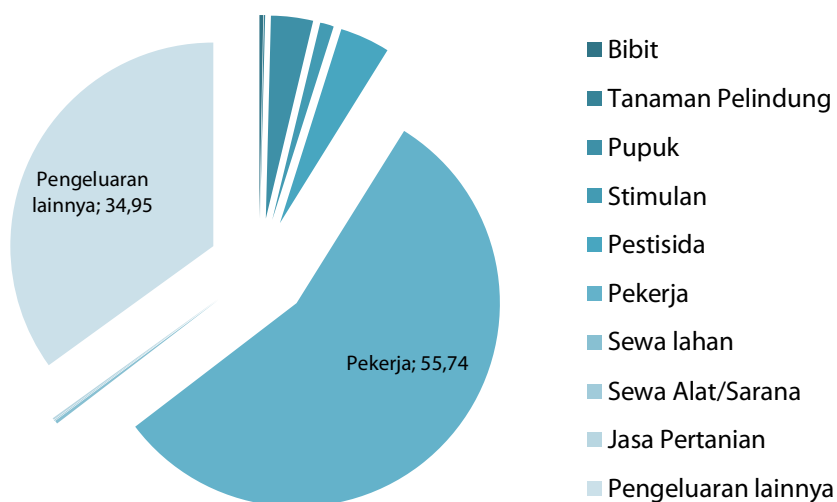
pemangkasan dan penyiangan) hanya sebesar 12,19 persen dari keseluruhan pengeluaran.

Gambar 3.12. Struktur Ongkos Usaha Perkebunan Cengkeh per Hektar, di Sulawesi Tengah, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 3.13. Struktur Ongkos Usaha Perkebunan Kakao per Hektar, di Sulawesi Tengah, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi

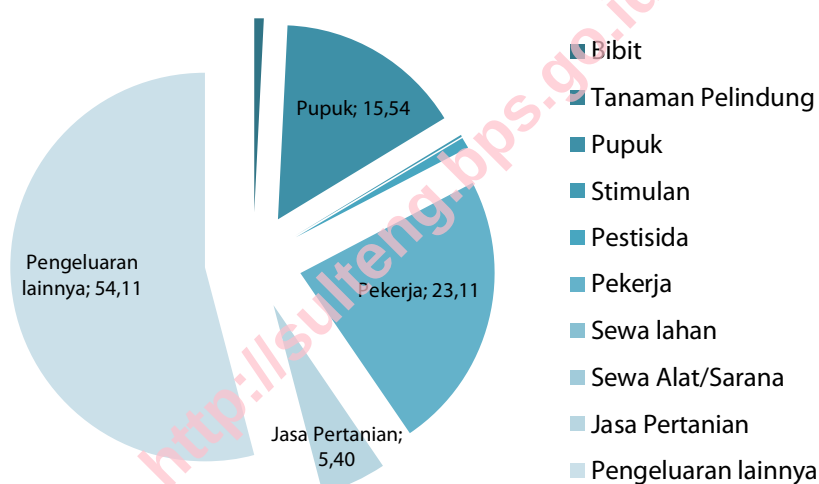
Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk dan pestisida untuk komoditas kakao masing-masing sekitar 3,36 persen dan 3,98 persen serta pengeluaran untuk biaya penyediaan bibit hanya sekitar 0,31 persen dari keseluruhan biaya produksi. Adapun pengeluaran untuk bahan bakar minyak yang digunakan untuk keperluan usaha perkebunan pada komoditas ini sekitar 2,23 persen.

Struktur ongkos yang dikeluarkan oleh RTUP Kelapa Sawit, memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan struktur ongkos usaha perkebunan yang telah dibahas sebelumnya. Pada usaha perkebunan selain Kelapa Sawit, biaya yang dikeluarkan untuk komponen pupuk memiliki persentase yang relatif kecil, tidak mencapai 5 persen dibandingkan dengan total keseluruhan biaya. Pada usaha perkebunan Kelapa Sawit penggunaan pupuk terlihat cukup berperan, hal ini diindikasikan dari relatif cukup besarnya persentase biaya yang dikeluarkan yakni mencapai 15,54 persen dari total pengeluaran per hektarnya. Pupuk yang lazim digunakan oleh RTUP antara lain yaitu NPK, Urea, KCL dan TSP/SP36. Tingginya komponen biaya pupuk pada komoditas kelapa sawit menunjukkan jenis tanaman ini membutuhkan perawatan yang intensif jika ingin memperoleh hasil yang optimal. Konsekuensi ini tentu menuntut ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dan hal ini sudah menjadi gambaran umum pada perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara masif pada kawasan tertentu.

Sekedar perbandingan, sebagaimana yang terlihat pada usaha perkebunan Cengkeh dan Kakao, persentase biaya yang dikeluarkan untuk pekerja usaha perkebunan Kelapa Sawit juga merupakan komponen yang dominan. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja mencapai 23,11 persen dari total keseluruhan pengeluaran. Upah pekerja yang mendominasi yaitu upah yang dikeluarkan untuk membiayai pekerja pada proses pemanenan, mencapai 13,56 persen dari total pengeluaran pada usaha ini.

Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk pestisida dan pengadaan bibit relatif kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan biaya, hanya sebesar 0,92 persen untuk pestisida dan 0,78 untuk bibit. Salah satu komponen biaya lainnya pada usaha perkebunan Kelapa Sawit yaitu pengeluaran untuk membayar jasa pertanian². Pada usaha perkebunan Kelapa Sawit rumah tangga, komponen biaya jasa pertanian mencapai sebesar 5,40 persen.

Gambar 3.14. Struktur Ongkos Usaha Perkebunan Kelapa Sawit per Hektar, di Sulawesi Tengah, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

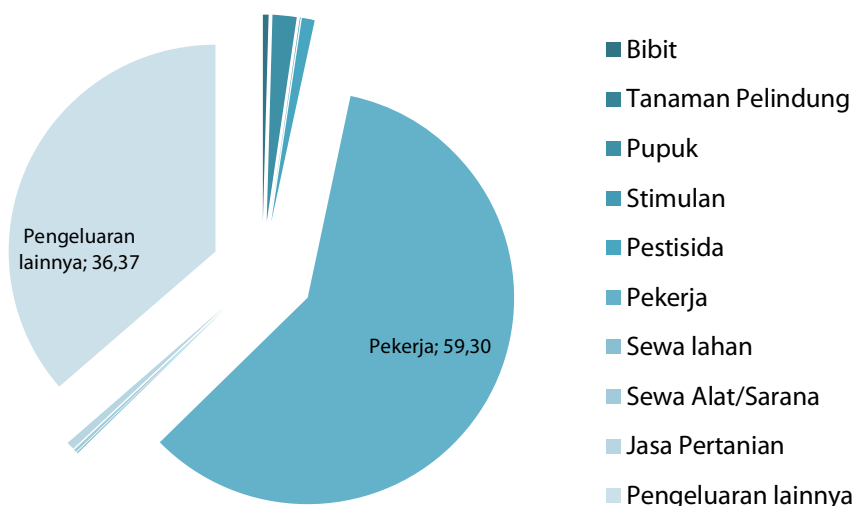
Sepanjang garis pantai Sulawesi Tengah, tanaman kelapa tumbuh subur dan menjadi komoditas strategis sejak beberapa dekade yang lalu. Kopra yang merupakan olahan dari kelapa menjadi primadona perdagangan antar pulau maupun ekspor sebelum kelapa sawit dikenal luas. Meskipun saat ini pamornya kalah dibandingkan kepala sawit, kepala masih mendominasi hasil perkebunan di Sulteng. Struktur ongkos yang dikeluarkan pada usaha perkebunan Kelapa rumah tangga secara umum memiliki beberapa kesamaan

² Usaha Jasa pertanian yaitu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibayarkan untuk kegiatan pengolahan lahan, penanaman pohon pelindung, penanaman tanaman perkebunan, pemeliharaan, pemupukan pemanenan dan lain sebagainya.

dengan struktur ongkos pada usaha perkebunan cengkeh dan kakao. Seperti pada usaha perkebunan sebelumnya, biaya untuk membayar upah pekerja merupakan komponen yang mendominasi pengeluaran pada usaha perkebunan ini, yaitu mencapai 59,59 persen. Upah pekerja untuk pemanenan lagi-lagi merupakan komponen pengeluaran upah yang paling besar, yaitu sebesar 34,61 persen dari total pengeluaran secara umum. Sementara itu, upah pekerja pengeringan/penjemuran dan upah pekerja pemeliharaan mencapai 15,99 persen dan 6,85 persen dari keseluruhan pengeluaran pada usaha perkebunan ini.

Pengeluaran untuk pupuk dan penyediaan bibit pada usaha perkebunan ini juga tidak begitu besar jika dibanding dengan komponen biaya secara total, yaitu hanya mencapai 1,91 persen untuk pupuk dan 0,44 persen untuk bibit. Biaya yang dikeluarkan untuk pestisida pada usaha perkebunan Kelapa rumah tangga di Sulawesi Tengah pada tahun 2014 adalah sebesar 1,00 persen dari keseluruhan pengeluaran usaha. Seluruh biaya untuk pestisida ini, digunakan untuk penggunaan pestisida cair.

Gambar 3.15. Struktur Ongkos Usaha Perkebunan Kelapa per Hektar, di Sulawesi Tengah, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

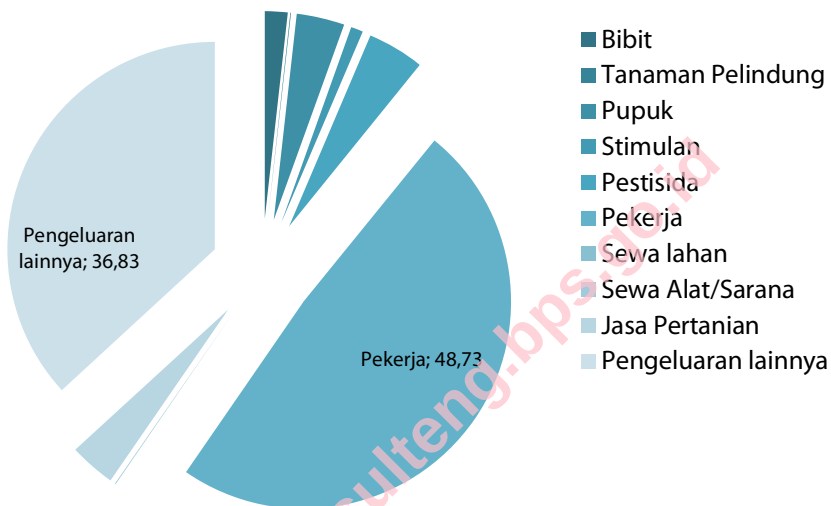
Kopi menjadi komoditas perkebunan yang populer karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan menjadi gaya hidup penduduk urban dengan menjamurnya café lokal maupun *franchise* yang menjual berbagai varian kopi dengan nama dan kemasan eksklusif, meskipun sejak ratusan tahun lalu kopi sudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Struktur ongkos yang dikeluarkan pada usaha perkebunan Kopi rumah tangga secara umum memiliki beberapa kesamaan dengan struktur ongkos pada usaha perkebunan yang telah dibahas sebelumnya. Seperti pada usaha perkebunan sebelumnya, biaya untuk membayar upah pekerja merupakan komponen yang mendominasi pengeluaran pada usaha perkebunan ini, yaitu mencapai 48,73 persen. Biaya pemanenan merupakan komponen pengeluaran upah yang paling besar dengan nilai pengeluaran sebesar 26,18 persen dari total pengeluaran secara umum. Sementara itu, upah pekerja pemeliharaan dan upah pekerja pengeringan/penjemuran mencapai 9,22 persen dan 9,77 persen dari keseluruhan pengeluaran pada usaha perkebunan ini. Kecenderungan tingginya komponen tenaga kerja diduga menjadi faktor utama tingginya biaya pengeluaran pada usaha tanaman kopi karena saat ini biaya tenaga kerja di pedesaan semakin tinggi yang disebabkan semakin langkanya tenaga kerja di pedesaan. Kondisi ini cukup sulit diatasi karena mekanisasi alat pemanenan kopi belum tersedia luas dan masih mengandalkan pemanenan dengan tenaga manusia.

Pengeluaran untuk pupuk dan penyediaan bibit pada usaha perkebunan ini juga tidak begitu besar jika dibanding dengan komponen biaya secara total, yaitu hanya mencapai 3,37 persen untuk pupuk dan 1,74 persen untuk bibit. Biaya yang dikeluarkan untuk pestisida pada usaha perkebunan Kopi di Sulawesi Tengah pada tahun 2014 adalah sebesar 4,41 persen dari keseluruhan pengeluaran usaha. Sebagian besar biaya untuk pestisida ini, digunakan untuk penggunaan pestisida cair. Jika dibandingkan dengan struktur ongkos pada usaha perkebunan lainnya, pengeluaran untuk



penggunaan pestisida pada usaha perkebunan Kopi memiliki proporsi pengeluaran yang cukup tinggi.

Gambar 3.16. Struktur Ongkos Usaha Perkebunan Kopi per Hektar, di Sulawesi Tengah, 2014

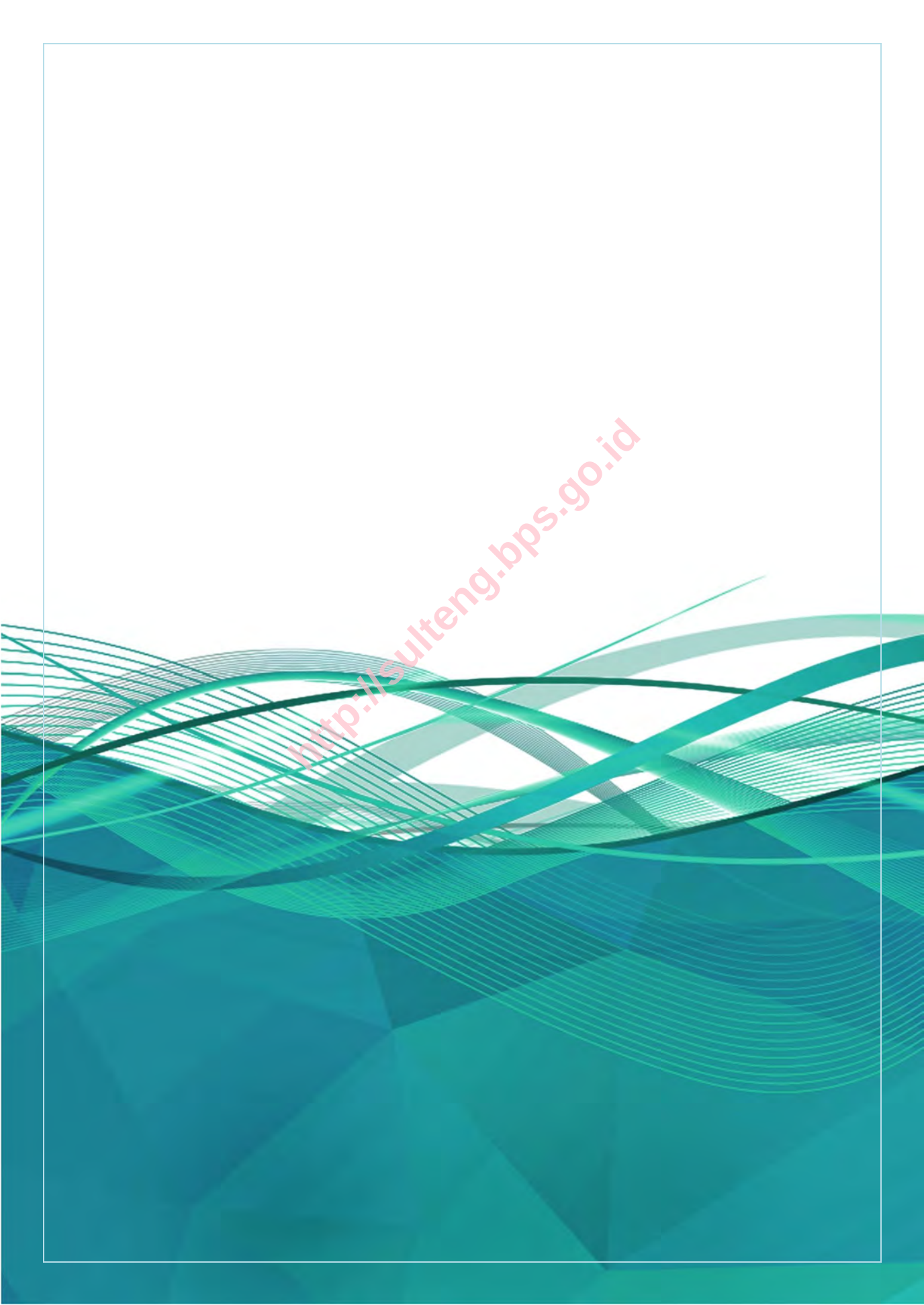


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

**AKSES SUMBERDAYA PRODUKTIF
USAHA PERKEBUNAN CENGKEH, KAKAO,
KELAPA, KELAPA SAWIT, DAN KOPI**

<http://sulteng.bps.go.id>

4



BAB. 4

AKSES SUMBERDAYA PRODUKTIF USAHA PERKEBUNAN CENGKEH, KAKAO, KELAPA, KELAPA SAWIT, DAN KOPI

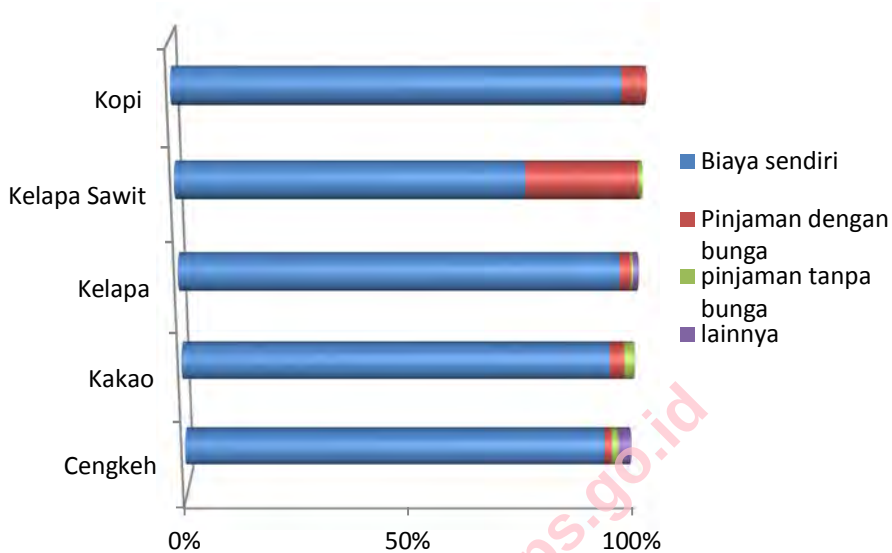
Sumber daya manusia, alam, modal, tenaga kerja dan kewirausahaan merupakan beberapa faktor-faktor produksi atau sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Dalam usaha perkebunan terutama perkebunan tanaman tahunan, sumber daya modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Secara umum, akses terhadap permodalan, bantuan dan kelembagaan yang baik diharapkan dapat membantu keberhasilan dan keberlangsungan pengembangan usaha.

A. Akses Terhadap Permodalan, Bantuan dan Kelembagaan

Sumber pembiayaan usaha perkebunan pada RTUP Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit dan Kopi di Sulawesi Tengah sebagian besar (lebih dari 89 persen) berasal dari biaya sendiri, dan sisanya berasal dari pinjaman baik pinjaman dengan bunga maupun pinjaman tanpa bunga. Pada RTUP Kelapa Sawit dan Kakao, sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman dengan bunga sebagian besar berasal dari pinjaman bank. Khusus untuk RTUP Kelapa, semua sumber pembiayaan yang berupa pinjaman dengan bunga berasal dari perorangan. Pola berbeda terdapat pada RTUP Kopi, pada usaha perkebunan ini sebagian besar pembiayaan yang berasal dari pinjaman dengan bunga berasal dari sumber lainnya, yaitu mencapai lebih dari 64 persen dari keseluruhan pinjaman dengan bunga.



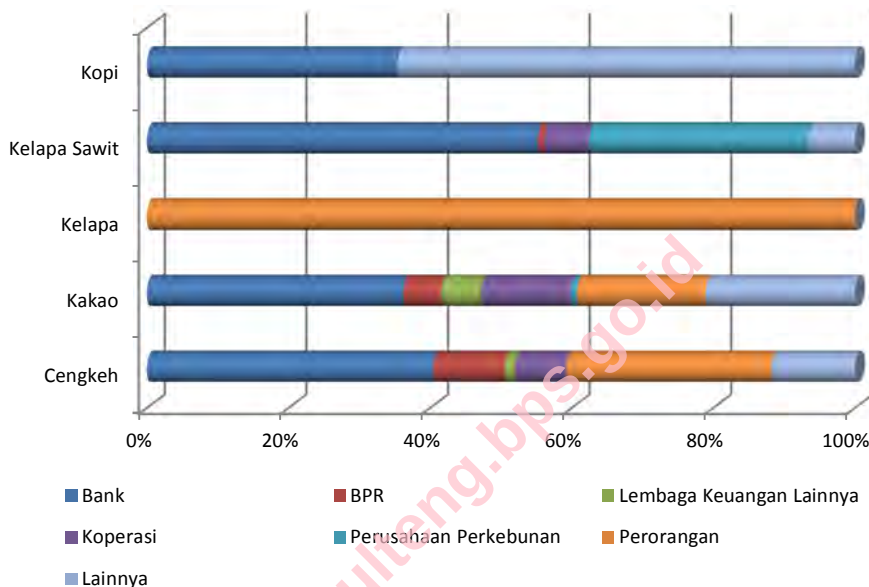
Gambar 4.1. Distribusi Persentase Sumber Pembiayaan RTUP, 2014



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sementara itu Koperasi menjadi alternatif sumber pembiayaan dengan pinjaman berbunga yang terlihat tidak begitu banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga perkebunan tersebut. Tercatat hanya RTUP Cengkeh, Kakao dan Kelapa Sawit yang memanfaatkan pinjaman berbunga dari koperasi selama kurun waktu setahun yang lalu (Mei/Juli 2013-2014), yaitu sekitar 7,27 persen pada RTUP Cengkeh, 12,72 persen pada RTUP Kakao, dan 6,35 Persen pada RTUP Kelapa Sawit. Rendahnya pekebun yang mengakses koperasi perlu lebih dicermati mengingat lembaga keuangan yang dianggap sebagai institusi ekonomi yang paling cocok dengan prinsip gotong royong masyarakat Indonesia ternyata belum berperan signifikan bagi kehidupan petani yang justru kental dengan kehidupan gotong royong. Lemahnya manajemen dan SDM yang menangani koperasi selama ini disinyalir banyak koperasi yang tidak dapat beroperasi dengan pengelolaan yang baik.

Gambar 4.2. Persentase banyaknya RTUP dengan Sumber Pembiayaan Usaha Tanaman Perkebunan Terpilih dari Pinjaman dengan Bunga Menurut Asal Sumber Pinjaman yang Utama

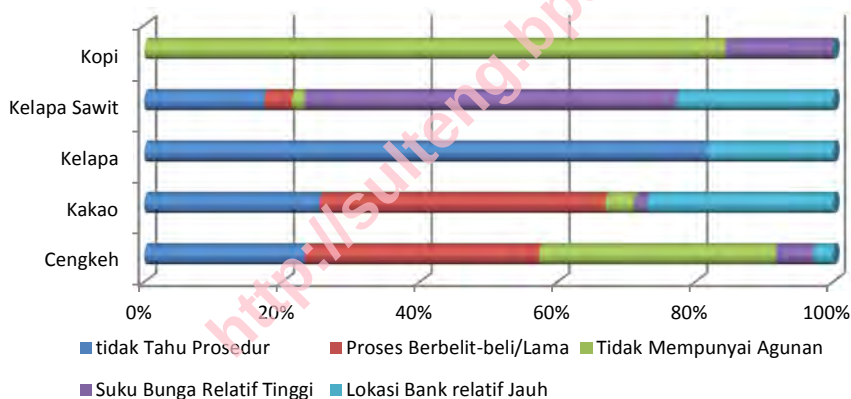


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Suku bunga yang relatif tinggi pada pinjaman yang berasal dari bank merupakan alasan yang dominan diungkapkan oleh RTUP Kelapa Sawit yang tidak menggunakan sumber pinjaman dengan bunga yang berasal dari bank, yaitu sebanyak 43,80 persen. Sementara itu RTUP Kelapa Cengkeh dan Kakao yang menyatakan bahwa suku bunga bank yang relatif tinggi sebagai alasan mereka tidak menggunakan pinjaman dengan bunga yang berasal dari bank adalah sekitar 5,25 persen dan 1,79 persen. Proses peminjaman yang berbelit-belit juga diungkapkan sebagai alasan keengganan meminjam dari bank oleh RTUP tersebut. Persentase yang menyatakan bahwa proses yang berbelit-belit menjadi alasan utama mereka adalah sebanyak 33,1 persen pada RTUP Cengkeh, 39,79 persen pada RTUP Kakao dan 3,23 persen pada RTUP Kelapa Sawit.

Selain alasan tersebut, ketidaktahuan akan prosedur peminjaman juga diungkapkan oleh sekitar 81,82 persen RTUP Kelapa sebagai alasan utama mereka tidak melakukan peminjaman dengan bunga yang utama dari bank. Tidak mempunyai agunan juga diungkapkan oleh beberapa RTUP Kopi, Cengkeh, dan Kakao. Persentase RTUP yang menyatakan ketiadaan agunan sebagai alasan utama mereka tidak melakukan peminjaman dengan bunga berasal dari bank yaitu sekitar 84,31 persen pada RTUP Kopi, 33,4 persen pada RTUP Cengkeh dan 4,03 persen pada RTUP Kakao.

Gambar 4.3. Persentase banyaknya RTUP yang tidak menggunakan sumber pinjaman dengan bunga yang utama dari bank menurut alasan utamanya

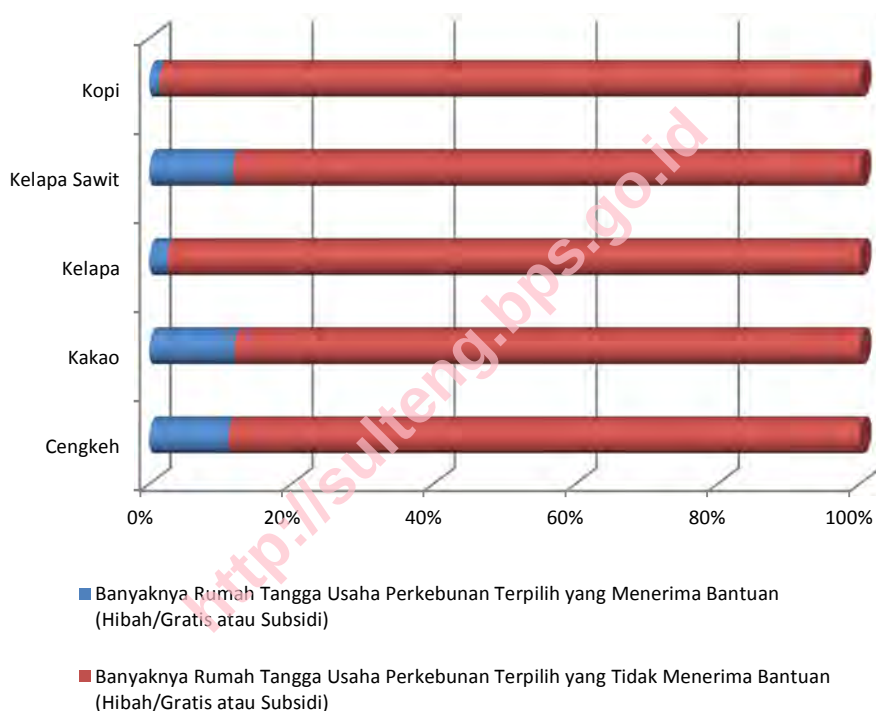


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Selain modal yang diperoleh dari sumber pembiayaan diatas, terdapat juga bantuan-bantuan yang berupa hibah maupun subsidi bagi usaha perkebunan rumah tangga di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian dari hasil survei RTUP 2014, terlihat bahwa pada RTUP Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah sebagian besar tidak menerima bantuan baik berupa hibah atau subsidi. RTUP Kakao merupakan RTUP yang menyatakan paling tinggi menerima bantuan, yaitu sebanyak 11,99 persen.

Adapun persentase RTUP Kelapa Sawit dan Cengkeh yang menyatakan menerima bantuan masing-masing sekitar 11,75 dan 11,11 persen.

Gambar 4.4. Persentase banyaknya RTUP yang menerima bantuan untuk usaha perkebunannya



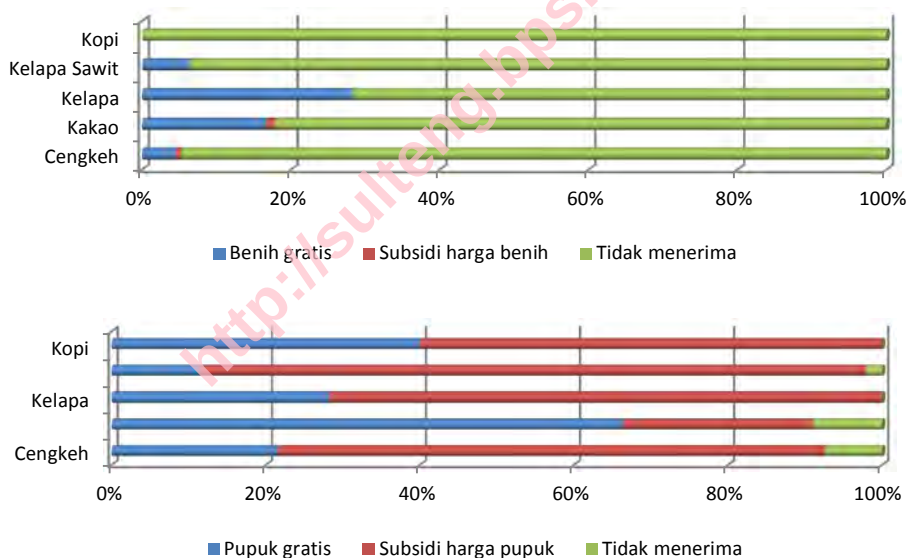
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberian bantuan berupa subsidi harga maupun bantuan berupa hibah gratis merupakan beberapa jenis bantuan yang lazim diterima oleh RTUP perkebunan. Berdasarkan survei RTUP 2014, bantuan berupa benih gratis paling banyak diterima oleh RTUP Kelapa (28,21 persen). Sedangkan RTUP Kakao, Kelapa Sawit, dan Cengkeh yang menyatakan menerima bantuan

berupa benih gratis persentasenya hanya berkisar antara 4,44 hingga 16,68 persen.

Bantuan berupa subsidi harga untuk pembelian pupuk cukup dominan dirasakan oleh RTUP perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa dan Cengkeh di Sulawesi Tengah. Bantuan berupa pupuk bersubsidi dapat diakses oleh lebih dari 71 persen RTUP tersebut. Sementara itu, bantuan berupa pupuk gratis, juga diterima oleh sekitar 66,38 persen dari RTUP Kakao.

Gambar 4.5. Persentase banyaknya RTUP menurut bantuan untuk usaha perkebunan berupa benih dan pupuk yang diterima

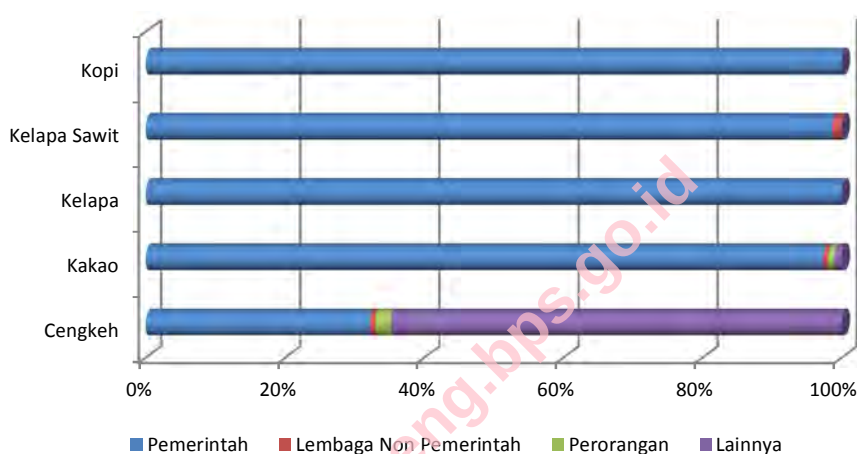


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Bantuan yang diterima oleh RTUP dilihat dari sumber pemberi bantuan sebagian besar berasal dari pemerintah. Lebih dari 97 persen bantuan yang diterima oleh RTUP Kakao dan Kelapa Sawit utamanya berasal dari pemerintah, sementara itu, pada RTUP Kelapa, keseluruhan bantuan yang

diterima, baik berupa hibah ataupun subsidi harga, sumber utamanya berasal dari pemerintah.

Gambar 4.6. Persentase banyaknya RTUP yang menerima bantuan untuk usaha perkebunan menurut sumber utama bantuan yang diterima



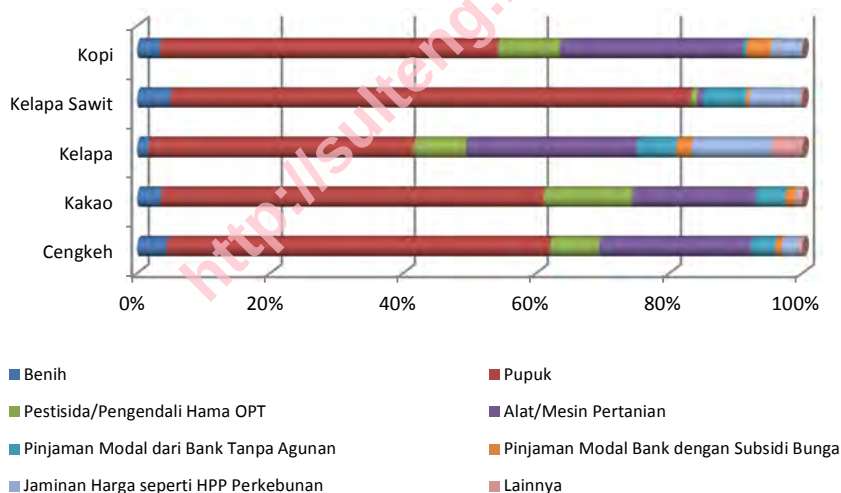
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Bantuan dalam bentuk pupuk merupakan jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh RTUP perkebunan Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah. Tercatat lebih dari 40 persen RTUP tersebut menyatakan bahwa pupuk merupakan jenis bantuan yang paling mereka harapkan. Bantuan berupa benih tampaknya belum merupakan prioritas yang diharapkan oleh sebagian RTUP perkebunan tersebut. Tercatat hanya sebanyak 4,98 persen RTUP Kelapa Sawit, 4,4 persen RTUP Cengkeh, dan 3,57 persen RTUP Kakao yang menyatakan bahwa benih merupakan bantuan yang paling mereka butuhkan.

Rendahnya persentase ini mengindikasikan kurangnya urgensi RTUP perkebunan secara umum akan penggunaan benih bantuan. Kondisi ini terlihat kontras dengan anjuran (maupun tuntutan) pemerintah dan perusahaan pengolah hasil pertanian akan penggunaan benih bersertifikat

yang makin gencar akhir-akhir ini terutama untuk komoditas perkebunan seperti Kelapa Sawit. Mengingat pemakaian benih bersertifikat pada RTUP perkebunan tersebut, berdasarkan hasil survei yang sama, terlihat masih sangat rendah. Kondisi ini hendaknya menjadi perhatian khusus bagi pembuat kebijakan mengingat hal ini dapat mengindikasikan rendahnya kesadaran RTUP akan urgensi dan pentingnya pemakaian benih yang lebih baik. Sosialisasi mengenai keuntungan pemakaian benih yang baik, maupun sosialisasi mengenai anjuran pemerintah dan tuntutan pasar akan pemakaian benih bersertifikat mungkin perlu lebih gencar dilakukan.

Gambar 4.7. Persentase banyaknya RTUP menurut jenis bantuan usaha yang paling dibutuhkan pada waktu yang akan datang



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Bantuan berupa pestisida atau pengendali hama (OPT) juga menjadi salah satu jenis bantuan yang diharapkan, terutama oleh RTUP Kakao. Tercatat sebanyak 13,32 persen RTUP Kakao menyatakan bahwa pestisida atau pengendali hama (OPT) lainnya merupakan jenis bantuan yang paling diharapkan untuk didapatkan diwaktu yang akan datang. Alat/mesin

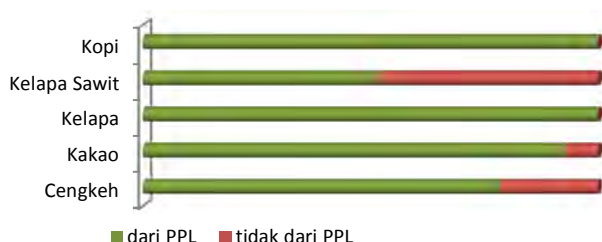
pertanian menjadi salah satu jenis bantuan yang paling diharapkan oleh sekitar 27,52 persen RTUP Kopi, 25,7 persen RTUP Kelapa, 22,82 persen RTUP Cengkeh dan 18,56 persen RTUP Kakao. RTUP Kelapa Sawit yang mengharapkan bantuan alat/mesin pertanian hanya 0,95 persen. Sementara itu jaminan harga (misalnya HPP perkebunan) menjadi jenis bantuan yang paling dibutuhkan oleh sekitar 12,03 persen RTUP Kelapa dan 7,64 persen RTUP Kelapa Sawit.

Gambar 4.8. Persentase banyaknya RTUP yang mendapat penyuluhan/bimbingan dan menurut asal penyuluhan/bimbingan tersebut

Persentase RTUP yang mendapat bimbingan/penyuluhan



Persentase RTUP yang mendapat penyuluhan menurut asal penyuluhannya



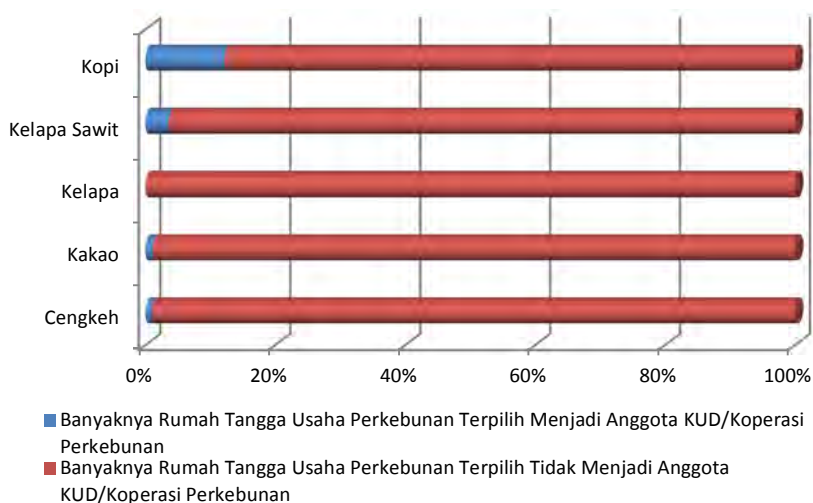
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Akses terhadap penyuluhan atau pembimbingan terlihat tidak begitu banyak didapatkan oleh RTUP Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah. Tercatat RTUP yang mendapatkan penyuluhan atau

bimbingan pada usaha perkebunan tersebut tidak lebih dari 17 persen. Penyuluhan atau bimbingan ini sebagian besar dilakukan oleh PPL (Penyuluh pertanian lapangan) atau dari pemerintah atau dinas perkebunan terkait.

Penguatan kelembagaan petani merupakan salah satu aspek yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu bentuk penguatan kelembagaan petani adalah dengan dibentuknya suatu koperasi petani ataupun kelompok tani (maupun gabungan kelompok tani/gapoktan) yang terorganisir dengan baik. Koperasi ataupun kelompok tani ini, diharapkan dapat menjadi platform yang dapat memfasilitasi dan mempermudah transfer pengetahuan dan keterampilan bagi para petani. Selain itu, dengan bergabungnya para petani kedalam suatu kelompok atau koperasi diharapkan akan terjadi penggabungan sumber daya dari para petani tersebut, terutama dari segi skala usaha atau produksi sehingga diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang baik terutama dalam menjamin pemasaran hasil/produk pertanian mereka.

Gambar 4.9. Persentase banyaknya RTUP yang anggota rumah tangganya menjadi anggota KUD/Koperasi perkebunan



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Meskipun demikian, berdasarkan hasil survei RTUP 2014, terlihat bahwa partisipasi RTUP perkebunan Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) ataupun Koperasi perkebunan masih sangat rendah. Tercatat, RTUP yang anggota rumah tangganya menjadi anggota KUD/Koperasi Perkebunan tidak lebih dari 13 persen.

Sementara itu, RTUP Kelapa Sawit yang bergabung dengan suatu kelompok tani tanaman perkebunan menunjukkan persentase yang cukup tinggi (64,27 %), sedangkan RTUP pada komoditas lainnya belum menunjukkan angka yang tinggi. Untuk RTUP Kopi dan Kelapa, tercatat masing-masing sebanyak 4,87 dan 4,15 persen yang ARTnya menjadi anggota kelompok tani. Sementara itu, pada RTUP Kakao, dan Cengkeh persentase RTUP yang ARTnya bergabung dalam suatu kelompok tani telah mencapai 27,53 persen untuk RTUP Kakao 15,31 persen untuk RTUP Cengkeh.

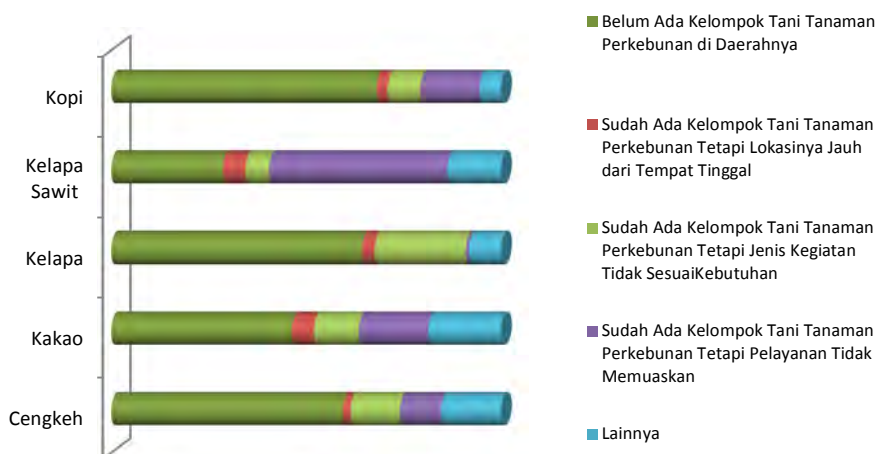
Gambar 4.10. Persentase banyaknya RTUP yang anggota rumah tangganya menjadi anggota kelompok tani tanaman perkebunan



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Hambatan utama yang dihadapi oleh RTUP sehingga belum bergabung kedalam suatu kelompok tani tanaman perkebunan adalah belum adanya kelompok tani tanaman perkebunan di daerah mereka. Alasan ini diungkapkan oleh sebagian besar RTUP yang ARTnya tidak menjadi anggota kelompok tani. Tercatat lebih dari 28 persen RTUP tersebut yang menyatakan belum adanya kelompok tani tanaman perkebunan sebagai alasan utama mereka tidak menjadi anggota kelompok tani. Sementara itu, lebih dari 10 persen RTUP yang tidak menjadi anggota kelompok tani menyatakan bahwa meskipun sudah ada kelompok tani tanaman perkebunan, akan tetapi pelayanannya tidak memuaskan, sehingga mereka enggan menjadi anggota kelompok tani tersebut. Tidak sesuai jenis kegiatan kelompok tani yang ada dengan kebutuhan petani menjadi alasan utama bagi sekitar 23,42 persen RTUP Kelapa, 12,7 RTUP Cengkeh, 11,55 persen RTUP Kakao, 8,38 RTUP Kopi, dan 6,06 RTUP Kelapa Sawit yang tidak menjadi anggota kelompok tani.

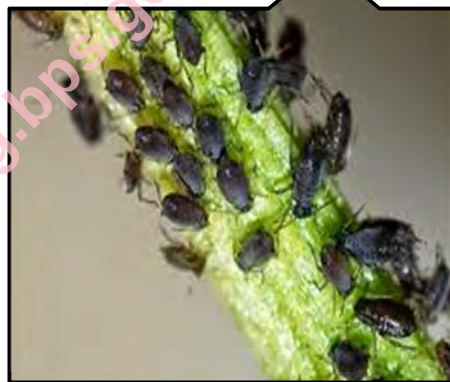
Gambar 4.11. Persentase banyaknya RTUP yang anggota rumah tangganya tidak menjadi anggota kelompok tani tanaman perkebunan menurut alasan utamanya



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

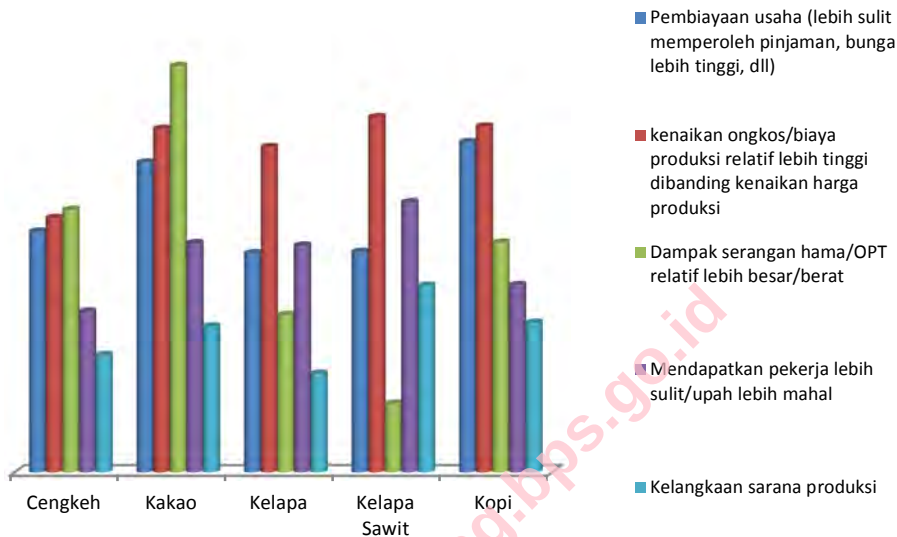
B. Kendala Usaha Perkebunan

Pembiayaan usaha merupakan salah satu kesulitan usaha yang dirasakan oleh RTUP Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2013), terdapat lebih dari 49 persen RTUP tersebut yang menyatakan bahwa kondisi pembiayaan usaha menjadi terasa lebih sulit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun lalu, kenaikan ongkos/biaya produksi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga produk juga dinyatakan sebagai salah satu kesulitan yang dirasakan oleh sebagian besar RTUP tersebut.



Dampak serangan hama/OPT yang lebih berat dibanding dengan tahun lalu dinyatakan sebagai salah satu hambatan usaha oleh sekitar 91,79 persen RTUP Kakao dan sekitar 59,28 persen RTUP Cengkeh. Sementara itu, pada RTUP Kelapa dan Kelapa Sawit hambatan ini hanya dirasakan oleh masing-masing 35,67 persen dan 15,56 persen serta 51,87 persen untuk RTUP tanaman Kopi. Selain itu kelangkaan sarana produksi dan kesulitan mendapatkan pekerja atau upah yang lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu juga disebutkan oleh RTUP Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi sebagai kendala usaha yang dirasakan lebih berat dibanding dengan kondisi tahun sebelumnya.

Gambar 4.12. Persentase banyaknya RTUP menurut persepsi kesulitan/hambatan usaha yang dihadapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya

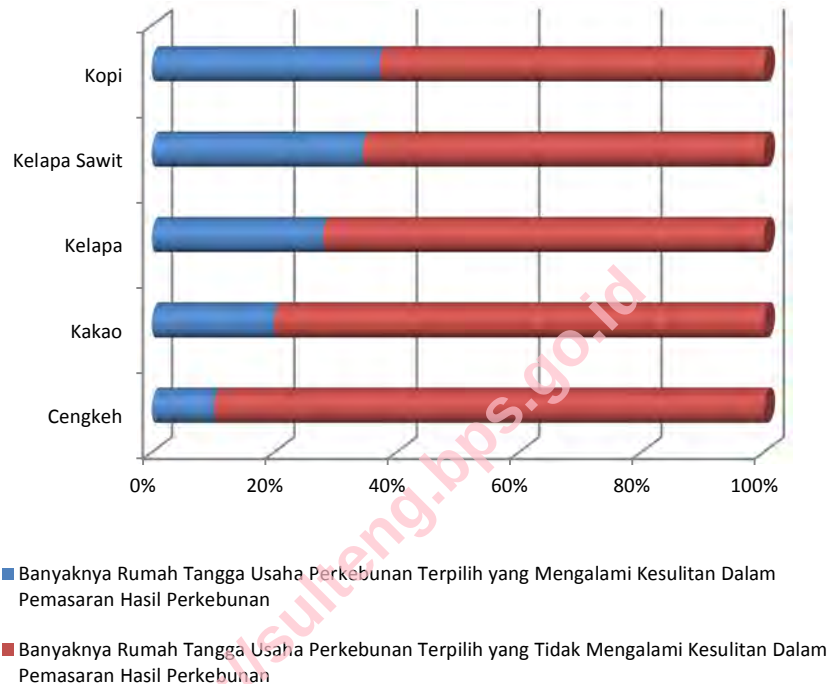


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pemasaran merupakan salah satu tahapan penting dalam usaha perkebunan. Jaminan pemasaran yang baik, termasuk tersedianya pangsa pasar dan akses terhadap pasar serta harga jual yang menguntungkan merupakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha perkebunan. Oleh karena itu, kendala pada pemasaran hasil pertanian perlu untuk diidentifikasi agar dapat dirumuskan strategi untuk mengatasinya.

RTUP Kopi merupakan RTUP yang paling banyak mengalami kendala dalam pemasaran. Tercatat lebih dari 37 persen RTUP menyatakan mengalami kesulitan pada pemasaran produk perkebunannya. Sementara itu, pada RTUP Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao dan Cengkeh yang menyatakan mengalami kendala pemasaran adalah sekitar 34,48 persen, 27,92 persen, 19,91 persen, dan 10,18 persen.

Gambar 4.13. Persentase banyaknya RTUP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil perkebunan

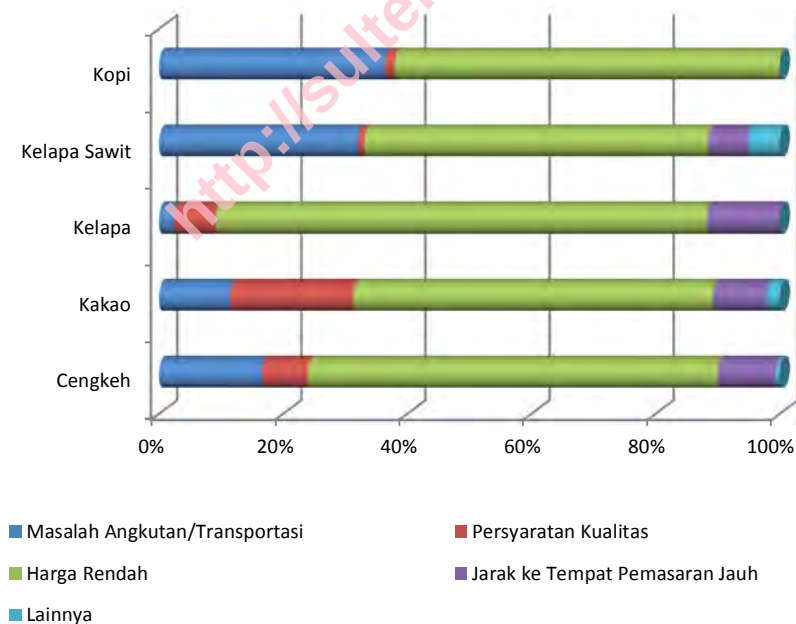


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Rendahnya harga menjadi faktor yang paling banyak dikeluhkan oleh pekebun sebagai penyebab utama kendala pemasaran produk. Lebih dari 55 persen RTUP di Sulawesi Tengah menyatakan bahwa rendahnya harga menjadi penyebab utama kesulitan pemasaran yang mereka hadapi. Pada RTUP Kopi, selain permasalahan rendahnya harga, permasalahan angkutan/transportasi juga disebutkan sebagai kendala utama pemasaran hasil perkebunannya oleh sekitar 36 persen RTUP Kopi. Selain dua permasalahan di atas, RTUP Kopi juga mengalami permasalahan pada persyaratan untuk memenuhi kualitas tertentu. Permasalahan ini disebutkan oleh sekitar 1,52 persen RTUP Kopi sebagai alasan utama kendala pemasarannya.

Pada RTUP Kelapa Sawit, lebih dari 55 persen RTUPnya menyatakan bahwa rendahnya harga merupakan penyebab utama masalah pemasaran yang mereka hadapi. Masalah angkutan/transportasi juga disebutkan sebagai salah satu penyebab utama kesulitan pemasaran oleh sekitar 32,01 persen RTUP. Seiring dengan permasalahan transportasi, jarak ke pemasaran yang jauh juga disebutkan oleh sekitar 6,46 persen RTUP Kelapa Sawit yang mengalami kendala pemasaran sebagai penyebab utama kendala tersebut. Selain permasalahan tersebut, persyaratan kualitas juga disebutkan oleh sekitar 1,52 persen RTUP Kelapa Sawit sebagai alasan utama kendala pemasaran yang mereka hadapi.

Gambar 4.14. Persentase banyaknya RTUP menurut penyebab utama kesulitan dalam pemasaran hasil perkebunan

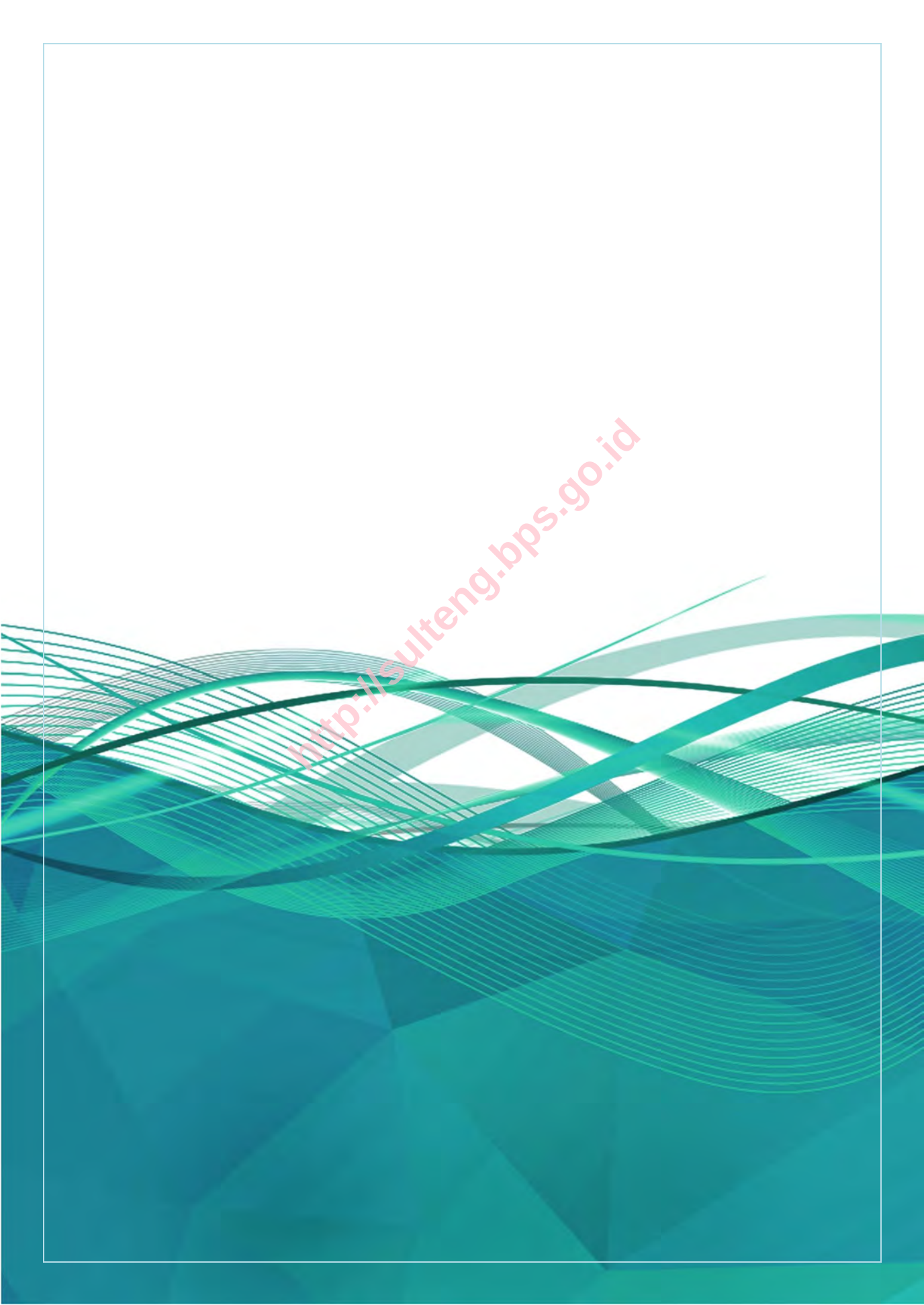


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN DETERMINASI USAHA PERKEBUNAN

<http://sulteng.bps.go.id>

5



BAB. 5

ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN DETERMINASI USAHA PERKEBUNAN

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis efisiensi usaha perkebunan. Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu institusi/organisasi yang menggambarkan efektivitas proses kerja lembaga tersebut. Efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dalam berbagai referensi, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output.

Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi output terhadap input, sedangkan efisiensi adalah input dibagi dengan output.

Pada pembahasan dalam bab ini tingkat efisiensi yang digunakan adalah rasio input terhadap output. Output dihitung berdasarkan nilai produksi masing-masing komoditas perkebunan dan input dihitung berdasarkan seluruh komponen pengeluaran usaha perkebunan.

Langkah dalam penghitungan tingkat efisiensi sebagai berikut: Pertama, menghitung rasio input terhadap output, yang menggambarkan makin kecil rasio ini makin efisien usaha tersebut.

Kedua, agar rasio pada bagian pertama dapat dianalisis dengan nilai tingkat efisiensi dengan arah positif yakni makin besar nilai rasio menunjukkan tingkat efisiensi makin tinggi maka dilakukan standarisasi



nilai rasio input terhadap output, dengan menghitung rasio nilai maksimum dikurangi dengan rasio awal yang diperoleh, kemudian dibagi dengan selisih nilai maksimum dan minimum rasio.

A. Analisis Keterbandingan Tingkat Efisiensi

Tabel berikut menyajikan tingkat efisiensi masing-masing komoditas perkebunan yang banyak diusahakan di Sulawesi Tengah sesuai hasil SPP 2014.

Tabel 5.1. Nilai Tingkat Efisiensi Menurut Jenis Komoditas Perkebunan

Jenis Tanaman	Tingkat Efisiensi		
	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)
Cengkeh	1,00	0,29	0,86
Kakao	1,00	0,00	0,78
Kelapa	0,98	0,45	0,85
Kelapa Sawit	1,00	0,31	0,83
Kopi	1,00	0,30	0,77

Secara rata-rata, rumah tangga usaha perkebunan cengkeh tercatat memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan nilai rasio sebesar 0,86, diikuti rumah tangga petani kelapa dengan nilai 0,85 serta komoditas kelapa sawit sebesar 0,83 dan masing-masing sebesar 0,78 dan 0,77 untuk komoditas kakao dan kopi. Tingginya rasio efisiensi komoditas cengkeh dan kelapa diduga karena kedua komoditas ini telah lama diusahakan oleh petani sehingga proporsi tanaman yang telah menghasilkan relatif tinggi. Sementara itu untuk komoditas kakao dan kopi masih terdapat cukup besar porsi tanaman yang belum menghasilkan sehingga nilai rasio efisiensinya cenderung lebih rendah.

Gejala tingginya porsi tanaman yang belum menghasilkan terdeteksi dari nilai rasio input dan output yang bernilai lebih besar dari 1, yang mengindikasikan besarnya biaya produksi lebih besar dari nilai produksi yang diperoleh.

Dilihat dari distribusi rumahtangga menurut tingkat efisiensinya, lebih 80 persen rumahtangga cengkeh memiliki tingkat efisiensi diatas 0,8, yang menunjukkan nilai diatas rata-rata. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tanaman kelapa. Adapun tanaman kelapa sawit juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sekitar 72 persen rumahtangga memiliki efisiensi diatas 0,8.

Tabel 5.2. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Tingkat Efisiensi

Jenis Tanaman	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh	3,38	2,84	11,13	37,78	44,87	100,00
Kakao	14,08	9,69	19,93	36,33	19,97	100,00
Kelapa	2,93	4,15	13,48	44,84	34,61	100,00
Kelapa Sawit	5,91	8,72	12,99	38,09	34,29	100,00
Kopi	9,74	21,81	25,48	26,96	16,02	100,00
Total	10,39	7,62	17,13	36,83	28,03	100,00

Berdasarkan kategori umur petani, terdapat perbedaan pola tingkat efisiensi. Pada petani cengkeh, untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 distribusi antar kelompok umur relatif merata, yakni sekitar 80 persen, yang mengindikasikan tingkat umur relatif tidak berpengaruh terhadap efisiensi usaha tanaman cengkeh.



Selanjutnya pada tanaman kakao, terlihat pola yang berbeda terjadi pada kelompok umur dibawah 35 tahun yang cenderung memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dengan sekitar 82 persen rumahtangga memiliki efisiensi diatas 0,80. Booming kakao dalam satu dekade terakhir di Sulteng ternyata menarik minat petani kelompok usia relatif muda untuk membudidayakan kakao. Gejala ini juga mengindikasikan usia panen perdana tanaman kakao yang lebih cepat dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya mendorong tingginya minat petani muda untuk mengusahakan komoditas ini.

Berbeda dengan kakao, tingkat efisiensi yang tinggi (didas 0,8) untuk tanaman kelapa justru didominasi oleh kelompok umur diatas 35 tahun dan relatif seragam antar kelompok umur. Tanaman kelapa yang cenderung tidak memerlukan pemeliharaan dan biaya produksi relatif rendah menyebabkan motivasi petani untuk meningkatkan tingkat efisiensi juga relatif rendah.

Gambaran tingkat efisiensi pada tanaman kelapa sawit mirip dengan tanaman cengkeh dimana distribusi tingkat efisiensi antar kelompok umur relatif seragam. Kondisi ini dimungkinkan karena pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola rumahtangga umumnya untuk melayani pelaku industri minyak goreng yang langsung menampung hasil kebun petani. Biasanya setiap petani tergabung dalam kelompok sehingga pengetahuan dan informasi tentang budidaya kelapa sawit dapat tersebar secara merata antar petani sehingga dengan sharing pengetahuan rata-rata petani sawit memiliki pengetahuan yang memadai. Kondisi ini mendorong upaya meningkatkan efisiensi usaha tidak banyak bergantung pada usia petani.

Tabel 5.3. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Kelompok Umur Petani dan Tingkat Efisiensi.

Kelompok Umur	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
< 35	4,36	3,40	15,71	39,28	37,25	100,00
35-44	2,70	2,85	10,81	40,83	42,81	100,00
45-54	2,97	2,58	10,71	35,98	47,76	100,00
>55	4,20	2,72	8,44	34,14	50,50	100,00
Kakao						
< 35	3,68	2,78	11,17	33,01	44,36	100,00
35-44	14,36	9,61	22,45	35,26	18,33	100,00
45-54	14,56	8,80	16,91	37,29	22,43	100,00
>55	14,52	8,88	20,90	36,71	18,98	100,00
Kelapa						
< 35	9,94	14,31	39,55	28,59	7,61	100,00
35-44	4,38	1,30	5,15	51,55	37,11	100,00
45-54	2,19	1,29	22,11	29,31	45,12	100,00
>55	0,95	5,99	10,79	50,85	31,42	100,00
Kelapa Sawit						
< 35	2,26	4,77	12,57	46,87	33,53	100,00
35-44	8,20	11,31	11,37	39,03	30,08	100,00
45-54	0,80	9,74	15,34	42,45	31,68	100,00
>55	7,50	7,82	10,08	37,35	37,24	100,00
Kopi						
< 35	4,25	8,75	12,63	39,82	34,54	100,00
35-44	6,80	28,49	28,13	25,37	11,21	100,00
45-54	11,32	21,07	6,29	34,59	26,73	100,00
>55	6,34	19,31	31,41	25,65	17,29	100,00

Pengetahuan dan kemampuan menelaah informasi yang memadai bagi petani secara hipotesis memiliki keterkaitan erat dengan usaha yang digeluti. Berikut ini akan dicermati pola hubungan tingkat efisiensi usaha



perkebunan dengan tingkat pendidikan petani. Dengan pendidikan yang baik diharapkan petani mampu mengelola usaha perkebunannya menjadi lebih baik dan efisien.

Dari Tabel 5.4. untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan pekebun dan tingkat efisiensi, fokus perhatian dapat diarahkan pada persentase rumahtangga petani yang memiliki tingkat efisiensi diatas 0,8. Seyogyanya pada kelompok ini makin tinggi tingkat pendidikan kepala rumahtangga akan semakin besar persentase rumahtangga. Indikasi ini hanya terlihat pada komoditas kelapa sawit dimana persentase rumahtangga yang memiliki tingkat efisiensi diatas 0,8 mulai tingkat SD kebawah hingga perguruan tinggi bergerak dari 70 persen hingga 89 persen. Pengecualian ini dapat dimaklumi karena produk perkebunan sawit berhubungan dengan industri besar yang mengolah kelapa sawit menjadi CPO kemudian menjadi minyak goreng. Dalam hubungan yang melibatkan investasi besar ini tingkat pendidikan petani menjadi tuntutan tersendiri, berbeda dengan perkebunan yang hanya dikelola oleh rumahtangga.

Sementara itu, pada komoditas lainnya ada kecenderungan untuk tingkat efisiensi diatas 0,80 didominasi oleh kepala rumahtangga yang memiliki pendidikan SLTA. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa untuk komoditas selain kelapa sawit, pekebun tidak dituntut harus berpendidikan perguruan tinggi, dengan bekal pendidikan SLTA sudah cukup memadai dalam mengelola usaha perkebunan. Temuan ini dapat dimaklumi karena perkebunan rakyat yang dikelola oleh rumahtangga masih banyak yang dijalankan dengan manajemen sederhana dan hal ini tidak menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Kebiasaan di masyarakat dimana pengetahuan tentang pengelolaan perkebunan yang diturunkan melalui keluarga atau hasil eksplorasi sendiri dapat menjadi bekal yang berharga bagi petani yang baru bergelut pada usaha perkebunan.

Tabel 5.4. Distribusi Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Tingkat Pendidikan dan Tingkat Efisiensi.

Tingkat Pendidikan	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
SD Kebawah	4,36	3,40	15,71	39,28	37,25	100,00
SLTP	2,70	2,85	10,81	40,83	42,81	100,00
SLTA	2,97	2,58	10,71	35,98	47,76	100,00
Perguruan Tinggi	4,20	2,72	8,44	34,14	50,50	100,00
Kakao						
SD Kebawah	3,68	2,78	11,17	38,01	44,36	100,00
SLTP	14,36	9,61	22,45	35,26	18,33	100,00
SLTA	14,56	8,80	16,91	37,29	22,43	100,00
Perguruan Tinggi	14,52	8,88	20,90	36,71	18,98	100,00
Kelapa						
SD Kebawah	9,94	14,31	39,55	28,59	7,61	100,00
SLTP	4,38	1,80	5,15	51,55	37,11	100,00
SLTA	2,19	1,29	22,11	29,31	45,12	100,00
Perguruan Tinggi	0,95	5,99	10,79	50,85	31,42	100,00
Kelapa Sawit						
SD Kebawah	2,26	4,77	12,57	46,87	33,53	100,00
SLTP	8,20	11,31	11,37	39,03	30,08	100,00
SLTA	0,80	9,74	15,34	42,45	31,68	100,00
Perguruan Tinggi	7,50	7,82	10,08	37,35	37,24	100,00
Kopi						
SD Kebawah	4,25	8,75	12,63	39,82	34,54	100,00
SLTP	6,80	28,49	28,13	25,37	11,21	100,00
SLTA	11,32	21,07	6,29	34,59	26,73	100,00
Perguruan Tinggi	6,34	19,31	31,41	25,65	17,29	100,00

Selain tingkat pendidikan, jenis kelamin juga diduga berpengaruh pada kinerja dalam mengelola usaha perkebunan. Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa pada tanaman cengkeh dan kakao untuk tingkat efisiensi diatas 0,8,



persentase rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan relatif berimbang, artinya jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi usaha perkebunan. Sementara itu untuk komoditas kelapa, persentase rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki lebih besar daripada rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan, artinya kinerja laki-laki lebih baik dari perempuan.

Tabel 5.5. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumahtangga dan Tingkat Efisiensi.

Jenis Kelamin	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Laki-laki	3,43	2,77	11,43	37,56	44,80	100,00
Perempuan	2,64	3,94	5,92	41,02	46,49	100,00
Kakao						
Laki-laki	14,08	9,61	20,35	35,36	20,60	100,00
Perempuan	14,06	11,00	13,42	51,45	10,07	100,00
Kelapa						
Laki-laki	3,14	3,97	12,52	45,02	35,36	100,00
Perempuan	-	6,67	26,67	42,38	24,29	100,00
Kelapa Sawit						
Laki-laki	5,65	9,27	13,19	38,48	33,40	100,00
Perempuan	9,92	-	9,78	31,93	48,37	100,00
Kopi						
Laki-laki	9,82	21,99	25,69	26,33	16,16	100,00
Perempuan	-	-	-	100,00	-	100,00

Selanjutnya untuk komoditas kelapa sawit dan kopi, pada tingkat efisiensi diatas 0,8, persentase rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan justru lebih besar daripada rumahtangga yang dipimpin oleh laki-laki. Ini berarti kinerja perempuan lebih baik dalam mengelola usaha perkebunan

kelapa sawit dan kopi. Argumen yang relevan untuk kondisi ini mungkin kedua komoditas perkebunan ini khususnya kelapa sawit, dikelola dengan manajemen yang lebih modern karena terkait dengan perusahaan industri yang menjadi penampung kelapa sawit petani. Perempuan lebih teliti dalam mengelola usaha yang menuntut tertib administrasi dan catatan kegiatan secara detail.

Disamping profil petani, ketersediaan lahan juga merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja usaha perkebunan. Dalam hal ini, ingin dilihat apakah status ketersediaan lahan juga mempengaruhi tingkat efisiensi usaha. Dari Tabel 5.6, terlihat untuk tingkat efisiensi diatas 0,8; pada komoditas cengkeh, kelapa sawit dan kopi memiliki persentase rumahtangga yang paling tinggi, artinya untuk komoditas-komoditas tersebut lahan milik sendiri memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan lahan dari sewa/gadai dan bebas sewa. Kondisi ini lebih disebabkan oleh faktor pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani pemilik lahan, daripada petani harus mengeluarkan biaya lahan untuk kasus sewa/gadai. Dengan demikian petani pemilik lahan dapat menghemat biaya produksi.

Untuk kasus bebas sewa, ada kemungkinan lahan yang diperoleh masih membutuhkan biaya seperti biaya pematangan lahan sebelum diusahakan untuk perkebunan, termasuk juga dibutuhkan biaya transportasi karena lahan yang bebas sewa cenderung berjarak jauh dari tempat tinggal petani. Umumnya petani mencari lahan sewaan yang dekat dengan domisilinya.

Selanjutnya untuk komoditas kakao dan kelapa, untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 memiliki persentase rumahtangga tertinggi dengan lahan berstatus sewa/gadai. Pada komoditas kakao hal ini diduga petani akan lebih berhati-hati dalam merawat tanaman karena mereka telah membayar sewa tanah sehingga berupaya agar tanaman tersebut memberikan hasil panen dengan produktivitas yang lebih tinggi.



Tabel 5.6. Distribusi Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Status Lahan dan Tingkat Efisiensi

Status Lahan	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Milik sendiri	3,35	2,91	10,91	37,83	45,00	100,00
Sewa/Gadai	-	-	21,28	42,40	36,32	100,00
Bebas Sewa	5,62	0,83	15,72	34,16	43,67	100,00
Kakao						
Milik sendiri	13,79	9,72	19,95	36,39	20,14	100,00
Sewa/Gadai	14,76	1,85	7,97	52,99	22,44	100,00
Bebas Sewa	27,78	10,66	23,54	27,13	10,88	100,00
Kelapa						
Milik sendiri	3,23	4,58	14,27	46,54	31,38	100,00
Sewa/Gadai	-	-	-	64,34	35,66	100,00
Bebas Sewa	-	-	10,43	-	89,57	100,00
Kelapa Sawit						
Milik sendiri	6,06	8,57	12,82	38,01	34,54	100,00
Sewa/Gadai	-	-	39,82	60,18	-	100,00
Bebas Sewa	-	23,32	7,77	30,05	38,86	100,00
Kopi						
Milik sendiri	9,74	21,81	25,48	26,96	16,02	100,00
Sewa/Gadai	-	-	-	-	-	-
Bebas Sewa	-	-	-	-	-	-

Adapun untuk kasus sewa/gadai tanaman kelapa, banyak kasus pemilik lahan di Sulteng menggadaikan tanah mereka beserta tanaman kelapa yang telah menghasilkan kepada orang lain. Kondisi ini menyebabkan penyewa lahan memperoleh hasil yang cukup baik karena tidak harus mengeluarkan biaya produksi seperti pengadaan bibit tanam, pengolahan lahan atau biaya *overhead* lainnya. Dengan demikian penyewa/penggadai

lahan tanaman kelapa dapat menghemat biaya produksi dan menghasilkan kinerja yang lebih efisien.

Tabel 5.7. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Sistem Penanaman dan Tingkat Efisiensi.

Sistem Penanaman	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Tunggal	3,13	2,65	10,45	38,47	45,31	100,00
Tumpangsari	5,18	4,75	12,81	21,89	45,38	100,00
Campuran	4,94	3,37	18,27	34,52	38,90	100,00
Kakao						
Tunggal	13,72	9,59	18,03	38,00	20,67	100,00
Tumpangsari	19,35	11,40	21,08	28,02	20,15	100,00
Campuran	11,15	8,68	25,77	37,03	17,37	100,00
Kelapa						
Tunggal	3,52	4,33	13,85	42,44	35,86	100,00
Tumpangsari	-	6,75	-	61,90	31,35	100,00
Campuran	-	-	22,43	51,84	25,74	100,00
Kelapa Sawit						
Tunggal	6,01	8,88	12,48	38,79	33,84	100,00
Tumpangsari	-	-	-	-	-	-
Campuran	-	-	40,91	-	59,09	100,00
Kopi						
Tunggal	5,61	25,58	26,13	25,58	17,10	100,00
Tumpangsari	16,77	21,70	28,60	21,10	11,83	100,00
Campuran	6,70	6,70	13,97	49,16	23,46	100,00

Selain status penguasaan lahan, sistem penanaman juga berpengaruh pada efisiensi usaha. Tabel 5.7 menyajikan hubungan tingkat efisiensi dengan sistem penanaman yang diterapkan petani. Untuk tingkat efisiensi diatas 0,8, rumahtangga yang mengelola perkebunan dengan sistem penanaman tunggal tercatat memiliki persentase paling tinggi untuk komoditas cengkeh,



kakao dan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komoditas tersebut akan memberikan hasil panen yang lebih baik jika diusahakan secara tunggal, bukan dibudidayakan secara tumpangsari atau campuran antara tunggal dan tumpangsari.

Pada sisi lain, untuk komoditas kelapa ternyata memiliki persentase rumahtangga terbesar pada sistem penanaman dengan tumpangsari jika diamati untuk tingkat efisiensi diatas 0,8. Kondisi ini diduga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat di Sulteng melakukan tumpangsari tanaman kelapa dengan tanaman jagung atau palawija lainnya. Saat melakukan pemeliharaan tanaman jagung seperti menyiangi dan memupuk, secara tidak langsung ikut menyuburkan tanaman kelapa sehingga menaikkan produktivitas tanaman kelapa dan memberikan hasil yg lebih efisien dalam proses produksinya. Kondisi ini mendorong komoditas kelapa memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi jika dibudidayakan secara tumpangsari.

Disamping sistem penanaman, kualitas benih juga diduga berpengaruh terhadap efisiensi tanaman. Penggunaan bibit yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang dapat berproduksi secara optimal yang pada akhirnya akan menaikkan nilai produksi tanaman itu sendiri.

Pengamatan untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 menunjukkan pada komoditas cengkeh dan kakao memiliki persentase rumahtangga yang menggunakan bibit bersertifikat dan tidak bersertifikat relatif sama. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan untuk pemakaian bibit bersertifikat atau tidak. Sementara itu, untuk tanaman kelapa dan kelapa sawit ditemukan bahwa untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 ternyata persentase rumahtangga yang menggunakan benih bersertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan rumahtangga yang menggunakan bibit tidak bersertifikat. Ini berarti untuk tanaman kelapa dan kelapa sawit, pilihan petani dapat diarahkan untuk menggunakan bibit yang bersertifikat jika ingin hasil

produksinya lebih tinggi dan memberikan efisiensi usaha yang lebih tinggi pula.

Tabel 5.8. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Jenis Benih dan Tingkat Efisiensi

Jenis Benih	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Bersertifikat	4,59	2,91	7,07	43,50	41,93	100,00
Tidak Bersertifikat	3,33	2,83	11,30	37,50	45,04	100,00
Kakao						
Bersertifikat	14,87	9,97	23,98	36,09	15,09	100,00
Tidak Bersertifikat	14,04	9,68	19,72	36,33	20,24	100,00
Kelapa						
Bersertifikat	5,08	-	-	85,42	9,49	100,00
Tidak Bersertifikat	2,70	4,58	14,89	40,58	37,24	100,00
Kelapa Sawit						
Bersertifikat	4,85	8,91	13,22	39,47	33,55	100,00
Tidak Bersertifikat	14,91	7,07	11,02	26,32	40,68	100,00
Kopi						
Bersertifikat	100,00	-	-	-	-	100,00
Tidak Bersertifikat	8,90	22,01	25,71	27,21	16,17	100,00

Selain faktor internal petani, beberapa faktor eksternal juga mempengaruhi proses produksi petani. Gangguan hama, perubahan iklim, bahkan bencana alam sangat berpengaruh dalam aktivitas usaha pertanian yang sangat peka terhadap perubahan kondisi alam dan lingkungannya. Berikut ini akan dicermati hubungan antara serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) terhadap tingkat efisiensi tanaman perkebunan.

Tabel 5.9 menyajikan hubungan keberadaan serangan OPT dengan tingkat efisiensi. Terlihat bahwa untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 mencatat



persentase rumahtangga yang mengalami serangan OPT atau tidak relatif berimbang yakni 82,83 dan 82,38 persen untuk tanaman cengkeh, 78,11 dan 80,52 persen (kelapa) serta 71,78 dan 72,73 persen untuk tanaman kelapa sawit. Ini berarti untuk ketiga komoditas tersebut, keberadaan serangan OPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi. Kondisi ini mungkin terjadi karena intensitas serangan OPT tidak terlalu besar sehingga belum menyebabkan penurunan kinerja produksi tanaman.

Tabel 5.9. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Keberadaan Serangan OPT dan Tingkat Efisiensi.

Keberadaan Serangan OPT	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Ya	3,14	3,09	10,95	36,01	46,82	100,00
Tidak	3,85	2,37	11,40	41,08	41,30	100,00
Kakao						
Ya	14,10	9,96	20,42	35,66	19,86	100,00
Tidak	13,66	3,74	9,35	50,84	22,41	100,00
Kelapa						
Ya	3,53	4,61	13,75	52,27	25,85	100,00
Tidak	2,44	3,78	13,26	38,84	41,69	100,00
Kelapa Sawit						
Ya	3,73	12,16	12,34	49,65	22,13	100,00
Tidak	7,16	6,75	13,37	31,46	41,28	100,00
Kopi						
Ya	7,65	15,06	29,53	29,06	18,71	100,00
Tidak	12,87	31,92	19,40	23,81	11,99	100,00

Pada komoditas lain yakni kakao, untuk tingkat efisiensi diatas 0,8 tercatat rumahtangga yang mengalami seranga OPT sebanyak 55,52 persen sedangkan yang tidak mengalami serangan OPT sebanyak 73,25 persen. Ini

mengisyaratkan serangan OPT berpengaruh signifikan untuk tanaman kakao sehingga menurunkan tingkat efisiensi pada rumahtangga yang terkena serangan OPT.

Tabel 5.10. Distribusi Rumahtangga Usaha Perkebunan Menurut Keberadaan Perubahan Iklim/Bencana Alam dan Tingkat Efisiensi

Keberadaan Perubahan Iklim/Bencana	Tingkat Efisiensi					Total
	< 0,5	0,6-0,7	0,7-0,8	0,8-0,9	> 0,9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cengkeh						
Ya	4,58	3,16	16,39	35,76	40,12	100,00
Tidak	3,22	2,79	10,36	33,05	45,58	100,00
Kakao						
Ya	20,54	11,70	21,29	26,45	20,02	100,00
Tidak	11,17	8,79	19,33	40,76	19,95	100,00
Kelapa						
Ya	5,57	8,52	22,95	52,13	10,82	100,00
Tidak	2,64	3,67	12,45	44,04	37,20	100,00
Kelapa Sawit						
Ya	4,50	5,62	11,35	34,44	43,99	100,00
Tidak	6,81	10,88	14,13	40,63	27,56	100,00
Kopi						
Ya	18,64	26,20	21,16	30,98	3,02	100,00
Tidak	6,27	20,10	27,16	25,39	21,08	100,00

Disamping serangan OPT, keberadaan perubahan iklim/bencana diduga juga berpengaruh terhadap tingkat efisien. Tabel 5.9 menyajikan hubungan keberadaan perubahan iklim atau bencana alam terhadap tingkat efisiensi. Pada tingkat efisiensi diatas 0,8 untuk semua komoditas perkebunan terpilih kecuali kelapa sawit menunjukkan bahwa persentase rumahtangga yang tidak mengalami perubahan iklim atau bencana alam selalu lebih tinggi. Ini berarti perubahan iklim atau bencana alam berdampak negatif terhadap



tingkat efisiensi sehingga keberadaannya menekan tingkat efisiensi usaha perkebunan.

B. Analisis Determinan Usaha Perkebunan Cengkeh, Kakao dan Kelapa

Bagian berikut ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas usaha perkebunan yang direpresentasikan melalui output komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang akan ditelaah hanya mencakup tiga komoditas yakni Cengkeh, Kakao dan Kelapa. Komoditas ini dipilih karena merupakan komoditas unggulan yang mempunyai nilai strategis sebagai komoditas yang memiliki produksi terbesar, paling banyak diusahakan oleh rumah tangga selain juga sebagai penyerap tenaga kerja.

Secara analisis ekonomi diketahui bahwa produktivitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan output produksi pertanian biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor input produksi pertanian seperti tenaga kerja, modal, dan lahan, dan cara pengelolaan usaha. Masing-masing faktor tersebut memiliki peranan yang berbeda namun saling terkait satu sama lain. Saling keterkaitan antar faktor produksi biasanya dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Sehingga jika hendak meneliti masalah produktivitas harus juga meneliti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman yang akan diteliti.

Salah satu faktor dalam peningkatan produktivitas lahan pertanian adalah modal. Istilah modal dalam usaha pertanian mencakup alat-alat pertanian, bibit, pestisida, traktor dan sarana fisik lain yang menunjang produksi pertanian tanaman pangan. Faktor lain yang tidak kalah penting yang memengaruhi produktivitas lahan pertanian adalah tenaga kerja. Namun peningkatan jumlah tenaga kerja yang melimpah jika tidak disertai kualitas tenaga kerja yang memadai akan menyebabkan dampak produktivitas yang

negatif. Penggunaan ukuran produktivitas yang digunakan tergantung tujuan dan ketersediaan data dalam analisis ST 2013 subsektor perkebunan.

Faktor-faktor produksi yang menentukan keberhasilan produksi/ produktivitas suatu usaha rumah tangga perkebunan (ST 2003) adalah: tenaga kerja dan karakteristik pekebun; serta teknologi dan kewirausahaan. Berdasarkan hasil ST 2013 subsektor perkebunan faktor-faktor produksi ini dapat dibentuk dari variabel-variabel berikut ini:

1. Pendidikan Pekebun
2. Usia Pekebun
3. Jenis kelamin pekebun
4. Jumlah Tenaga Kerja
5. Jumlah tanaman perkebunan (untuk perkebunan tahunan)
6. Pengolahan hasil produksi menjadi produk olahan
7. Cara pengangkutan hasil pertanian (dikategorikan 2 kelompok : pengangkutan dengan kendaraan bermotor dan tak bermotor)
8. Masalah pemasaran (ada atau tidak)
9. Varietas benih utama yang digunakan (bersertifikat atau tidak)
10. Sarana pengolahan lahan (melakukan pengolahan dan tidak melakukan pengolahan)
11. Cara penanaman (teratur atau tidak teratur)
12. Status lahan (kategori bebas sewa atau sewa)
13. Jumlah ART yang menjadi pekebun

Metode yang akan digunakan dalam analisis ini adalah analisis regresi linear berganda. Model yang akan dibentuk adalah fungsi produksi dimana variabel tak bebas yang digunakan adalah nilai produksi komoditas unggulan. Produksi tanaman secara langsung juga menggambarkan produktivitas karena produktivitas adalah produksi dibagi dengan luas lahan. Metode



analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh faktor-faktor yang telah terbentuk di atas terhadap terhadap produktivitas usaha RT perkebunan. Dalam penelitian kali ini model yang digunakan fungsi produksi dimana output merupakan fungsi dari input. Secara umum persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \dots + \beta_{13} \ln X_{13}$$

dimana :

Y_i = Nilai produksi

X_1 = Pendidikan Pekebun (dikategorikan dalam dua kelompok : pendidikan dasar (SLTA kebawah) dan pendidikan tinggi (Diploma keatas)

X_2 = Usia Pekebun

X_3 = Jenis Kelamin

X_4 = Jumlah Tenaga Kerja

X_5 = Jumlah tanaman perkebunan (untuk perkebunan tahunan)

X_6 = Pengolahan hasil produksi menjadi produk olahan

X_7 = Cara pengangkutan hasil pertanian (dikategorikan 2 kelompok : pengangkutan dengan kendaraan tidak bermotor dan bermotor)

X_8 = Masalah pemasaran (Tidak ada atau ada)

X_9 = Varietas benih utama yang digunakan (tidak bersertifikat-kode 1 atau bersertifikat-kode 2)

X_{10} = Sarana pengolahan lahan (melakukan pengolahan dan tidak melakukan pengolahan)

X_{11} = Cara penanaman (tidak teratur-1 atau teratur-2)

X_{12} = Status lahan (kategori bebas sewa atau sewa)

X_{13} = Jumlah ART yang menjadi pekebun

Untuk menghasilkan penduga linear tak bias terbaik (BLUE) maka terdapat beberapa asumsi harus dipenuhi yaitu:

- o Y_i (variabel tak bebas/*dependent variable*) merupakan random variable/bersifat stochastic.
- o X_i (variabel bebas/*independent variable*) bersifat *fixed/non* stochastic.
- o $E(\epsilon_i) = 0$, untuk setiap i
- o $E(\epsilon_i, \epsilon_j) = \sigma^2$ untuk $i \neq j$ (Homoscedastic)
- o ϵ_i merupakan random variable yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian atau biasa dituliskan sebagai; $\epsilon_i \sim NID(0, \sigma^2)$

Proses Pemilihan Variable Bebas

Variabel-variabel bebas yang merupakan kandidat dari variabel-variabel untuk model yang akan digunakan melihat hubungan antara faktor produksi dengan nilai produksi tanaman perkebunan dipilih dengan mengamati nilai korelasinya. Korelasi antara variabel bebas dengan variabel tak bebas perlu dilihat mengingat asumsi pertama dari model regresi berganda adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Pada tahap ini variabel bebas yang berkorelasi sangat kecil dengan variabel tak bebas dikeluarkan dari kandidat variabel bebas. Sehingga hanya variabel-variabel yang berkorelasi tinggi yang akan dimasukkan pada model sementara. Setelah melalui saringan korelasi maka dari 13 variabel tersebut diatas, seluruhnya dapat dimasukkan dalam persamaan. Setelah 13 variabel bebas dimasukkan dalam model, diperoleh persamaan yang menyatakan variabel pendidikan



pekebun (X_1) tidak signifikan dengan tingkat keyakinan dibawah 13 persen, sehingga X_1 tidak dilibatkan dalam model. Selanjutnya model akhir yang terpilih untuk masing- masing komoditi kemudian diuji berdasarkan asumsi yang mendasari pembentukan model-model tersebut. Asumsi yang diuji adalah homoskedastis, multikolineariti, dan normalitas dari error.

Tabel 5.11 menyajikan hasil persamaan regresi yang melibatkan seluruh variabel usaha perkebunan yang dihipotesiskan berkorelasi dengan nilai produksi.

Tabel 5.11. Hasil Regresi Linier untuk Tanaman Perkebunan

Variabel	Koefisien	Standar Error	P-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	6.768	0.026	0.000
Pendidikan	-0.020	0.013	0.130
Usia	0.035	0.007	0.000
Jenis Kelamin	-0.169	0.010	0.000
Jumlah Tenaga Kerja	0.802	0.003	0.000
Jumlah tanaman	0.158	0.001	0.000
Pengolahan	0.748	0.010	0.000
Pengangkutan	0.250	0.005	0.000
Pemasaran	0.094	0.006	0.000
Varietas	0.308	0.009	0.000
Sarana Pengolahan	0.011	0.005	0.026
Cara Penanaman	0.285	0.008	0.000
Status Lahan	-0.143	0.010	0.000
Jumlah Pekebun	0.211	0.007	0.000

Hasil ini relatif konsisten dengan analisis tingkat efisiensi dimana faktor pendidikan hanya berpengaruh cukup kuat pada petani komoditas kelapa sawit, sedangkan pada komoditas lainnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi usaha.

Tabel 5.12 menyajikan model persamaan usaha perkebunan tanpa melibatkan variabel pendidikan pekebun. Dari model terlihat bahwa sebagian besar variabel berkorelasi positif dengan nilai produksi, kecuali variabel jenis kelamin dan status lahan. Koefisien negatif pada jenis kelamin berarti bahwa pengelolaan usaha perkebunan oleh laki-laki memberikan nilai produksi yang lebih tinggi, dan ini sesuai dengan hipotesis awal.

Tabel 5.12. Hasil Regresi Linier untuk Tanaman Usaha Perkebunan (Tanpa Variabel Pendidikan)

Variabel	Koefisien	Standar Error	P-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	6.767	0.026	0.000
Usia	0.035	0.007	0.000
Jenis Kelamin	-0.168	0.010	0.000
Jumlah Tenaga Kerja	0.802	0.003	0.000
Jumlah tanaman	0.158	0.001	0.000
Pengolahan	0.749	0.010	0.000
Pengangkutan	0.250	0.005	0.000
Pemasaran	0.094	0.006	0.000
Varietas	0.308	0.009	0.000
Sarana Pengolahan	0.012	0.005	0.024
Cara Penanaman	0.286	0.008	0.000
Status Lahan	-0.143	0.010	0.000
Jumlah Pekebun	0.212	0.007	0.000

Adapun koefisien negatif pada status lahan berarti bahwa lahan milik sendiri (kode 1) memberikan nilai produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan bebas sewa (kode 3). Variabel bebas yang berpengaruh besar terhadap nilai produksi yang tercermin dari besarnya nilai koefisien persamaan regresi adalah jumlah tenaga kerja, pengolahan hasil produksi dan jenis varietas yang ditanam.



Selanjutnya, untuk gambaran yang lebih detil terhadap tiga komoditas perkebunan yang dipilih yakni kakao, cengkeh dan kelapa, model akhir untuk masing-masing komoditi dibahas dibawah ini.

Model Regresi Untuk Produksi Tanaman Cengkeh

Model regresi linier untuk tanaman cengkeh menunjukkan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah tanaman dan jumlah pekebun merupakan faktor dominan terhadap nilai produksi komoditas cengkeh. Faktor besarnya biaya tenaga kerja khususnya untuk biaya panen ternyata ternyata berbanding lurus dengan nilai produksi, sekaligus hubungan ini dapat menggambarkan skala produksi usaha perkebunan cengkeh. Artinya semakin besar biaya tenaga kerja menunjukkan jumlah tanaman cengkeh yang dikelola uga semakin besar.

Tabel 5.13. Hasil Regresi Linier untuk Tanaman Cengkeh

Variabel	Koefisien	Standar Error	P-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	5.553	0.043	0.000
Usia	0.227	0.011	0.000
Jenis Kelamin	0.125	0.016	0.000
Jumlah Tenaga Kerja	0.573	0.004	0.000
Jumlah tanaman	0.619	0.003	0.000
Pengolahan	-0.282	0.015	0.000
Pengangkutan	0.092	0.008	0.000
Pemasaran	-0.268	0.013	0.000
Varietas	-0.095	0.018	0.000
Sarana Pengolahan	0.089	0.009	0.000
Cara Penanaman	-0.092	0.014	0.000
Status Lahan	-0.026	0.014	0.072
Jumlah Pekebun	0.191	0.010	0.000

Faktor yang membedakan model persamaan regresi komoditas cengkeh dan komoditas perkebunan secara umum adalah koefisien negatif pada variabel ada tidaknya pengolahan, masalah pemasaran, varietas dan cara penanaman. Hubungan negatif ini menunjukkan gambaran yang berbeda dengan kondisi umumnya. Seperti koefisien negatif pada variabel Varietas mengisyaratkan bahwa komoditas cengkeh cenderung memiliki nilai produksi tinggi untuk pemakaian benih tidak bersertifikat. Fenomena ini menunjukkan bahwa petani cengkeh di Sulteng umumnya tidak menggunakan benih yang bersertifikat, karena benih tanaman cengkeh banyak dijual tanpa label sertifikat benih. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis sebelumnya bahwa tingkat efisiensi tanaman cengkeh tidak dipengaruhi oleh jenis benih yang ditanam, bersertifikat atau tidak.

Model Regresi Untuk Produksi Tanaman Kakao

Model regresi linier untuk tanaman kakao menunjukkan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah tanaman dan pengolahan hasil produksi merupakan faktor dominan terhadap nilai produksi komoditas ini. Masuknya kegiatan pengolahan menjadi faktor dominan pada tanaman kakao karena petani umumnya menjual hasil produksi kakao dalam bentuk biji kering, sehingga hampir semua pekebun melakukan pengolahan hasil produksi terlebih dahulu.

Faktor yang membedakan model persamaan regresi komoditas kakao dan komoditas perkebunan secara umum adalah variabel Cara Penanaman tidak signifikan pada tanaman kakao. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan jarak tanam kakao di Sulteng relatif tidak teratur dan hal ini dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* untuk memkampanyekan pentingnya memperhatikan jarak tanam teratur jika menghendaki produktivitas tanaman yang optimal.



Tabel 5.14. Hasil Regresi Linier untuk Tanaman Kakao

Variabel	Koefisien	Standar Error	P-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	4.270	0.028	0.000
Usia	-0.083	0.007	0.000
Jenis Kelamin	-0.289	0.010	0.000
Jumlah Tenaga Kerja	0.372	0.003	0.000
Jumlah tanaman	0.705	0.002	0.000
Pengolahan	0.342	0.014	0.000
Pengangkutan	0.183	0.005	0.000
Pemasaran	0.164	0.005	0.000
Varietas	-0.154	0.011	0.000
Sarana Pengolahan	-0.123	0.005	0.000
Cara Penanaman	0.000	0.008	0.998
Status Lahan	-0.131	0.010	0.000
Jumlah Pekebun	0.004	0.007	0.000

Faktor lainnya yang berbeda pada kakao adalah koefisien negatif pada variabel Usia, Varietas, dan Sarana Pengolahan. Koefisien negatif pada Usia menunjukkan kakao cenderung diusahakan oleh petani yang berusia lebih muda dibandingkan dengan komoditas lainnya. Hasil ini juga konsisten dengan kajian sebelumnya dimana komoditas banyak diminati oleh petani muda karena memberikan nilai jual yang tinggi serta usia mulai panen tanaman ini relatif cepat.

Adapun nilai koefisien negatif pada variabel Varietas menunjukkan sebagian besar bibit tanaman kakao di Sulteng bukan berasal dari benih yang bersertifikat. Fakta ini tidak berarti bahwa tanpa benih bersertifikatpun nilai produktivitas tanaman ini tetap tinggi. Fakta ini justru menggiring kita untuk berpikir bahwa jika menggunakan benih bersertifikat tentu hasilnya akan lebih baik lagi dan kebiasaan ini perlu disosialisasikan kepada petani kakao. Karena

keuntungan benih bersertifikat, disamping produktivitasnya lebih tinggi, juga ketahanan terhadap hama dan OPT serta keunggulan lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan komoditas kakao dalam jangka panjang.

Model Regresi Untuk Produksi Tanaman Kelapa

Model regresi linier untuk tanaman kelapa menunjukkan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah tanaman, usia pekebun dan pemasaran merupakan faktor dominan terhadap nilai produksi komoditas ini. Masuknya variabel usia pekebun dan masalah pemasaran sebagai variabel dominan, menunjukkan petani kelapa cenderung lebih terkonsentrasi pada petani usia dewasa dibandingkan petani usia muda. Hal ini tidak mengejutkan karena kini komoditas kelapa tidak sepopuler dulu pada dekade 70 dan 80an, dimana komoditas ini banyak dicari untuk diekspor sebagai bahan baku industri. Ini menyebabkan rendahnya minat petani baru/muda untuk mengusahakan kelapa, sehingga cenderung didominasi oleh pekebun yang berusia lebih tua.

Sejalan dengan itu, masalah pemasaran yang dominan juga menunjukkan komoditas kelapa dewasa ini kesulitan mencari pasar karena kalah populer dengan kelapa sawit. Kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi pada kepala menjadikan industri minyak goreng lebih memilih kelapa sawit daripada kelapa.

Faktor yang membedakan model persamaan regresi komoditas kelapa dan komoditas perkebunan secara umum adalah koefisien negatif pada variabel Pengolahan dan Cara Penanaman. Koefisien negatif pada variabel Pengolahan menunjukkan nilai produksi yang tinggi pada tanaman menuntut adanya pengolahan sebelum produksi ini dijual. Kebiasaan petani kelapa di Sulawesi Tengah untuk mengolah kelapa menjadi kopra dibandingkan menjual kelapa segar meningkatkan nilai jual produk kelapa.



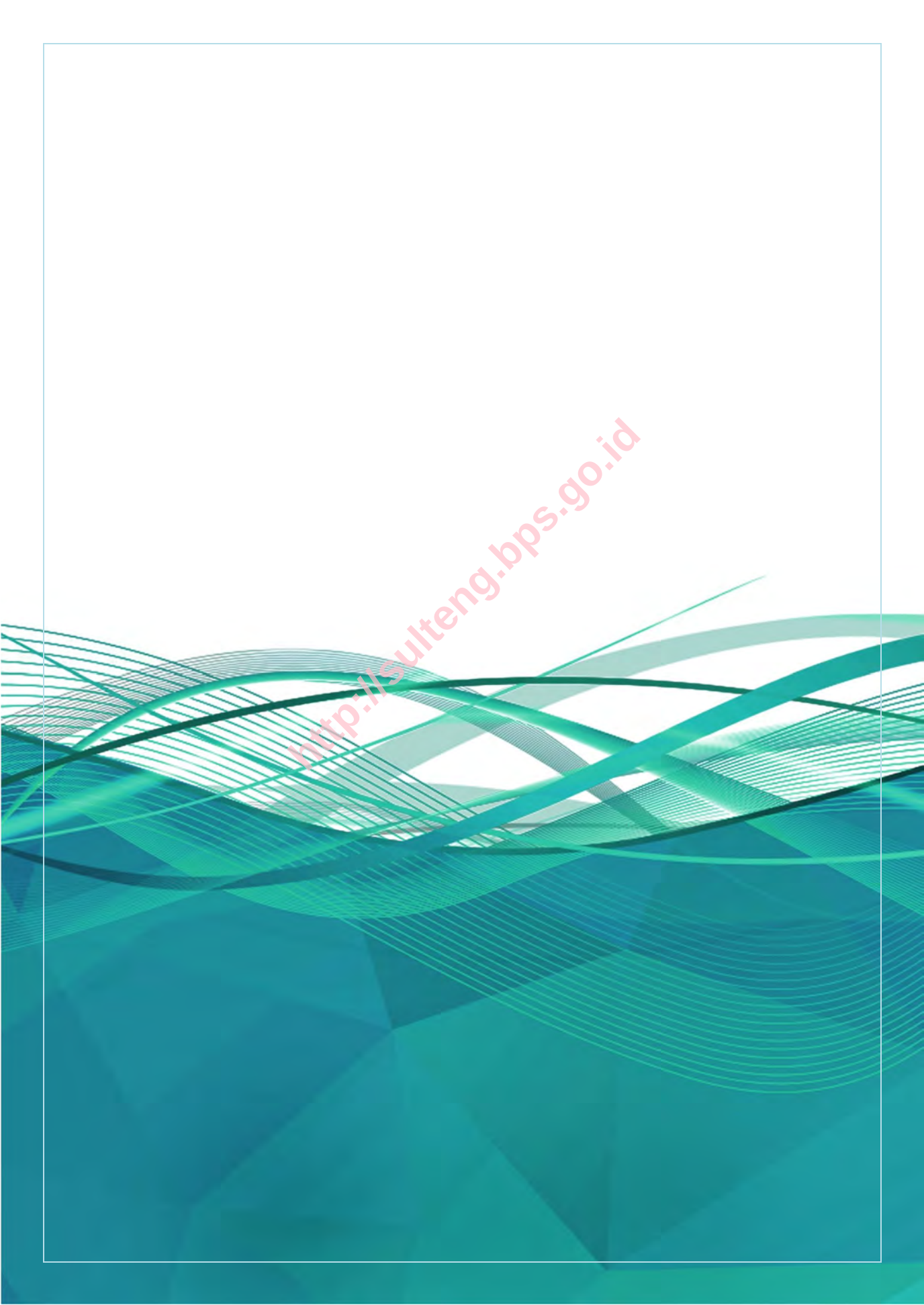
Tabel 5.15. Hasil Regresi Linier untuk Tanaman Kelapa

Variabel	Koefisien	Standar Error	P-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	4.169	0.205	0.000
Usia	0.304	0.049	0.000
Jenis Kelamin	-0.188	0.070	0.007
Jumlah Tenaga Kerja	0.519	0.021	0.000
Jumlah tanaman	0.584	0.013	0.000
Pengolahan	-1.615	0.086	0.000
Pengangkutan	0.218	0.039	0.000
Pemasaran	0.304	0.042	0.000
Varietas	0.292	0.033	0.000
Sarana Pengolahan	0.160	0.038	0.000
Cara Penanaman	-0.190	0.060	0.002
Status Lahan	-0.515	0.047	0.000
Jumlah Pekebun	-0.523	0.045	0.000

KESIMPULAN

<http://sulteng.bps.go.id>

6



KESIMPULAN

Usaha tanaman perkebunan memegang peranan penting bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Hal ini tergambarkan dari cukup banyaknya rumah tangga yang mengusahakan komoditas tanaman perkebunan. Pentingnya usaha tanaman perkebunan juga terlihat dari cukup berartinya peranan komoditas ini pada PDRB Sulawesi Tengah. Selain itu, produk turunan/olahan dari hasil produksi tanaman perkebunan seperti biji kakao, kopra dan *Crude Palm Oil (CPO)* memegang peranan yang cukup besar dalam perdagangan antar daerah maupun ekspor.

Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, dan merupakan lima komoditas perkebunan yang memiliki luas tanam relatif luas dan tersebar di cukup banyak kabupaten di Sulawesi Tengah. Dilihat dari karakteristik demografinya, pekebun utama pada keempat komoditas perkebunan tersebut didominasi oleh pekebun berusia 25-54 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan pekebun utama yang tergolong rendah juga secara umum masih membayangi wajah usaha perkebunan tersebut di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, terlihat bahwa sebagian besar RTUP yakni diatas 90 persen memiliki sendiri lahan perkebunannya. Hal lain yang masih menjadi ciri yang dominan pada usaha perkebunan rumah tangga Cengkeh, Kakao, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi di Sulawesi Tengah yaitu masih sangat minim penggunaan benih bersertifikat dan masih dominannya metode pengendalian OPT dengan cara kimiawi, terutama petani kelapa sawit.

Sementara itu jika dilihat dari struktur ongkos usahanya, pengeluaran untuk pekerja/tenaga kerja merupakan komponen yang paling besar dari keseluruhan biaya/pengeluaran perhektarnya.

Jika dilihat dari sumber pembiayaan usaha, sebagian besar RTUP Kakao, Cengkeh, Kelapa, Kelapa Sawit, dan Kopi (diatas 89 persen) di Sulawesi Tengah menggunakan modal sendiri sebagai sumber utama pembiayaan usaha mereka. Sumber pembiayaan usaha lainnya seperti bank masih jarang dimanfaatkan oleh RTUP tersebut. Suku bunga bank yang relatif tinggi, proses peminjaman yang berbelit-belit, ketidaktahuan prosedur serta ketiadaan agunan merupakan beberapa alasan yang banyak diungkapkan oleh RTUP tersebut sebagai alasan utama tidak menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman dari bank.

Meskipun baru dinikmati oleh sebagian kecil RTUP, bantuan berupa hibah maupun subsidi harga telah dirasakan oleh sekitar 11 persen RTUP di Sulawesi Tengah. Benih dan pupuk merupakan jenis bantuan yang umumnya diterima oleh RTUP tersebut. Bantuan berupa benih gratis paling banyak diterima oleh RTUP Kelapa (28,21 persen). Sedangkan RTUP Kakao, Kelapa Sawit, dan Cengkeh yang menyatakan menerima bantuan berupa benih gratis persentasenya hanya berkisar antara 4,44 hingga 16,68 persen. Adapun bantuan berupa subsidi harga untuk pembelian pupuk cukup dominan dirasakan oleh RTUP perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa dan Cengkeh yang diterima sekitar 71 persen RTUP tersebut. Sementara itu, bantuan berupa pupuk gratis, juga diterima oleh sekitar 66,38 persen dari RTUP Kakao.

Keikutsertaan petani pada koperasi maupun kelompok tani yang terorganisir dengan baik, merupakan salah satu bentuk usaha penguatan kelembagaan petani. Sayangnya, partisipasi RTUP yang telah menjadi anggota koperasi/KUD di Sulawesi Tengah tergolong masih sangat rendah, tidak lebih dari 13 persen. Sementara itu, untuk keterlibatan pada kelompok tani bahkan lebih kecil lagi, kecuali untuk RTUP Kelapa Sawit dan Kakao yang masing-masing 64 dan 28 persen telah menjadi anggota kelompok tani. Belum adanya kelompok tani maupun jenis pelayanan kelompok tani yang tidak memuaskan dan ketidaksesuaian jenis kegiatan kelompok tani dengan kebutuhan RTUP,

merupakan beberapa alasan yang diungkapkan oleh RTUP sebagai alasan tidak bergabungnya mereka kedalam kelompok tani.

Sementara itu, cukup banyak RTUP yakni hampir separuh (49 persen) yang menyatakan bahwa kondisi pembiayaan usaha menjadi terasa lebih sulit dibanding dengan tahun sebelumnya. Kelangkaan sarana produksi dan mahalnya biaya tenaga kerja serta semakin meningkatnya dampak serangan hama OPT merupakan beberapa hal yang juga dirasakan sebagai hambatan usaha oleh RTUP tersebut.

Analisis tingkat efisiensi usaha pada lima komoditas perkebunan terpilih menunjukkan relasi tingkat efisiensi usaha perkebunan dengan tingkat pendidikan pekebun hanya berpengaruh pada komoditas kelapa sawit. Temuan ini tidak mengejutkan karena usaha perkebunan yang dikelola rumah tangga relatif tidak membutuhkan manajemen yang rumit sehingga faktor pendidikan bukan merupakan penentu.

Dalam hal status lahan, tingkat efisiensi usaha perkebunan relatif lebih tinggi pada pekebun yang memiliki lahan sendiri dari mereka yang mengusahakan komoditas perkebunan dengan lahan berstatus bebas sewa atau sewa/gadai.

Selanjutnya berdasarkan sistem penanaman, komoditas cengkeh, kakao dan kelapa sawit menunjukkan tingkat efisiensi usaha menjadi lebih tinggi jika diusahakan secara tunggal, bukan dibudidayakan secara tumpangsari atau campuran antara tunggal dan tumpangsari. Sedangkan untuk komoditas kelapa ternyata tingkat efisiennya lebih baik jika ditanam dengan sistem tumpangsari.

Dampak penggunaan benih bersertifikat ternyata relatif tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi usaha pada rumah tangga yang mengusahakan komoditas cengkeh dan kakao, sedangkan untuk tanaman

kelapa dan kelapa sawit ditemukan bahwa penggunaan benih bersertifikat mampu menaikkan tingkat efisiensi usaha.

Selanjutnya, dampak serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) terhadap tingkat efisiensi tanaman perkebunan pada rumahtangga yang menanam cengkeh, kelapa dan kelapa sawit ternyata relatif tidak berpengaruh, namun cukup berpengaruh pada tanaman kakao.

Sementara itu, keberadaan perubahan iklim atau bencana alam terhadap tingkat efisiensi usaha berpengaruh nyata pada komoditas cengkeh, kakao, kelapa dan kopi, sedangkan untuk kelapa sawit relatif tidak berpengaruh.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2015). *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Vol.XV No.XI November 2015*. Palu: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.
- BPS. (2014). *Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan Tahun 2014: Pedoman Pencacah*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- BPS, 2015. *Sulawesi Tengah Dalam Angka 2015*. Sulawesi Tengah.
- BPS, 2015. *Angka Provinsi Sulawesi Tengah Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan, 2015*. Sulawesi Tengah.
- BPS dan IPB, 2015. *Laporan Akhir Penelitian; Daya Saing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan*. Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2015. Bogor
- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). *Sustainability Certification in the Indonesia Palm Oil Sector: Benefits and challenges for smallholders*. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
- DITJENBUN Kementerian Pertanian. (2013). *Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan: Pedoman Teknis Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian.
- Imron, A. A. (2014, September 09). *Tahapan Dalam Melakukan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan*. Retrieved Desember 4, 2015, from Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Ambon: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpambon/berita-316-tahapan-dalam-melakukan-sertifikasi-benih-tanaman-perkebunan.html>
- Maulana, I. (2013, Mei 27). *Workshop Pembahasan Kegiatan Introduksi Modifikasi Jarak Tanam Karet Terpadu Tanaman Pangan Provinsi*. Retrieved Desember 3, 2015, from Kementerian Pertanian - Direktorat

jenderal Perkebunan: Direktorat Tanaman Tahunan: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanhun/berita-211-workshop-pembahasan-kegiatan-introduksi-modifikasi-jarak-tanam-karet-terpadu-tanaman-pangan-provinsi.html>

Sumaryanto, 2001. *Estimasi Tingkat Efisiensi Usahatani Padi Dengan Fungsi Produksi Frontier Stokastik*. Jurnal Agro Ekonomi. V. 19. No. 1. Mei 2001. Bogor

Wijono, D. B., Lukman, A., & Ainur, R. (2003). *Integrasi Ternak dengan Perkebunan Kelapa Sawit*. Retrieved Desember 3, 2015, from Kementerian Pertanian: <http://kalteng.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/all/pdf/peternakan/fullteks/lokakarya/probklu03-15.pdf>

LAMPIRAN

<http://sulteng.bps.go.id>





REPUBLIK INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK



SENSUS PERTANIAN 2013

SURVEI RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN

TAHUN 2014

RAHASIA

Komoditas perkebunan terpilih:.....

3

I. PENGENALAN TEMPAT

101. Provinsi			
102. Kabupaten/Kota*)			
103. Kecamatan			
104. Desa/Kelurahan*)			
105. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	
106. Nomor Blok Sensus			
107. Nomor Kode Sampel (NKS)		E	
108. Satuan Lingkungan Setempat			
109. Nomor Bangunan Fisik			
110. Nomor Bangunan Sensus			
111. Nomor Urut Rumah Tangga			
112. Nomor Urut Sampel			
113. Nama Kepala Rumah Tangga			
114. Nama Pemberi Informasi			
115. Nomor Telp/HP Pemberi Informasi			

*) Coret salah satu

II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian	Pencacah (PCS)	Pengawas/Pemeriksa (PMS)
(1)	(2)	(3)
201. Kode Petugas		
202. Nama Petugas		
203. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan	 s.d	 s.d
204. Tanda Tangan		

III. KETERANGAN PENCACAHAN

301. Hasil Pencacahan	1. Berhasil diwawancarai 2. Pindah ke luar blok sensus 3. Tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan 4. Menolak diwawancarai	
302. Jika rincian 301 berkode 2, 3, atau 4 : "STOP"		

IV. KETERANGAN DEMOGRAFI PEKEBUN TERPILIH

401. Banyaknya anggota rumah tangga pada saat pencacahan: orang

402. Banyaknya anggota rumah tangga (10 tahun keatas) yang menjadi pekebun komoditas terpilih:
..... orang

Anggota rumah tangga dikategorikan sebagai pekebun komoditas terpilih apabila anggota rumah tangga tersebut mengusahakan/membudidayakan tanaman perkebunan terpilih di lahan yang dikuasai rumah tangga dan menanggung risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

403. Keterangan pekebun terpilih :	
------------------------------------	--

Apabila dalam 1 rumah tangga lebih dari 1 orang pekebun komoditas terpilih (rincian $402 \geq 2$), isikan untuk pekebun dengan nilai produksi paling besar selama setahun yang lalu.

a. Nama :

b. Hubungan dengan kepala rumah tangga:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Kepala rumah tangga | 5. Cucu | ☐ |
| 2. Istri/suami | 6. Orang tua/mertua | |
| 3. Anak | 7. Famili lain | |
| 4. Menantu | 8. Lainnya | |

c. Jenis kelamin:	1. Laki-laki	2. Perempuan	☐
-------------------	--------------	--------------	--------------------------

d. Umur : tahun

e. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki:	
---	--

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Tidak/belum tamat SD | 5. Tamat D1/D2 | ☐ |
| 2. Tamat SD/ sederajat | 6. Tamat Akademi/D3 | |
| 3. Tamat SLTP/ sederajat | 7. Tamat D4/S1 | |
| 4. Tamat SLTA/ sederajat | 8. Tamat S2/S3 | |

V. KOMPOSISI KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA

501. Tanaman Semusim (selama setahun yang lalu)	
---	--

Luas tanam m²

502.Tanaman Tahunan (pada saat pencacahan)	
--	--

Kondisi Tanaman	Jumlah Pohon / Lajar
-----------------	----------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

a. Tanaman belum	Umur (tahun)		Umur (tahun)		Umur (tahun)		Umur (tahun)	
------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

menghasilkan	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						

[illegible]

b. Tanaman	Umur (tahun)		Umur (tahun)		Umur (tahun)		Umur (tahun)	
------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

1. Tuliskan menghasilkan	2. Tuliskan menghasilkan	3. Tuliskan menghasilkan	4. Tuliskan menghasilkan

c. Tanaman tidak	Umur (tahun)	Umur (tahun)	Umur (tahun)	Umur (tahun)
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Omur (tanah)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			Omur (tanah)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			Omur (tanah)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			Omur (tanah)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

[illegible][illegible]

VIA. KETERANGAN PANEN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH
SELAMA SETAHUN YANG LALU

601.	a. Bulan panen selama setahun yang	Bulan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
------	------------------------------------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible][illegible]

b. Panen besar selama setahun yang lalu pada bulan :

B.1. dan B.2. adalah selanjutnya yang terdapat pada bulatan :

c. Rata-rata frekuensi panen per bulan : hari				
---	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

b. Panen besar selama setahun yang lalu pada bulan :

c. Rata-rata frekuensi panen per bulan : hari

2

**VIA. KETERANGAN PANEN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH
SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)**

602. Tanaman yang dipanen sendiri :	
a. Luas panen (m ²) untuk tanaman semusim / Jumlah pohon/lajar untuk tanaman tahunan	
b. Bentuk produksi primer/utama : 1.	kode prod.
(i). Jumlah produksi	kode satuan*
(ii). Nilai produksi (000 Rp)	
2.	kode prod.
(i). Jumlah produksi	kode satuan*
(ii). Nilai produksi (000 Rp)	
3. Nilai produksi primer lainnya (000 Rp)	
c. Nilai hasil ikutan (000 Rp)	
d. Nilai produksi yang dipanen sendiri (rincian 602b[1(ii)+2(ii)+3]+602c) (000 Rp)	
603. Tanaman yang ditebaskan/dijonkan :	
a. Nilai tebasan (000 Rp)	
b. Nilai ijon (000 Rp)	
604. NILAI PRODUKSI SELURUHNYA (rincian 602d + 603a + 603b) (000 Rp)	

*) Kode satuan produksi : 1.liter 2.kg 3.ton 4.butir

VIB. KETERANGAN USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU

605. Jenis lahan :	1. Lahan pertanian sawah (langsung ke rincian 607) 2. Lahan pertanian bukan sawah	☐
606. Jika rincian 605 berkode 2, jenis tanah:	1. Gambut 2. Bukan Gambut	☐
607. Status lahan:	1. Milik Sendiri 2. Sewa/Gadai 3. Bebas Sewa	☐
608. Sistem penanaman:	1. Tunggal 2. Tumpang Sari / Sela 3. Campuran	☐
609. a. Cara penanaman:	1. Teratur 2. Tidak teratur (langsung ke rincian 610)	☐
b. Jika rincian 609.a berkode 1, maka jarak tanam: m x m	, x ,	
610. Varietas benih yang utama digunakan:	1. Bersertifikat 2. Tidak bersertifikat	☐
611. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		
a. Apakah terkena serangan OPT seperti hama, penyakit, gulma, dll ?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke rincian 612)	☐
b. Cara pengendalian yang utama dilakukan jika terkena serangan OPT:	1. Agronomis (pemupukan, pengolahan lahan, pengaturan irigasi, dll) 2. Mekanis (pemagaran/penghalang (seperti plastik), pemakaian perangkat, dll) 3. Hayati (memanfaatkan agen hayati/pemangsa alami yang sesuai) 4. Kimiawi (pestisida, dll) 5. Tidak melakukan pengendalian serangan OPT	☐
c. Jika rincian 611b. berkode 5 (tidak melakukan pengendalian serangan OPT), alasan utamanya adalah :	1. Harga pestisida mahal 3. Tidak ada biaya 2. Sulit mendapatkan pestisida 4. Tidak tahu	☐
612. Dampak perubahan iklim atau bencana alam		
a. Apakah terkena dampak perubahan iklim atau bencana alam ?	1. Ya 2. Tidak (langsung ke Blok VII rincian 701)	☐
b. Jika ya, jenis dampak perubahan iklim atau bencana alam yang utama :	1. Kekeringan 2. Kebanjiran 3. Lainnya (tanah longsor, gempa bumi, dll)	☐

**VII. KETERANGAN ONGKOS/BIAYA PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN TERPILIH
SELAMA SETAHUN YANG LALU**

Ongkos Produksi	Satuan	Banyaknya Penggunaan		Nilai (000 Rp)
		Pembelian	Bukan Pembelian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
701. Benih / Penyisipan	batang			
702. Tanaman pelindung	batang			
703. Pupuk				
a. Urea	Kg			
b. TSP/SP36	Kg			
c. ZA	Kg			
d. KCL	Kg			
e. NPK	Kg			
f. Pupuk organik (kandang/kompos)	Kg			
g. Lainnya (.....)	Kg			
704. a. Stimulan/Zat pengatur tumbuh padat				
b. Stimulan/Zat pengatur tumbuh cair				
705. a. Pestisida padat				
b. Pestisida cair				

706. a. Jumlah pekerja (orang)

Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar		Pekerja Tidak Dibayar	Total Pekerja
	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1) Laki-laki				
2) Perempuan				

b. Upah (000 Rp)

Jenis Kegiatan	Upah Pekerja Dibayar (000 Rp)		Perkiraan Upah Pekerja Tidak Dibayar (000 Rp)		Total Upah (000 Rp)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Pengolahan lahan					
2) Penanaman pohon pelindung					
3) Penanaman tanaman perkebunan					
4) Pemeliharaan (pemangkasan, penyiangan, dll)					
5) Pemupukan					
6) Pengendalian hama/OPT					
7) Pemanenan					
8) Pengeringan/ Penjemuran					

VII. KETERANGAN ONGKOS/BIAYA PRODUKSI USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)					
707. Pengeluaran lainnya					(000 Rp)
a. Lahan					
(i). Sewa					
(ii). Perkiraan sewa lahan bebas sewa/milik sendiri					
b. Alat/sarana usaha					
(i). Sewa					
(ii). Perkiraan sewa alat bebas sewa/milik sendiri					
c. Bunga kredit/pinjaman usaha					
d. Pajak tidak langsung (PBB lahan untuk usaha perkebunan (milik sendiri), dll)					
e. Restribusi/pungutan/iuran (pengairan, dll)					
f. Penyusutan barang modal					
g. Bahan bakar minyak (BBM)					
h. Biaya transportasi/pengangkutan hasil					
i. Jasa pertanian					
j. Lainnya (wadah, dll)					
k. Jumlah					
VIII. KETERANGAN UMUM USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU					
801. Bagaimana cara awal pembukaan lahan komoditas perkebunan terpilih ?					
1. Manual 3. Kimia 5. Tidak melakukan					☐
2. Mekanis 4. Membakar lahan pembukaan lahan					
802. Apakah dalam mengusahakan komoditas perkebunan terpilih melakukan integrasi (terpadu) dengan usaha peternakan ?					☐
1. Ya 2. Tidak					
803. Pengolahan lahan untuk komoditas perkebunan terpilih					
a. Alat/sarana pengolahan lahan yang digunakan:					
1. Traktor roda 4 atau lebih 4. Tenaga manusia (langsung ke rincian 804)					☐
2. Traktor roda 2/hand tractor 5. Tidak melakukan pengolahan (langsung ke					
3. Hewan rincian 804)					
b. Jika rincian 803.a berkode 1,2 atau 3, Status penguasaan alat/sarana pengolahan lahan yang utama:					
1. Milik sendiri (rumah tangga ybs) 3. Sewa					☐
2. Milik kelompok (beberapa rumah tangga) 4.Bebas sewa/lainnya					
804. Sumber pembiayaan untuk komoditas perkebunan terpilih:					
a. Sumber pembiayaan:					
1. Biaya sendiri (rumah tangga ybs) : %					
2. Pinjaman dengan bunga : %					
3. Pinjaman tanpa bunga : %					
4. Lainnya (.....) : %					
5. Jumlah : %					
Jika rincian 804.a.2 tidak terisi, maka langsung ke 805					

VIII. KETERANGAN UMUM USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)

804. b. Jika rincian 804.a.2 terisi, sumber pinjaman dengan bunga yang utama berasal dari: <table border="0"> <tr> <td>1. Bank (langsung ke rincian 805)</td> <td>5. Perusahaan perkebunan</td> </tr> <tr> <td>2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)</td> <td>6. Perorangan</td> </tr> <tr> <td>3. Lembaga keuangan lainnya</td> <td>7. Lainnya (.....)</td> </tr> <tr> <td>4. Koperasi</td> <td></td> </tr> </table> c. Jika rincian 804.b berkode 2 sampai dengan 7, sebab/alasan tidak meminjam dari bank: <table border="0"> <tr> <td>1) Tidak tahu prosedurnya</td> <td>1. Ya</td> <td>2. Tidak</td> </tr> <tr> <td>2) Proses berbelit-belit/lama</td> <td>3. Ya</td> <td>4. Tidak</td> </tr> <tr> <td>3) Tidak mempunyai agunan</td> <td>5. Ya</td> <td>6. Tidak</td> </tr> <tr> <td>4) Suku bunga relatif tinggi</td> <td>7. Ya</td> <td>8. Tidak</td> </tr> <tr> <td>5) Lokasi bank relatif jauh</td> <td>1. Ya</td> <td>2. Tidak</td> </tr> </table> d. Dari rincian 804.c1 sampai dengan 804.c5 yang berkode ganjil (jawaban ya), yang menjadi alasan utama adalah nomor	1. Bank (langsung ke rincian 805)	5. Perusahaan perkebunan	2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)	6. Perorangan	3. Lembaga keuangan lainnya	7. Lainnya (.....)	4. Koperasi		1) Tidak tahu prosedurnya	1. Ya	2. Tidak	2) Proses berbelit-belit/lama	3. Ya	4. Tidak	3) Tidak mempunyai agunan	5. Ya	6. Tidak	4) Suku bunga relatif tinggi	7. Ya	8. Tidak	5) Lokasi bank relatif jauh	1. Ya	2. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1. Bank (langsung ke rincian 805)	5. Perusahaan perkebunan																							
2. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)	6. Perorangan																							
3. Lembaga keuangan lainnya	7. Lainnya (.....)																							
4. Koperasi																								
1) Tidak tahu prosedurnya	1. Ya	2. Tidak																						
2) Proses berbelit-belit/lama	3. Ya	4. Tidak																						
3) Tidak mempunyai agunan	5. Ya	6. Tidak																						
4) Suku bunga relatif tinggi	7. Ya	8. Tidak																						
5) Lokasi bank relatif jauh	1. Ya	2. Tidak																						
805. Bantuan usaha untuk komoditas perkebunan terpilih: a. Apakah menerima bantuan (hibah/gratis atau subsidi) untuk usaha komoditas perkebunan? <table border="0"> <tr> <td>1. Ya</td> <td>2. Tidak (langsung ke rincian 806)</td> </tr> </table> b. Bantuan yang diterima terutama bersumber dari: <table border="0"> <tr> <td>1. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota)</td> </tr> <tr> <td>2. BUMN/BUMD (langsung ke rincian 806)</td> </tr> <tr> <td>3. Perorangan (langsung ke rincian 806)</td> </tr> <tr> <td>4. Lainnya (.....) (langsung ke rincian 806)</td> </tr> </table> c. Jika rincian 805.b berkode 1, jenis bantuan yang diterima: <table border="0"> <tr> <td>1) Benih</td> <td>1. Ya, gratis</td> <td>2. Ya, subsidi harga</td> <td>3. Tidak</td> </tr> <tr> <td>2) Pupuk</td> <td>4. Ya, gratis</td> <td>5. Ya, subsidi harga</td> <td>6. Tidak</td> </tr> <tr> <td>3) Pestisida</td> <td>7. Ya, gratis</td> <td>8. Ya, subsidi harga</td> <td>9. Tidak</td> </tr> <tr> <td>4) Alat/mesin pertanian</td> <td>1. Ya, gratis</td> <td>2. Ya, subsidi harga</td> <td>3. Tidak</td> </tr> </table>	1. Ya	2. Tidak (langsung ke rincian 806)	1. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota)	2. BUMN/BUMD (langsung ke rincian 806)	3. Perorangan (langsung ke rincian 806)	4. Lainnya (.....) (langsung ke rincian 806)	1) Benih	1. Ya, gratis	2. Ya, subsidi harga	3. Tidak	2) Pupuk	4. Ya, gratis	5. Ya, subsidi harga	6. Tidak	3) Pestisida	7. Ya, gratis	8. Ya, subsidi harga	9. Tidak	4) Alat/mesin pertanian	1. Ya, gratis	2. Ya, subsidi harga	3. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
1. Ya	2. Tidak (langsung ke rincian 806)																							
1. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota)																								
2. BUMN/BUMD (langsung ke rincian 806)																								
3. Perorangan (langsung ke rincian 806)																								
4. Lainnya (.....) (langsung ke rincian 806)																								
1) Benih	1. Ya, gratis	2. Ya, subsidi harga	3. Tidak																					
2) Pupuk	4. Ya, gratis	5. Ya, subsidi harga	6. Tidak																					
3) Pestisida	7. Ya, gratis	8. Ya, subsidi harga	9. Tidak																					
4) Alat/mesin pertanian	1. Ya, gratis	2. Ya, subsidi harga	3. Tidak																					
806. Jenis bantuan usaha komoditas perkebunan terpilih yang paling dibutuhkan pada waktu yang akan datang: <table border="0"> <tr> <td>1. Benih</td> <td>5. Pinjaman modal dari bank tanpa agunan</td> </tr> <tr> <td>2. Pupuk</td> <td>6. Pinjaman modal bank dengan subsidi bunga</td> </tr> <tr> <td>3. Pestisida/Pengendali hama (OPT)</td> <td>7. Jaminan harga seperti HPP perkebunan</td> </tr> <tr> <td>4. Alat/mesin pertanian</td> <td>8. Lainnya (.....)</td> </tr> </table>	1. Benih	5. Pinjaman modal dari bank tanpa agunan	2. Pupuk	6. Pinjaman modal bank dengan subsidi bunga	3. Pestisida/Pengendali hama (OPT)	7. Jaminan harga seperti HPP perkebunan	4. Alat/mesin pertanian	8. Lainnya (.....)	☐															
1. Benih	5. Pinjaman modal dari bank tanpa agunan																							
2. Pupuk	6. Pinjaman modal bank dengan subsidi bunga																							
3. Pestisida/Pengendali hama (OPT)	7. Jaminan harga seperti HPP perkebunan																							
4. Alat/mesin pertanian	8. Lainnya (.....)																							
807. Kesulitan/hambatan usaha yang dihadapi dibanding tahun sebelumnya (persepsi responden): <table border="0"> <tr> <td>a) Pembiayaan usaha (lebih sulit memperoleh pinjaman, bunga lebih tinggi, dll)</td> <td>1. Ya</td> <td>2. Tidak</td> </tr> <tr> <td>b) Kenaikan ongkos/biaya produksi relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga produksi</td> <td>3. Ya</td> <td>4. Tidak</td> </tr> <tr> <td>c) Dampak serangan hama/OPT relatif lebih besar/Berat</td> <td>5. Ya</td> <td>6. Tidak</td> </tr> <tr> <td>d) Mendapatkan pekerja lebih sulit/upah pekerja lebih mahal</td> <td>7. Ya</td> <td>8. Tidak</td> </tr> <tr> <td>e) Kelangkaan sarana produksi</td> <td>1. Ya</td> <td>2. Tidak</td> </tr> </table>	a) Pembiayaan usaha (lebih sulit memperoleh pinjaman, bunga lebih tinggi, dll)	1. Ya	2. Tidak	b) Kenaikan ongkos/biaya produksi relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga produksi	3. Ya	4. Tidak	c) Dampak serangan hama/OPT relatif lebih besar/Berat	5. Ya	6. Tidak	d) Mendapatkan pekerja lebih sulit/upah pekerja lebih mahal	7. Ya	8. Tidak	e) Kelangkaan sarana produksi	1. Ya	2. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐								
a) Pembiayaan usaha (lebih sulit memperoleh pinjaman, bunga lebih tinggi, dll)	1. Ya	2. Tidak																						
b) Kenaikan ongkos/biaya produksi relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga produksi	3. Ya	4. Tidak																						
c) Dampak serangan hama/OPT relatif lebih besar/Berat	5. Ya	6. Tidak																						
d) Mendapatkan pekerja lebih sulit/upah pekerja lebih mahal	7. Ya	8. Tidak																						
e) Kelangkaan sarana produksi	1. Ya	2. Tidak																						

VIII. KETERANGAN UMUM USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)

808. a. Apakah ada anggota rumah tangga yang memperoleh penyuluhan/bimbingan mengenai pengelolaan usaha komoditas perkebunan terpilih? 1. Ada 2. Tidak ada (langsung ke rincian 809) b. Jika rincian 808.a berkode 1, penyuluhan/bimbingan diperoleh dari: 1) PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)/ Dinas Perkebunan terkait/Pemerintah 1. Ya 2. Tidak 2) Lainnya (.....) 3. Ya 4. Tidak c. Jika rincian 808.b.1 berkode 1, penyuluhan/bimbingan yang diperoleh dari PPL/Dinas Perkebunan/Pemerintah berkaitan dengan: 1) Teknik budidaya 1. Ya 2. Tidak 2) Pengendalian OPT 3. Ya 4. Tidak 3) Pemasaran/penjualan hasil 5. Ya 6. Tidak 4) Upaya penurunan kehilangan hasil (susut) panen/pasca panen 7. Ya 8. Tidak 5) Lainnya (.....) 1. Ya 2. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
809. a. Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menjadi anggota KUD atau Koperasi Perkebunan pada saat pencacahan? 1. Ada 2. Tidak ada (langsung ke rincian 810) b. Jika "Ada"(rincian 809.a berkode 1), manfaat KUD atau Koperasi Perkebunan untuk pekebun terpilih : 1) Kredit usaha tani 1. Ya 2. Tidak 2) Pengadaan sarana produksi 3. Ya 4. Tidak 3) Pengolahan hasil 5. Ya 6. Tidak 4) Penjualan hasil 7. Ya 8. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐
810. a. Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menjadi anggota kelompok tani komoditas perkebunan terpilih pada saat pencacahan? 1. Ada (langsung ke rincian 811) 2. Tidak ada b. Jika rincian 810.a berkode 2, alasan utama tidak menjadi anggota kelompok tani : 1. Belum ada kelompok tani komoditas perkebunan di daerahnya 2. Sudah ada kelompok tani komoditas perkebunan tetapi lokasinya jauh dari tempat tinggal 3. Sudah ada kelompok tani komoditas perkebunan tetapi jenis kegiatan tidak sesuai kebutuhan 4. Sudah ada kelompok tani komoditas perkebunan tetapi pelayanan tidak memuaskan 5. Alasan lainnya (.....)	☐ ☐
811. a. Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menjadi anggota Asosiasi Petani Perkebunan terpilih pada saat pencacahan? 1. Ada 2. Tidak ada (langsung ke rincian 812) b. Jika "Ada"(rincian 811.a berkode 1), manfaat Asosiasi Petani Perkebunan terpilih untuk pekebun : 1) Meningkatkan pengetahuan/ketrampilan 1. Ya 2. Tidak 2) Membantu akses penyediaan saprotan 3. Ya 4. Tidak 3) Membantu penyelesaian permasalahan usaha perkebunan 5. Ya 6. Tidak 4) Lainnya (.....) 7. Ya 8. Tidak	☐ ☐ ☐ ☐
812. a. Apakah melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan ? 1. Ya 2. Tidak (langsung ke rincian 813) b. Jika "Ya" (rincian 812.a berkode 1), kemitraan yang utama dilakukan dengan : 1. BUMN 2. BUMD 3. Swasta	☐ ☐
813.Cara pengangkutan sebagian besar produksi dari tempat pemanenan ke rumah / tempat penyimpanan / pasar menggunakan : 1. Kendaraan bermotor 4. Tenaga hewan 2. Kendaraan tidak bermotor 5. Tenaga manusia 3. Angkutan sungai 6. Tidak melakukan pengangkutan	☐

VIII. KETERANGAN UMUM USAHA PERKEBUNAN TERPILIH SELAMA SETAHUN YANG LALU (lanjutan)

814. a. Apakah melakukan pengolahan produksi hasil usaha komoditas perkebunan terpilih ?		
1. Ya	2. Tidak (langsung ke rincian 815)	☐
b. Jika "Ya" (rincian 814.a berkode 1), jenis pengolahan produksi yang dilakukan adalah :		
1) Pengerangan	1. Ya	2. Tidak
2) Pengupasan	3. Ya	4. Tidak
3) Perendaman	5. Ya	6. Tidak
4) Pembekuan/Penggumpalan	7. Ya	8. Tidak
5) Fermentasi	1. Ya	2. Tidak
6) Lainnya (.....)	3. Ya	4. Tidak
815. Distribusi hasil perkebunan terpilih :		
a. Dikonsumsi sendiri	:	%
b. KUD/Koperasi Perkebunan	:	%
c. Pasar	:	%
d. Pedagang pengumpul	:	%
e. Perusahaan perkebunan / industri	:	%
f. Stok	:	%
g. Jumlah	: 100	%
		1 0 0
816. a. Apakah dalam pemasaran hasil perkebunan terpilih mengalami kesulitan ?		
1. Ya	2. Tidak (langsung ke Blok IX rincian 901)	☐
b. Bila "ya" (rincian 816.a berkode 1), penyebab kesulitan yang utama adalah :		
1. Masalah angkutan/transportasi	4. Jarak ke tempat pemasaran jauh	
2. Persyaratan kualitas	5. Lainnya (.....)	☐
3. Harga rendah		
IX. KETERANGAN BANGUNAN DAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL RUMAH TANGGA PADA SAAT PENCACAHAN		
901. Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:		
1. Milik sendiri	2. Sewa/kontrak	3. Bebas sewa
		4. Lainnya
902. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yang terluas:		
1. Keramik/marmer/granit	4. Kayu/papan	
2. Ubin/tegél/teraso	5. Bambu	
3. Semen/bata merah	6. Tanah/lainnya	
903. Luas lantai bangunan tempat tinggal : m ²		
904. Jenis atap terluas:		
1. Beton	3. Sirap	5. Asbes
2. Genteng	4. Seng	7. Lainnya
905. Jenis dinding terluas:		
1. Tembok	3. Bambu	
2. Kayu	4. Lainnya (.....)	
906. Sumber penerangan yang utama:		
1. Listrik PLN	3. Bukan listrik	
2. Listrik non PLN		
907. Jenis bahan bakar untuk memasak yang utama :		
1. Listrik	4. Arang kayu/tempurung	
2. Gas/elpiji	5. Kayu	
3. Minyak tanah	6. Lainnya (.....)	
908. Sumber air minum yang utama :		
1. Air dalam kemasan/isi ulang	5. Mata air	
2. Ledeng (meteran/eceran)	6. Air sungai	
3. Pompa/sumur bor	7. Air hujan	
4. Sumur	8. Lainnya (.....)	
909. Fasilitas tempat buang air besar yang utama:		
1. Jamban sendiri (satu rumah tangga)	3. Jamban umum	
2. Jamban bersama (beberapa rumah tangga)	4. Tidak ada	

X. CATATAN

http://sulteng.bps.go.id

KODE KOMODITAS PERKEBUNAN

Kode Tanaman	Jenis Tanaman	Kode Produksi Primer	Bentuk Produksi Primer/Utama	Kode Tanaman	Jenis Tanaman	Kode Produksi Primer	Bentuk Produksi Primer/Utama
Tanaman Perkebunan Unggulan Nasional				Tanaman Perkebunan Tahunan Unggulan Provinsi (lanjutan)			
3107	Kakao	31071 31072	Buah masak/gelondong Biji kering	3112	Kelapa	31121 31122	Buah kelapa Kopra
3109	Karet	31091 31092 31093 31094 31095 31096	Lateks Lump mangkok Lump tahu Lump tanah Sheet Slab	3120	Lada	31201 31202	Lada basah Lada kering
3111	Kelapa sawit	31111	Tandan buah segar	3124	Pala	31241 31242 31243 31244	Biji pala basah Biji pala kering Fulli basah Fulli kering
3119	Kopi	31191 31192	Buah/biji masak Biji kering/kopi berasan	3127	Sagu	31271 31272	Batang sagu Tepung sagu
Tanaman Perkebunan Tahunan Unggulan Provinsi				3129	Teh	31291 31292	Daun teh basah Daun teh kering
3101	Aren/Enau	31011	Nira	Tanaman Perkebunan Semusim Unggulan Provinsi			
3103	Cengkeh	31031 31032	Bunga basah Bunga kering	3120	Tebu	32101	Batang
3105	Jambu mete	31051 31052	Biji basah Biji kering	3211	Tembakau	32111 32112 32113	Daun basah Daun kering Rajangan

<http://sulteng.bps.go.id>

<http://sulteng.bps.go.id>

LEMBAR KERJA

<http://sulteng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjen MT. Haryono No. 27, Palu 94111

Telp.: 0451 483611, 483613, Fax: 0451 483612

E-mail: bps7200@bps.go.id Website: <http://sulteng.bps.go.id>

ISBN 978-602-1385-35-7



9 786021 385357